

**POTENSI ZAKAT SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN UMAT  
PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
(Studi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kendal)**

**TESIS**

Diajukan Kepada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum



Oleh :  
**JA'FAR BAEHAQI**  
NIM : B4A 002 024

Dibawah Bimbingan :  
**PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH.**  
NIP. 130 354 857

**BIDANG KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

# PENGESAHAN

Tesis Berjudul

**POTENSI ZAKAT SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN UMAT  
PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
(Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)**

Yang disusun oleh

**JA'FAR BAEHAQI**

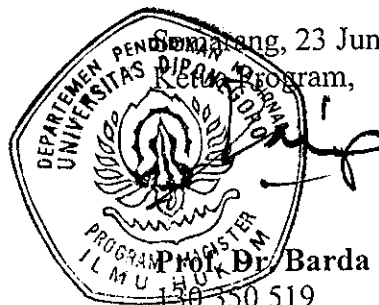
**NIM : B4A 002 024**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Teknologi**

Telah dipertahankan didepan para penguji pada tanggal 23 Juni 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum.

Pembimbing,

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**  
NIP. 130 354 857



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**  
130 350 519

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis sederhana ini, meskipun dengan tertatih-tatih. Shalawat dan salam sejahtera senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi pilihan, Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya.

Bagi penulis lain rasanya studi di pasca sarjana dengan studi di tingkat sarjana dahulu. Bila waktu studi sarjana segala pembiayaan ditanggung orang tua, tidak banyak kesibukan, ditempuh dalam perantauan di kota pelajar Yogyakarta, belum memikirkan keluarga, dan tidak banyak gangguan dan hambatan sehingga penulis dapat menempuhnya di bawah masa studi rata-rata, maka dalam mengarungi studi tingkat magister ini kondisinya sangat berbeda atau bahkan boleh dibilang berbalikan seratus delapan puluh derajat. Masalah-masalah pekerjaan, keluarga, kegiatan sosial kemasyarakatan dan lain-lain cukup menyita waktu (untuk tidak mengatakan telah mengalihkan konsentrasi dan perhatian) penulis, sehingga studi ini tidak dapat terselesaikan secara tepat waktu meskipun sebenarnya penulis yakin dapat melakukannya jauh cepat.

Agaknya, ada dua hal dapat dikemukakan di sini yang menurut penulis merupakan faktor penyebab molornya studi ini. Pertama, masalah biaya. Ibarat orang baru dapat berjalan, penulis memaksakan diri untuk berlari secepatnya mengejar dan tidak mau kalah serta ketinggalan dari mereka yang telah dapat berjalan dan berlari lebih dahulu. Begitulah tamsil yang tepat bagi penulis dalam

menempuh studi program magister ilmu hukum ini kaitannya dalam masalah pembiayaan. Meskipun telah mandiri dan mempunyai pekerjaan tetap, masalah biaya studi di pasca sarjana ini, bagi penulis, jelas tidak mudah mengatasinya. Di sini penulis telah “mengorbankan” semuanya demi cita-cita mulia ini : anak-anak, istri dan yang lain.

Kedua, masalah idealisme. Sejak memasuki semester kedua masalah idealisme ini selalu menghantui pikiran dan benak penulis. Di sini terjadi perbenturan antara cita-cita dan fakta. Antara ingin jadi intelektual yang sebenarnya dalam bidang hukum dan “godaan” untuk lulus cepat plus segera mendapatkan ijazah dan gelar master/magister senantiasa bertarung dalam diri penulis. Penulis berusaha untuk mendamaikan kedua hal ini, akan tetapi *endingnya* penulis sendiri tidak tahu.

Demikian, tesis ini tentu masih jauh dari sempurna. Apa yang ada di dalamnya barangkali terlalu banyak yang harus diperbaiki, yang semua itu menggambarkan kenaifan penulis. Penulis berharap dan senantiasa berdoa agar tesis ini bukan akhir dari pengembaraan penulis dalam menghilangkan kebodohan (*izalatul jahl*). Sebaliknya, penulis bertekad untuk tetap maju sampai titik darah yang penghabisan sekaligus melakukan penyempurnaan diri.

Akhirnya, penulis harus menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayah, ibu, istri dan anak-anak tercinta (Fatih dan Nada), saya pastikan pengorbanan kalian semua tidak akan sia-sia;

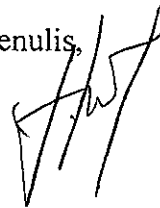
2. Rektor, Direktur Pasca Sarjana dan segenap pimpinan maupun pejabat di Universitas Diponegoro Semarang yang telah “mengijinkan” penulis belajar di kampus terbesar di Jawa Tengah ini;
3. Para Pimpinan IAIN Walisongo dan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang telah memberikan izin pada penulis untuk menempuh studi lanjut ini dan telah pula ikut membantu dalam pembiayaan meskipun tidak seberapa;
4. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH dan Ibu Ani Purwanti, SH, MH selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum serta segenap pengelola yang lain yang tidak mungkin disebut di sini yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan studi ini;
5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku dosen pengajar dan pembimbing tesis ini yang senantiasa dapat “mengerti dan memahami” pribadi penulis atas ketulusan hati dan budi baiknya;
6. Para dosen dan tenaga pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan dan ilmunya semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya, terutama beliau-beliau yang telah wafat semoga mendapatkan kedamaian dan ketenteraman jiwa di samping-Nya;
7. Semua civitas akademika Universitas Diponegoro terutama pada Program Magister Ilmu Hukum dan teman-teman sejawat yang telah bersama-sama menempa diri merasakan pahit getirnya perjuangan suci ini atas bantuan dan kerjasamanya selama ini;

8. Bapak H. Muslim, Bapak H. Rubaidi, Bc. Hk., Bapak H. Solikhin, Bapak H. Su'ud Nasroh dan segenap Pimpinan Muhammadiyah dan eksponen Bapelurzam Cabang Weleri, atas bantuan, keramahan, dan informasinya;
9. Bapak Abdul Wahib, SH selaku Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf kandepag Kendal, Bapak H. Khairuddin, M.Si selaku Kasi Penamas Kandepag Kendal, Bapak H. Bambang Karnadi selaku mantan Kasi Urais kandepag Kandepag Kendal, baik selaku pejabat maupun pengurus Bapelazis atas bantuan, keramahan dan informasinya;
10. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tidak mungkin disebut satu persatu karena banyaknya atas bantuannya;
11. Teman-teman di Lazis NU Kabupaten Kendal atas informasinya;
12. Para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini, terutama adik Kisolul Kirom.

Mudah-mudahan tesis ini ada guna dan manfaatnya dan mereka semua yang tersebut di atas mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah SWT. Amin

Semarang, 21 Juni 2005

Penulis,



**JA'FAR BAEHAQI**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Abstrak.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Kontribusi Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teori dan Pemikiran .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data .....	18
4. Populasi dan Penentuan Sampel .....	19
5. Metode Analisa Data .....	19
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II    TINJAUAN NORMATIF TENTANG ZAKAT.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>23</b>

1. Pengertian Zakat .....	23
2. Kedudukan Zakat dalam Islam .....	26
3. Tujuan dan Fungsi Zakat dalam Islam .....	28
4. Beberapa Ketentuan Teknis Mengenai Zakat .....	31
a. Obyek Zakat.....	31
b. <i>Nishab</i> , Kadar Zakat dan Waktu Pembayaran .....	35
c. Pihak-pihak dan Pos-pos Penerima Zakat .....	42
d. Pengelolaan Zakat.....	45
<b>B. Potensi Zakat sebagai Pilar Perekonomian Umat.....</b>	<b>49</b>
1. Zakat dan Keadilan Sosial (Distribusi Pendapatan) .....	50
2. Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah .....	56
3. Pengaruh Zakat terhadap Investasi dan Terciptanya Lapangan Kerja .....	61
<b>C. Zakat dalam Perspektif UUPZ .....</b>	<b>63</b>
1. Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya UUPZ.....	66
2. Zakat dalam Perspektif UUPZ.....	69
 <b>BAB III POTENSI ZAKAT SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN UMAT DI KABUPATEN KENDAL : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	 <b>73</b>
<b>A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal.....</b>	<b>73</b>
1. Kondisi Geografis dan Topografis.....	73
2. Kondisi Demografis .....	76
3. Kondisi Keagamaan.....	80
4. Kondisi Perekonomian.....	85
5. Kondisi Kesejahteraan Sosial .....	90



<b>B. Profil Badan/Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Kendal .....</b>	<b>92</b>
1. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal .....	97
2. Bapelurzam .....	104
3. Lazis NU .....	111
4. Bapelazis .....	115
<b>C. Penggalian Potensi Zakat di Kabupaten Kendal .....</b>	<b>120</b>
1. Pengumpulan Zakat .....	121
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat .....	136
<b>D. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penggalian Potensi Zakat...</b>	<b>148</b>
1. Faktor Penunjang .....	148
2. Faktor Penghambat .....	150
<b>E. Potensi Zakat sebagai Pilar Perekonomian di Kabupaten Kendal .....</b>	<b>154</b>
<b>F. Inspirasi .....</b>	<b>160</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>175</b>
A. Kesimpulan .....	175
B. Rekomendasi .....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>179</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Jenis harta, nishab, haul dan kadar zakatnya .....	40
Tabel 2 : Asumsi potensi zakat di Indonesia .....	60
Tabel 3 : Luas wilayah Kabupaten Kendal dirinci menurut kecamatan .....	74
Tabel 4 : Banyaknya desa, dukuh, RW dan RT Kabupaten Kendal .....	75
Tabel 5 : Penduduk Kabupaten Kendal .....	77
Tabel 6 : Rata-rata banyaknya penduduk per desa dan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kendal.....	78
Tabel 7 : Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal .....	79
Tabel 8 : Banyaknya pemeluk agama di Kabupaten Kendal .....	82
Tabel 9 : Banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Kendal .....	83
Tabel 10 : PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Kendal 1993-2003.....	87
Tabel 11 : Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal dan kontribusi per sektor.....	90
Tabel 12 : Perkembangan perolehan zakat Bapelurzam Cabang Weleri.....	107
Tabel 13 : Himpunan zakat Bapelurzam Daerah Kendal tahun 1425 H.....	127
Tabel 14 : Perolehan riil dana zakat profesi dan infaq Bapelazis.....	135
Tabel 15 : Data penyaluran dana zakat Bapelurzam Weleri tahun 1424 H.....	142
Tabel 16 : Data penyaluran dana zakat Bapelurzam Weleri tahun 1425 H.....	143
Tabel 17 : Data Wajib Zakat yang sudah Menunaikan Zakatnya .....	156
Tabel 18 : Data Besaran Zakat Yang Dibayarkan Para Muzakki .....	156
Tabel 19 : Data Perhitungan Dana Zakat di Kabupaten Kendal .....	157

Tabel 20 : Persepsi wajib zakat terhadap badan/lembaga .....	164
--	-----

## ABSTRAK

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* (bersifat kebendaan dan sosial) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam, sosial dan ekonomi. Zakat merupakan salah satu lembaga jaminan sosial yang dibawa oleh Islam. Maksud jaminan sosial adalah bahwa setiap individu mendapatkan jaminan untuk dapat hidup secara layak dengan terpenuhinya batas kecukupan (*kifayah*). Akan tetapi dalam kenyataannya zakat seolah menjadi problem masyarakat muslim sepanjang waktu. Ada kesenjangan yang mencolok antara cita dan fakta.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penggalan potensi zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal, faktor-faktor apa saja yang menunjang maupun menghambat, dan bagaimana potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal? Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penggalan potensi zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal, menjelaskan faktor-faktor yang menunjang maupun menghambat penggalan potensi zakat, dan menjelaskan potensi zakat sebagai salah satu pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan kedua merupakan pendekatan yang utama dalam di sini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan penyebaran angket dengan responden yang terdiri dari para pengelola zakat, wajib zakat, dan tokoh masyarakat/kiyahi. Analisis data menggabungkan antara metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif.

Penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal antara lain dengan penciptaan konsep dan penerapan strategi pengelolaan zakat progresif. Ialah suatu konsep dan strategi pengelolaan zakat yang lebih menekankan pada peningkatan jumlah *muzakki* sekaligus jumlah dana yang terkumpul daripada mengedepankan pemenuhan keabsahan secara yuridis normatif. Dari segi penyaluran, konsep dan strategi progresif mengedepankan pertimbangan dalam pengalokasian dana zakat antara kelompok *mustahiq dlu'afa* (kaum lemah) dan kelompok *mustahiq sabilillah* (aktifitas dan pgiat pembinaan umat).

Ada beberapa faktor yang menunjang maupun yang menghambat penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal. Faktor penunjang meliputi pengelola zakat, penguasa dan wajib zakat. Faktor penghambat terdiri dari pengelola, penguasa, wajib zakat, tokoh masyarakat/kiyahi, dan kelembagaan dan operasional organisasi pengelola zakat. Adanya beberapa kesamaan dalam faktor penunjang dan penghambat itu terjadi karena obyek studi meliputi beberapa organisasi pengelola zakat. Di sini terjadi suatu faktor merupakan penunjang bagi sebuah lembaga pengelola zakat tertentu, tetapi sekaligus berperan sebagai penghambat bagi lembaga pengelola zakat yang lain.

Meskipun dana zakat yang dikelola badan/lembaga zakat di Kabupaten Kendal tidak signifikan, akan tetapi tidak secara otomatis dapat disimpulkan

bahwa potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat adalah nihil. Ada beberapa alasan yang mendasari tesis ini. Pertama, badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal tidak hanya Bapelurzam, Bapelazis, Lazis dan BAZ Kendal. Di lapangan banyak sekali terdapat badan/lembaga pengelola zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan. Kedua, dari hasil penelitian terhadap wajib zakat tercatat 73 persen telah rutin menunaikan zakatnya setiap tahun. Dari jumlah itu hanya 1,5 persen yang menyerahkan zakatnya pada badan/lembaga pengelola zakat, sedang lainnya menyerahkannya secara langsung pada para mustahik. Dari penelitian ini juga terungkap besarnya dana zakat yang telah ditunaikan oleh para muzakki secara langsung yang jumlahnya mencapai Rp. Sekitar 42.490.750.000,- (empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah angka yang jauh lebih besar dari PAD Kendal. Ketiga, potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat tidak identik dengan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah saja yang dalam prakteknya hanya dapat diwujudkan jika dana zakat dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat. Potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat juga mencakup suatu kondisi ketika zakat telah berfungsi sebagai alat pendistribusian pendapatan dan telah berperan dalam meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja, meskipun itu tidak bersifat langsung. Kedua kondisi itu bisa terwujud melalui zakat dengan atau tanpa dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat. Dan itulah yang terjadi di Kabupaten Kendal.

## ABSTRACT

Islamic tax (zakat) is religious service of *maliyah ijtimai'iyah* (materialism and social obligation), its position is very importance, strategic and determine, from side of Islam teaching, social and economic. Islamic tax is one of social security institutions brought by Islam. The mean of social security is that everyone get guarantee to earn life competently by fulfilling sufficiency boundary (*kifayah*). However, in reality Islamic tax likely becoming problem of muslim society time to time. There is striking difference between goal (idea) and fact.

The problem focused in this research is how digging of Islamic tax potency by institutions of Islamic tax organizer in Kendal, and what factors that support and also pursue, and how Islamic tax potency as pillar of people economics in Kendal? This search aim to decrypting of digging potency of Islamic tax by institutions of Islamic tax organizer in Kendal, explaining supporting factors and also pursue for digging of potency of Islamic tax, and explain potency of Islamic tax as one of pillars of people economics in Kendal.

The approach method of this research join between] approach of juridical normative and approach of juridical sociologic. Second approach is *prima facie* approach in here. This research has the character of analytical descriptive with source of data of primary and secondary data. Primary data collected through interview and spreading of unquote to responder, which is, consisted of by all institutions of Islamic tax organizer, man what obliged to pay Islamic tax, and top public figure (*kiyahi*). The analysis data join between method qualitative analysis and the quantitative analysis method through descriptive statistic analysis.

The digging Islamic tax potency in Kendal for example with creation conception and applying of strategy of progressive Islamic tax management. This is an concept and strategy of Islamic tax management that more focused to emphasize at improvement sum up *muzakki* at one blow, and sum up fund gathered than placing forward authenticity accomplishment in juridical normative. From its distributions, the concept and progressive strategy place forward counter balance in allocation of Islamic tax fund among group of *mustahiq dlu'afa* ( weak clan) and group of *mustahiq sabilillah* ( the activity and worker or improvements of people construction).

There are some supporting factors and also pursuing of digging of Islamic tax potency in Kendal. Supporter factors covers Islamic tax organizer, arbiter and man who obliged to pay Islamic tax. Pursuing factors consisted of a organizer, arbiter, man who obliged to pay Islamic tax, top public figure (*kiyahi*), and institution and organization of operational of Islamic tax organizer. The existence of some equality in support factors and resist happened since by then of objects study covers some organization of Islamic tax organizer. From here, be happened that some factors are become support one for a certain Islamic tax organizer, but at other hand it's becoming pursuing factor for another one.

Although the managed Islamic tax fund of institute of Islamic tax in Kendal is not significance, but can not inferential automatically that potency of Islamic tax as pillar of people economics is nil. There are some reasons constituting this

thesis. First, institution of Islamic tax organizer in Kendal not only Bapelurzam, Bapelazis, Lazis And BAZ Kendal. But also among others there are institutions of Islamic tax organizer was operating in scope a village (desa/kelurahan). Second, from result this research of man who obliged to pay Islamic tax noted 73 gratuity have routine give or obtain cash for his Islamic tax every year. From that amount only 1,5 gratuity delivering his Islamic tax at institution of Islamic tax organizer, other delivers it directly to all *mustahik*. From this research also, can be expressed that one the level of Islamic tax fund which have been gives or obtain cash for by all *muzakki* directly which reach about Rp. 42.490.750.000, - (forty two billion four hundred ninety million seven hundred fifty thousand rupiah), a number bigger than PAD Kendal. Third, potency of Islamic tax as pillar of people economics [do] not identical or similar of just with enable ness of weakness economics society which in practice can only be realized by if Islamic tax fund that managed by institution of Islamic tax organizer. Potency of Islamic tax as pillar of people economics also include; cover a condition that Islamic tax have functioned as a means of distributing earnings and have played a part in to improve investments and extend employment, although indirectly. Those conditions can be existed through Islamic tax with or without managed by institution of Islamic tax organizer. And that's was happened in Kendal. (Keyword: Potency, dig, and the economics pillar).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang beriman merasa betapa dirinya terikat oleh dan berhubungan dengan dua hal dalam setiap langkahnya, yaitu Allah sebagai penciptanya dan manusia sesamanya yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu merupakan keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut. Allah menamakan hubungan dengan Pencipta itu dengan "*hablun min al-lah*" dan hubungan dengan sesama manusia dengan "*hablun min al-nas*".<sup>1</sup>

Di samping itu orang beriman mengetahui pula bahwa ia diciptakan Allah di permukaan bumi ini tidak lain untuk beribadat kepada-Nya.<sup>2</sup> Bila hal ini dikaitkan dengan dua macam hubungan sebagaimana tersebut di atas maka pengabdian kepada Allah dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama berbakti kepada Allah secara langsung atau yang disebut ibadat dalam arti khusus (*mahdlah*) dan kedua berbakti kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia atau disebut ibadah tidak langsung (*ghair mahdlah*).

Manifestasi dari berbakti kepada sesama manusia pada dasarnya muncul dalam bentuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup> Keharusan saling tolong menolong ini didasarkan kepada kenyataan bahwa manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain

---

<sup>1</sup> Ali Imron (3) : 112.

<sup>2</sup> Al-Dzariyat (51) : 56.

<sup>3</sup> Al-Maidah (5) : 2.



karena secara kodrati ia tidak sempurna dan lemah<sup>4</sup> serta pada dirinya masing-masing terdapat kekurangan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang lain.

Kekurangan yang ada pada satu orang tidak sama dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Adanya perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam kemungkinan berusaha dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sebagian mendapatkan kebutuhan hidupnya secara berlebih dan sebagian yang lain mendapatkannya berkekurangan.<sup>5</sup> Adanya kekurangan dan kelebihan dalam hal rizki tidak boleh dijadikan faktor pemisah antara sesama manusia, tetapi sebaliknya dijadikan sebab untuk saling berhubungan. Karena itu Allah memerintahkan manusia yang mendapatkan rizki berlebih memberikan bantuan kepada mereka yang berkekurangan. Dan, dalam rangka inilah Islam mensyariatkan lembaga zakat.

Zakat merupakan salah satu lembaga jaminan sosial yang dibawa oleh Islam disamping berbagai macam sedekah. Pentingnya jaminan sosial dan perhatian Islam terhadap masalah ini bisa kita dapati dalam pidato pertama yang pernah disampaikan oleh pendiri dan kepala negara Islam yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan juga dalam kebijakan politiknya yang pertama beliau ambil.

Pidato tersebut disampaikan di kota Medinah pada awal hijrahnya. Kata Nabi, "Wahai sekalian manusia, dahulukan bagi dirimu sekalian. Pasti kalian akan tahu, demi Allah, seorang diantara kamu akan terkejut lalu membiarkan kambingnya tiada berpenggembala. Selanjutnya Tuhan akan mengatakan

---

<sup>4</sup> Al-Nisa' (4) : 28.

<sup>5</sup> Al-Nahl (16) : 71 dan Al-Isra' (17) : 30.

kepadanya, tanpa penerjemah atau pengawal yang mengawalinya selain Dia. Tidakkah pernah datang kepadamu utusanku, lalu menyampaikan berita kepadamu. Sementara itu aku datangkan padamu harta dan aku muliakan kamu. Maka apa yang kamu dahulukan bagi dirimu? Dilihatnya oleh orang tadi ke kanan dan ke kiri, tidak terlihat sesuatu pun. Lalu dilihatnya ke depan, tak ada yang dilihatnya selain neraka Jahannam. Maka barang siapa dapat memelihara wajahnya dari api neraka, meskipun hanya dengan secuil kurma, lakukanlah! Dan barang siapa tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik! Dengan demikian kebaikan akan berlipat sepuluh sampai tujuh ratus kali”.

Selanjutnya Nabi menerapkan jaminan sosial ini dalam langkah politik pertama beliau di Medinah, yaitu dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin (pengungsi dari Mekah) dan kaum Anshar (penduduk asli Medinah).<sup>6</sup>

Maksud jaminan sosial adalah bahwa negara menjamin bagi setiap individu dalam negara tersebut taraf hidup yang layak. Orang fakir, sakit dan lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai taraf hidup ini oleh negara dijamin terwujudnya melalui zakat. Taraf hidup layak ini oleh para ahli hukum Islam diistilahkan dengan “batas kecukupan” (*kifayah*), untuk membedakannya dari “batas pas-pasan” (*kafaf*).<sup>7</sup>

Pada sisi lain naluri dan kecenderungan manusia untuk memiliki harta benda adalah sedemikian kuatnya, seolah-olah ia satu –dan identik-- dengan naluri mempertahankan hidup. Harta benda tidak boleh dibenci dan hasrat untuk

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan H. Imam Saefudin, cetakan I (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 108-9.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 109.

meilikinya tidak boleh dimatikan, tetapi hanyalah perlu dijinakkan dengan rasa *qana'ah*, yaitu rasa penghargaan untuk mensyukuri apa yang telah dimiliki yang mengarah kepada kepuasan dan rasa cinta kepada sesama. Hasrat untuk memiliki harta itu dapat pula dikendalikan dengan *berinfaq*, yaitu mengeluarkan atau memanfaatkan harta kepada kemaslahatan diri dan masyarakat.<sup>8</sup> Dan, salah satu bentuk *infaq* itu adalah zakat, yang merupakan titik sentral dari sistem penanganan masalah kemiskinan dalam Islam.<sup>9</sup>

Sedemikian pentingnya zakat dalam Islam, maka al-Qur'an menyebutnya sampai 72 kali.<sup>10</sup> Demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zakat merupakan satu dari lima unsur bangunan keislaman. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman.<sup>11</sup>

Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah shalat. Perintah untuk mendirikan shalat dalam al-Qur'an tidak pernah terpisahkan, melainkan selalu diikuti dengan zakat dan dengan tekanan yang sama.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ali Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan", *Pesantren*, No. 2, Vol. III, Tahun 1986, hal. 3-4.

<sup>9</sup> Secara garis besar dalam Islam infaq dibedakan menjadi dua : wajib dan sunnah. Infaq wajib adalah zakat, sedangkan infaq sunnah adalah shadaqah atau terkadang dipakai istilah infaq baik dengan embel-embel sunnah maupun tidak.

<sup>10</sup> Pendapat yang lain mengatakan 82. Dalam hal ini redaksi yang dipakai antara lain *al-zakah, al-shadaqah, al-ma'un, dan tha'am al-miskin*. Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terjemahan Salman Harun, dkk., cetakan 6 (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hal. 39-40.

<sup>11</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cetakan 2 (Bandung : Mizan, 1994), hal. 231 dan 241. Istilah yang dipakai untuk menyebut bagian-bagian keislaman seperti zakat dan yang semisalnya adalah ما علم من الدين بالضرورة (bagian-bagian keislaman yang sudah diketahui secara pasti).

<sup>12</sup> Baca misalnya al-Baqarah (2) : 83 dan 110, al-Anbiya' (21) : 73, al-Nur (24) : 56 dan lain sebagainya.

Pembayaran zakat dinyatakan sebagai suatu tanda kualitas orang yang benar-benar beriman. Bersama dengan pengakuan keimanan, seorang beriman harus mendirikan shalat dan menuanikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah. Orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata saja, tetapi tidak membayar zakat tidak dapat dianggap sebagai muslim sejati. Setidak-tidaknya tidak ada perbuatan yang memberikan bukti keimanannya.<sup>13</sup>

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu dalam keadaan apapun. Dana zakat digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga penjamin dan sebagai penyedia dana cadangan bagi masyarakat yang bersangkutan. Kecuali itu, zakat merupakan lembaga jaminan sosial bagi setiap anggota masyarakat sehingga tidak seorangpun perlu merasa cemas akan masa depannya.<sup>14</sup>

Akan tetapi, dalam kenyataannya zakat seolah menjadi problem masyarakat muslim sepanjang waktu yang tiada terpecahkan hingga saat ini. Antara cita dan fakta terdapat jarak yang terlalu jauh. Antara sisi normatif dan sisi historisnya terdapat kesenjangan yang tak mampu ditutupi oleh siapapun. Potensi zakat yang demikian besar hanya sebatas potensi yang belum dapat digali secara serius karena berbagai faktor.

---

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, terjemahan Soeroso dan Nastangin, cetakan II (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 246-7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 248-9.

Dalam konteks Indonesia, tesis tersebut semakin mendapatkan pembenarannya dan menjadikannya tidak terbantahkan. Berbagai upaya telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Tak kurang campur tangan pemerintah dalam masalah ini; dimulai dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota Madya.<sup>15</sup> Kemudian pada tahun 1991 terbentuklah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 dan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang Pembinaan BAZIS. Dan pada akhirnya pada tahun 1999 lahir UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UUPZ yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang hal yang sama.

Ada beberapa alasan mengapa zakat tidak bisa menjadi penopang pembangunan umat Islam. *Pertama*, kurangnya pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu sendiri terutama bila dibandingkan dengan pengertian mereka mengenai shalat dan puasa. *Kedua*, masih melekatnya pengertian atau pemahaman umat Islam terhadap konsepsi fiqih zakat yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih klasik, yang rumusannya banyak yang tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian. *Ketiga*, adanya kekhawatiran dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang selama ini memungut zakat terhadap BAZIS sebagai lembaga

---

<sup>15</sup> M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, cetakan I (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 254.

atau amil baru. *Keempat*, masih adanya pandangan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menghubungkan ibadah zakat dengan Piagam Jakarta. *Kelima*, adanya sikap masyarakat yang kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat, terutama ditujukan kepada orang atau kelompok yang mengurus zakat. Dan *keenam*, masih terdapatnya kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan yang menyerahkan zakatnya tidak pada delapan kelompok yang berhak menerima, tetapi kepada para pemimpin agama setempat yang tidak bertindak sebagai amil tetapi sebagai mustahiq sendiri dalam kategori *sabilillah*.<sup>16</sup>

Fenomena kesenjangan antara cita dan fakta dalam pelaksanaan zakat tersebut terjadi hampir merata di seluruh wilayah, tak terkecuali kabupaten Kendal. Penulis perlu menyebut kabupaten Kendal secara khusus karena beberapa alasan antara lain : Pertama, penulis berasal dari Kendal. Seiring dengan semangat otonomi, dalam diri penulis muncul semacam “gairah” untuk berpartisipasi lebih aktif dalam membangun dan memajukan daerah ini. Kedua, Kendal merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan masyarakat dan kota santrinya. Adanya kesenjangan dalam pelaksanaan zakat menimbulkan rasa “penasaran” dan selanjutnya memunculkan minat untuk menelitinya. Ketiga, sumber penghasilan masyarakat Kendal sangat beragam, mulai dari yang klasik tradisional sebagaimana terdapat kesesuaian dengan kondisi di mana hukum Islam (baca : *Fiqh*) dirumuskan sampai pada sumber perekonomian modern yang benar-benar baru.

---

<sup>16</sup> K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hal. 15-17.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa persoalan yang perlu pembahasan lebih lanjut. Namun dalam tesis ini penulis hanya akan memfokuskan bahasan pada dua permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi zakat digali dan diwujudkan di Kabupaten Kendal?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap upaya penggalian potensi zakat di Kabupaten Kendal, baik yang menunjang maupun yang menghambat?
3. Bagaimanakah potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan penggalian potensi zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat yang ada di kabupaten Kendal;
2. Menjelaskan faktor-faktor penunjang dan penghambat terhadap penggalian potensi zakat di Kabupaten Kendal;
3. Menjelaskan potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal.

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

## 1. Kontribusi Teoritis

- o Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di masa mendatang, terutama hukum Islam dalam konteks kekinian agar senantiasa relevan dengan kemajuan zaman. Peraturan perundang-undangan di bidang zakat perlu senantiasa dicermati dan selanjutnya bila perlu diperbaiki demi tercapainya tujuan dibuatnya peraturan-peraturan dimaksud.

## 2. Kontribusi Praktis

Memberikan tambahan referensi bagi para pengelola zakat di manapun dan kapanpun berada, terutama yang ada di Kabupaten Kendal. Betapapun kecilnya, penulis yakin penelitian ini nanti akan dapat membantu para pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya. Kecuali itu penelitian ini juga dapat membantu para pembuat kebijakan di Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugasnya, karena masalah zakat bersinggungan sangat erat dengan hal itu.

## E. Kerangka Teori dan Pemikiran

Penentuan obyek zakat didasarkan pada petunjuk wahyu, yakni al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini al-Qur'an hanya menentukan secara umum dan garis besarnya saja, sedangkan penjelasan dan rinciannya diberikan oleh Hadits. Berikut ini lima jenis harta benda yang dikenai kewajiban zakat sebagaimana dimaksud, yaitu :



1. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang secara umum ditunjuk dalam ayat 267 surat al-Baqarah<sup>17</sup> dan detailnya dikemukakan dalam hadits riwayat al-Thabrani dan al-Hakim;<sup>18</sup>
2. Hewan ternak ditunjuk secara rinci dalam hadits Bukhari;<sup>19</sup>
3. Emas dan perak secara otentik dan global dijelaskan dalam ayat 34-35 surat al-Taubah<sup>20</sup> sedangkan secara rinci dijelaskan dalam hadits Abu Dawud;<sup>21</sup>
4. Harta benda yang diperdagangkan (*mal al-tijarah*) secara umum patokannya dijelaskan dalam ayat 267 surat al-Baqarah, sedangkan secara rinci antara lain dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud;<sup>22</sup>
5. Harta benda yang ditemukan dari perut bumi (barang tambang) kecuali secara umum ditunjuk dalam ayat 267 surat al-Baqarah, juga secara rinci

<sup>17</sup> Bunyi ayat dimaksud adalah : يا ايها الذين امنوا اتفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

<sup>18</sup> Teks selengkapnya sebagai berikut :

عن ابي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما " لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير , والحنطة , والزبيب , والتمر " .

Baca, misalnya, Al-Hafidz Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hal. 122.

<sup>19</sup> Hadits ini sangat panjang sekali dan baiklah saya kutipkan sebagian dari teksnya berikut ini :

عن انس أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين , والتي أمر الله بها رسوله , في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمسة شاة , فإذا بلغت خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ...

Baca *Ibid.*, hal. 118-119 dan Sulaiman al-Nuriy, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz II (Bairut : Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.t.), hal. 283-288.

<sup>20</sup> Berikut ini bunyi kedua ayat tersebut :

يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيبشرهم بعذاب اليم \* يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسهم فذوقوا ما كنتم تكتزون \*

<sup>21</sup> Berikut teks hadits dimaksud :

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا كانت لك مائة درهم -- وحال عليها الحول -- ففيها خمسة دراهم , وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا , وحال عليها الحول , ففيها نصف دينار ... "

Al-Hafidz., *Ibid.*, hal. 121.

<sup>22</sup> Berikut bunyi teksnya :

" . عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا " أن نخرج الصدقة من الذي نعدده للبيع *Ibid.*, hal. 124.

dikemukakan dalam hadits, antara lain hadits riwayat Bukhari dan Muslim.<sup>23</sup>

Pemikiran hukum Islam klasik-tradisional membatasi kewajiban zakat hanya pada lima jenis harta benda tersebut. Begitu pula, macam dari masing-masing jenis dimaksud dibatasi sebagaimana yang tersebut dalam teks suci. Keterpakuan tekstual, dalam hal ini, membuat para pemikir klasik membatasi hewan ternak hanya pada unta, sapi, kerbau dan kambing; dan membatasi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan hanya pada gandum, jelai, anggur dan kurma.<sup>24</sup>

Sebenarnya para pendahulu dan pemuka madzhab hukum Islam telah berpikir maju ketika mereka memperluas pengertian obyek zakat dari sekedar yang telah ditunjuk secara rinci oleh teks suci. Imam Abu Hanifah, misalnya, memasukkan kuda ke dalam kelompok ternak yang dikenai kewajiban zakat. Demikian pula sahabat Umar.<sup>25</sup> Imam Malik dan imam Syafi'i memperluas cakupan obyek zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan dan buah sampai kepada semua hasil tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok dan punya daya tahan untuk disimpan. Bahkan Abu Hanifah mengembangkannya lebih luas lagi sampai kepada semua hasil bumi, selain kayu bakar dan bambu. Namun sayang, upaya kreatif nan cerdas itu oleh orang-orang sesudah mereka tidak mendapatkan apresiasi lebih lanjut dengan lebih mengembangkannya lagi. Agaknya, budaya

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Berikut ini teksnya :  
". عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وفي الركاز الخمس

<sup>24</sup> Baca, misalnya, Abdurrahman al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Istambul Turki : Maktabah al-Haqiqah, 1986), hal. 596.

<sup>25</sup> Al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Bin Rusyid al-Qurthubi al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I (ttp. : Dar al-Fikr, t.t.), hal. 183.

keterikatan penuh pada satu madzhab hukum tertentu merupakan kuncinya. Budaya ini berakibat tidak diacuhkannya pemikiran maju dari madzhab lain. Demikian pula, tidak jarang terjadi upaya kreatif sebagaimana tersebut di atas dianggap sebagai hasil pemikiran final, sehingga tidak perlu (dan tidak boleh?) diubah dan dikoreksi lagi.

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-undang Pengelolaan Zakat atau disingkat UUZ) sudah sangat maju dalam menentukan obyek zakat. Dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa harta benda yang dikenai zakat adalah (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; dan (g) rikaz. Ini artinya, hampir semua sumber perekonomian atau komoditas menjadi obyek zakat.

Perluasan obyek zakat merupakan tuntutan logis. Betapa tidak, sumber perekonomian pada saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat, jauh berbeda dengan situasi pada saat teks-teks suci diturunkan. Demikian pula, sumber-sumber perekonomian di Millenium ketiga ini telah berkembang pesat disbanding dengan masa-masa para imam madzhab, saat dimana fiqh dirumuskan. Bila demikian halnya, bagaimana mungkin zakat akan menemukan fungsi sosial dan ekonominya bila obyeknya hanya komoditas-komoditas tertentu saja? Bagaimana mungkin zakat dapat bertindak sebagai alat khas yang diberikan oleh Islam untuk menghapuskan (*baca* : mengurangi) kemiskinan di tengah masyarakat bila sumber pendanaannya hanya itu-itu saja? Dan bagaimana mungkin zakat akan

mampu mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan tersebut disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya apabila ia hanya mencakup jenis kekayaan tertentu saja?<sup>26</sup>

Kecuali tuntutan realitas saat ini, perluasan obyek zakat juga merupakan tuntutan keadilan. Sungguh tidak adil rasanya bila komoditas pertanian berupa gabah, misalnya, yang jumlah biasanya tidak begitu melimpah dikenai zakat, sementara komoditas perkebunan yang nilainya seringkali mencapai milyaran rupiah tidak dikenai zakat. Alangkah tidak adilnya bila peternak tradisional dengan 40 ekor kambing harus berzakat, sedangkan para peternak besar dengan ayam dan ikan yang jumlahnya sangat besar dengan nilai ratusan juta bahkan lebih tidak dikenai zakat oleh karena tidak disebut dalam teks suci.

Sumber dana yang tetap dan besar melalui zakat sebagaimana diinginkan tidak akan mungkin tercapai dan atau tidak akan tepat mengenai sasaran apabila pelaksanaan zakat diserahkan kepada kemauan para wajib zakat saja. Peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi diperlukan juga, yaitu dengan adanya amilin dan imam yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan sistemnya.<sup>27</sup>

Ada beberapa akibat negatif apabila zakat diserahkan kepada kemauan para wajib zakat, antara lain :

---

<sup>26</sup> Untuk diskusi lebih lanjut tentang hal ini baca, misalnya, M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 256.

<sup>27</sup> KH. Ali Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan", *Pesantren*, No. 2, Vol. III, Tahun 1986, hal. 8.

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya, atau mempunyai sikap mental egoistis dan materialistis tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama manusia yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat;
2. Fakir miskin dan mustahiq lainnya yang tahu harga diri secara psikologis merasa lebih terhormat (tidak merasa malu, segan atau tersinggung persaananya), apabila mereka menerima zakat dari panitia/pemerintah daripada menerimanya secara langsung dari wajib zakat;
3. Distribusi zakat tidak merata kepada mustahiqin, apalagi sampai ke 8 *ashnaf* jalur yang berhak menerimanya, tidak efisien dan tidak pula efektif dan produktif, sehingga tidak tercapai tujuan/sasaran utama dari zakat.<sup>28</sup>

Secara pasti tidak ada petunjuk dalam al-Qur'an yang memerintahkan pengurusan zakat melalui lembaga amil. Demikian pula tidak ada dalil yang menentukan keharusan pelaksanaan zakat oleh muzakki secara langsung. Namun demikian, ada beberapa petunjuk dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang dapat membawa kita pada kesimpulan perlunya pengelolaan zakat melalui lembaga amil. Petunjuk-petunjuk tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya secara jelas dalam al-Qur'an lembaga amil dengan tugas mengumpulkan, memelihara dan menyalurkan zakat;<sup>29</sup>
2. Adanya perintah Allah dalam ayat 103 surat al-Taubah kepada Nabi dalam keduduakn beliau sebagai penguasa, pengelola dan amil untuk mengambil zakat dari para wajib zakat dan menyampaikannya kepada pihak yang

---

<sup>28</sup> Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II Cetakan II (Jakarta : CV Haji Masagung, 1991), hal. 224.

<sup>29</sup> Misalnya al-Taubah (9) : 60.

berhak. Arti ayat tersebut “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan sucikan mereka ... .”;<sup>30</sup>

3. Hadits Nabi dari Mu'adz bin Jabal waktu ia diutus ke Yaman menjadi wali, Nabi bersabda, “Ambillah zakat bijian dari biji-bijian, zakat kambing dari kambing, zakat sapi dari sapi dan zakat unta dari unta”. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut sisi lahir dari Hadits ini, Nabi menugaskan kepada Mu'adz untuk bertindak sebagai pengelola zakat;
4. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka”.<sup>31</sup> Dalam Hadits ini terlihat jelas kegiatan pengelolaan zakat yaitu memungut dan membagikan yang keduanya dilakukan oleh sebuah badan yang dinamakan amil.<sup>32</sup>

Fungsi amil zakat adalah sebagai penghubung antara wajib zakat dan yang berhak menerima zakat; ia berkewajiban menyampaikan harta zakat yang diterimanya itu kepada yang berhak dengan cara yang tepat dan terarah sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. Dengan telah diserahkannya zakat kepada amil, wajib zakat telah terlepas dari kewajibannya. Selanjutnya adalah tanggung jawab amil terhadap harta zakat itu.

---

<sup>30</sup> Bunyi teksnya adalah : ..... خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها

<sup>31</sup> Hadits ini cukup panjang, dan pernyataan di atas merupakan terjemahan dari sebagian teks saja, yaitu : إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم , فترد في فقرائهم

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Penerbit Angkasa Raya, 1993); hal. 196.

Harta zakat yang diserahkan oleh wajib zakat kepada amil merupakan amanah yang wajib dipegang teguh dan dipertanggung jawabkannya. Amil harus berbuat sebaik mungkin sehingga mencapai daya guna yang maksimal. Tentang kepada siapa dana zakat itu diberikan dan bagaimana cara pemberiannya terserah pada pertimbangan yang matang dari amil.<sup>33</sup>

Melakukan penarikan zakat dengan hasil yang maksimal merupakan suatu kesulitan. Akan tetapi tidak kalah sulitnya adalah melakukan pembagian atau pentasharupan dana zakat. Dalam persoalan ini, pengelola zakat dihadapkan pada ketentuan normatif yang menghendaki pemerataan pada semua mustahiq dan tuntutan realitas plus keadilan sosial yang menghendaki dana zakat diberikan pada orang atau pihak yang benar-benar membutuhkan secara ekonomis, sehingga zakat mempunyai arti sosial secara maksimal.<sup>34</sup>

Secara umum penulis setuju pada pilihan pertama, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis lebih condong pada pilihan kedua. Alternatif pertama didasarkan pada ayat 60 surat al-Taubah. Sedangkan alternatif kedua lebih mengacu pada pemahaman hadits Nabi tatkala beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal yang saat itu beliau tugaskan ke Yaman, "Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 197.

<sup>34</sup> Persoalan ini telah ada sejak dahulu ketika fiqh dirumuskan. Al-Sayyid Abi Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, misalnya, menuturkan adanya perbedaan dalam hal ini. Menurut syafi'iyah, pemerataan pada semua mustahiq adalah wajib. Sedangkan menurut selain syafi'iyah pemerataan itu tidak wajib. Karena itu boleh menyerahkan harta zakat pada satu mustahiq saja. Lebih lanjut baca Al-Sayyid Abi Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'nah al-Thalibin*, Juz II (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Thoha Putra, t.t.), hal. 187.

golongan miskin”.<sup>35</sup> Perlu dijelaskan di sini bahwa hal ini tidak berarti ada pertentangan antara dua nash tersebut. Agaknya lebih bijak bila nash kedua, yakni Hadits Mu’adz diposisikan sebagai *mukhashshish*. Artinya, Nash al-Qur’an itu bersifat umum, sedangkan nash Hadits bersifat khusus. Atau, nash Hadits hanya memberikan penekanan saja pada golongan fakir dan miskin oleh karena sasaran pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan dan kemelaatan dalam masyarakat Islam.<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis<sup>37</sup>. Pendekatan yuridis normatif terutama dipergunakan dalam mengungkapkan kaidah-kaidah normatif yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah, peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada mengenai zakat dan pelaksanaannya maupun bahan-bahan lain yang terkait, baik dari sumber-sumber yang didokumentasikan maupun informasi lisan dari narasumber yang menguasai bidang ini.

---

<sup>35</sup> Sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hal. 510. Bunyi teksnya senada dengan teks Hadits yang terdapat dalam catatan kaki nomor 31.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Dalam bahasa Soetandyo Wignyosoebroto pendekatan yang dipakai di sini sekaligus memadukan pendekatan doktrinal dan pendekatan non-doktrinal. Soetandyo Wignyosoebroto, “Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Hukum dan Metode Penelitiannya”, makalah disampaikan Pelatihan Peneliti Tenaga Edukatif IAIN Walisongo tanggal 1 Oktober s/d 27 Desember 1996, terutama hal. 5-9 dan 11-17. Atau, menurut istilah Ritzer, disebut penelitian yuridis-empiris (penelitian terpadu dengan paradigma ganda). George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Alimandan (*Penyadur*), (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hal. 174-5.



Pendekatan yuridis sosiologis sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi tentang zakat dan pelaksanaannya di wilayah Kendal, terutama yang berkaitan dengan wajib zakat, obyek zakat, cara pembayaran zakat, dan pengelolaan zakat oleh badan/lembaga pengelola.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan hukum Islam, peraturan perundangan, maupun bidang kajian lain yang terkait, yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaannya, dalam hal eksistensi dan relevansinya dalam dan dengan kehidupan masyarakat.

## 3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara, penyebaran angket dan pengamatan di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap wajib zakat, pengelola zakat dan tokoh masyarakat/kiyahi. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan melihat pada laporan-laporan pengelolaan zakat dari lembaga pengelola yang terdokumentasikan dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam badan/lembaga pengelola zakat (atau langsung saja disebut sebagai pengelola zakat), masyarakat wajib zakat dan tokoh masyarakat/kiyahi yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui *pusposive sampling*, yakni ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>38</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dipilih tiga wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Kota Kendal, Kecamatan Ngampel, dan Kecamatan Patebon. Kemudian secara bertingkat dari masing-masing kecamatan tersebut akan diambil tiga desa yang dianggap dapat menggambarkan adanya beberapa atau sebagian dari kriteria di atas.

#### 5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul sebagaimana dimaksud di atas kemudian diidentifikasi dan dikategorikan dalam suatu sistematika tertentu,

---

<sup>38</sup> Sebutan *pusposive* menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Namun sebenarnya, semua sampling pasti bertujuan, tidak hanya model *pusposive* saja. Karena itu sebutan *pusposive sampling* untuk suatu teknik sampling sebenarnya tidak tepat. Akan tetapi oleh karena tidak atau belum ada sebutan lain yang lebih jitu untuk menggambarkan teknik yang dimaksudkan, maka sebutan ini masih dipakai. Selengkapnya baca Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan X (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hal. 82-83. Juga baca, misalnya, Setya Yuwana Sudikan, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, cetakan ke 2 (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1986), hal. 34.

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif sekaligus analisis kuantitatif. Data tentang mekanisme kerja badan/lembaga pengelola zakat dijadikan satu kategori, demikian pula data tentang cara masyarakat berzakat, persepsi masyarakat wajib zakat terhadap zakat dan badan/lembaga pengelola zakat, kesadaran berzakat, dan lain-lain. Karakteristik datanya yang berbentuk kata verbal menjadikannya memerlukan olahan sejak dari menuliskan hasil observasi, wawancara atau rekaman, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya secara sistematis.<sup>39</sup> Dengan kata lain, analisis dilakukan terus menerus sejak proses pengumpulan data hingga penyajiannya. Dan tentu saja, analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori dan pemikiran seperti tersebut di atas. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penyajian**

Agar pembahasan dalam tesis ini nanti runtut sehingga mudah untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut. Dalam Bab I yang merupakan pendahuluan, seperti pada umumnya penulisan karya ilmiah, penulis perlu menjelaskan latar belakang persoalan dan kemudian menegaskan persoalan dimaksud yang jawabannya akan dicari lewat penelitian ini. Persoalannya adalah tentang upaya penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang menunjang

---

<sup>39</sup> Baca, misalnya, Noeng Muhajdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cetakan 8 (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998), hal. 29.

maupun yang menghambat. Bahasan selanjutnya adalah tentang tujuan penelitian, kontribusi, kerangka teori dan pemikiran, dan selanjutnya metode penelitian yang dipakai.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang zakat, pada Bab II penulis perlu memberikan tinjauan teoritis tentang zakat yang meliputi sub bahasan tentang pengertian zakat, kedudukannya dalam Islam dan tujuan serta fungsinya; tinjauan spesifik tentang potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat yang berisi kaitan zakat dengan keadilan sosial, zakat dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, dan pengaruh zakat terhadap investasi dan terciptanya lapangan kerja; serta zakat dalam perspektif UUPZ. Hal terakhir ini sangat perlu karena ada semangat “tertentu” yang diusung oleh produk hukum yang secara substansial syarat dengan pemikiran-pemikiran baru nan maju ini. Di sini penulis akan mengemukakan kondisi perzakatan yang diidealkan oleh UU tersebut.

Bab III merupakan penguatan hasil penelitian di lapangan tentang potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal. Selengkapya sub bahasan dalam bab ini adalah gambaran umum Kabupaten Kendal, profil badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal, penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal, dan potensi zakat sebagai pilar perekonomian di Kabupaten Kendal serta inspirasi. Di sini antara data dan analisisnya akan diletakkan secara berurutan sehingga diharapkan dapat membentuk suatu pemahaman yang utuh secara sekaligus. Sub bab inspirasi merupakan upaya kilas

balik terhadap hasil penelitian di lapangan dan selanjutnya penuangan pemikiran-pemikiran ideal terutama berkenaan dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal sekaligus sedikit kritik terhadap peraturan perundang-undangan tentang zakat di Indonesia.

Pada akhirnya dalam Bab IV atau penutup penulis akan kemukakan kesimpulan dari bahasan hasil penelitian dan kemudian diikuti oleh penyampaian rekomendasi atau saran pada berbagai pihak terkait dengan pengelolaan zakat, terutama di Kabupaten Kendal pada waktu-waktu yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN NORMATIF TENTANG ZAKAT

#### A. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih)

##### 1. Pengertian Zakat

Secara etimologi kata zakat adalah serapan dari bahasa Arab زكاة (zakah) yang merupakan bentuk *mashdar* (dasar) dari kata kerja زكى - يزكى yang dapat diartikan bersih (*thahara*), baik, berkah dan tumbuh-berkembang (*nama*).<sup>1</sup>

Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (*muzakki*) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, dan menyuburkan serta mensucikan masyarakat sekitar secara keseluruhan. Demikian itu karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin dan sekaligus bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan dan kelemahan baik secara fisik maupun mental.<sup>2</sup> Karena itu

---

<sup>1</sup> Baca misalnya Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Istambul Turki : Maktabah al-Haqiqah, 1986), hal. 590, Al-'Allamah al-Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghuzziy, *Fath al-Qarib* (Semarang : Usaha Keluarga, t.t.), hal. 22, Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terjemahan Salman Harun, dkk., cetakan 6 (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hal. 34, Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, cetakan I (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 224 dan Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan 1 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1985 dan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Khusaini, *Kifayah al-Akhyar*, juz I (Bandung : Syirkah Al-Ma'arif, t.t.), hal. 172.

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cetakan 3 (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 8-9. Dalam ungkapan yang agak lain Syaikh al-Syarbini al-Khatib mengatakan bahwa nama zakat diambil karena harta akan tumbuh dan berkembang dengan mengeluarkan sebagian

Allah berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut pengertian istilah (terminologi) ada banyak definisi zakat yang dikemukakan. Abdul Mujieb dkk., misalnya, mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syara’.<sup>4</sup>

Menurut al-Syarbini, zakat adalah nama bagi sejumlah tertentu dari harta tertentu yang harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>5</sup> Senada dengan definisi al-Syarbini, Syaikh Muhammad bin Qasim mengartikan zakat sebagai nama bagi harta tertentu yang diambil dari (jenis) harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu pula.<sup>6</sup>

Syaikh Zakaria al-Anshari, al-Sayyid Bakri al-Syatha dan syaikh Zain al-Din al-Malibari mendefinisikan zakat sebagai nama dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.<sup>7</sup>

---

(sebagai zakat)nya, karena doa orang yang menerima zakat tersebut, dan karena zakat juga memuji dan mensucikan pelakunya dari dosa, sehingga ia bersaksi kepada muzakki tersebut akan keabsahan imannya. Al-Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-Iqna' fi Hilli Alfadh Abi Suja'*, juz I (Surabaya : Maktabah wa Mathba'ah al-Hidayah, t.t.). hal. 183.

<sup>3</sup> Al-Taubah (9) : 103.

<sup>4</sup> M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, cetakan 1 (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 427.

<sup>5</sup> Al-Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Loc cit.*

<sup>6</sup> Al-'Allamah Syaikh Muhammad bin Qasim, *Loc cit.*

<sup>7</sup> Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab*, juz I (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.), hal. 102, Al-Sayyid Bakri bin al-'Arif al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'ana al-Thalibin*, juz II (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.), hal. 147, dan Syaikh Zain al-Din bin 'Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Cirebon : Syirkah Mathba'ah Indonesia, t.t.), hal. 48.

Al-Jaziri mendefinisikan zakat sebagai menyerahkan (*tamlik*) sejumlah harta tertentu pada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Arti dari definisi ini adalah bahwa mereka yang telah mempunyai harta yang mencapai satu nisab wajib memberikan pada orang-orang fakir dan para mustahik yang lain sejumlah tertentu dari harta mereka tersebut.<sup>8</sup>

Definisi-definisi itu meskipun berbeda akan tetapi satu sama lain saling melengkapi. Dengan demikian untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan komprehensif maka diambil suatu pengertian atau definisi baru tentang zakat yang merupakan hasil “kompromi” dari masing-masing definisi di atas. Pengertian atau definisi baru dimaksud adalah bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta atau badan yang harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dari definisi baru itu dapat dipahami bahwa zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat harta (*zakah al-mal*) dan zakat badan/jiwa (*zakah al-fithr*). Dari definisi itu pula dapat disebutkan beberapa unsur utama dalam zakat, yaitu besarnya zakat, jenis, batasan (*nishab*) dan syarat-syarat harta yang dizakati, dan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Semua unsur ini ada dalam zakat harta benda, dan hanya sebagian saja yang ada dalam zakat badan/jiwa.

---

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Loc cit.*



## 2. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriyah di Medinah. Namun demikian, jauh sebelum itu ketika Nabi masih berada di Mekah telah banyak ayat-ayat al-qur'an yang turun berkenaan dengan zakat. Hanya saja zakat yang termaktub dalam surat-surat yang turun di Mekah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Medinah, dimana nishab dan besarnya sudah ditetapkan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Zakat di Mekah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama kaum muslimin. Sedikit sudah memadai, tetapi bila kebutuhan menghendaki zakat itu bisa lebih banyak dan lebih banyak lagi.

Kondisi waktu itu belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena kaum muslimin sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah, tetapi cukup ditentukan sendiri oleh pemberi atau menurut kebiasaan yang berlaku.<sup>9</sup>

Berbeda dengan kondisi di Mekah dimana kaum muslimin baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama, di Medinah mereka telah menjelma menjadi suatu komunitas yang memiliki daerah, eksistensi dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Op cit.*, hal. 60-61.

tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generasilasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Hal tersebut mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman. Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Tuhan telah menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat terkena kewajiban zakat, besarnya, sasaran-sasaran zakat, dan badan yang bertanggung jawab mengatur dan mengelolanya.<sup>10</sup>

Zakat merupakan satu dari lima unsur bangunan Islam. Empat unsur yang lain adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan puasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah apabila mampu.<sup>11</sup>

Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya (*al-ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*al-mujma' 'alaih*).<sup>12</sup> Artinya, setiap orang Islam harus (dianggap) tahu bahwa zakat merupakan kewajiban asasi, sehingga

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 61-62.

<sup>11</sup> Demikian menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits tersebut Jibril mengajarkan agama kepada kaum muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah. Teks aslinya sebagai berikut :

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الْإِسْلَامُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ الرَّمْضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ سَطَعَتْ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

Hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar juga menyatakan hal serupa dengan redaksi yang berbeda. Berikut ini teks aslinya :

بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ ، وَحُجَّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

<sup>12</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cetakan 2 (Bandung : Mizan, 1994), hal. 231.

tidak ada alasan untuk tidak membayarkannya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka ia dihukumi kufur. Dan barang siapa secara sengaja mengabaikannya maka kecuali mendapatkan ancaman siksa di akhirat,<sup>13</sup> ia juga mendapatkan ancaman azab di dunia.<sup>14</sup> Bahkan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun para penolak zakat diperangi dan bila perlu dibunuh.<sup>15</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Zakat dalam Islam

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan untuk membangun suatu sistem guna mewujudkan kesejahteraan. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti Islam telah memberikan peranan penting kepada keyakinan keimanan yang

---

<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat yang artinya : Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang azab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi, rusuk dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, " Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah kekayaan yang kalian simpan itu." { Al-Taubah (9) : 34-35}; dan sebuah hadits yang artinya : Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, "saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dahulu." (Hadits Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).

<sup>14</sup> Seperti dijelaskan dalam hadits Nabi berikut ini :

ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله السنين

Artinya : Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang (Hadits Riwayat Thabrani). Baca, misalnya, Al-Hafiz al-Mundziri, *Al-Tarhib wa al-Tarhib*, jilid I (ttp. : al-Munyarwiyah, t.t.), hal. Dan Al-Hafiz Nuruddin Ali bin Abu Bakar al-Haitami, *Majma' al-Zawaid*, jilid (ttp. : t.p., t.t.), hal. 96; dan hadits Nabi :

ما خالطت الصدقة - أو قال الزكاة - مالا إلا أفسدته

Artinya : Bila harta zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa (Hadits Riwayat al-Bazzar dan Baihaqi).

<sup>15</sup> Baca, misalnya, hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar berikut ini :  
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله .

Artinya : Saya diinstruksikan untuk memerangi mereka, kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu semua, maka darah dan harta mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-hak islami lain, yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah.

mengendalikan seseorang dalam hidupnya. Demikianlah fungsi ibadah yang dikenal dengan nama zakat.<sup>16</sup>

Ibadah zakat bukan semata kewajiban agama yang harus ditunaikan tanpa *reserv* oleh umat Islam yang mempunyai harta benda melebihi kecukupan rata-rata tiap tahun. Ibadah zakat mengandung hikmah antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki (wajib zakat) dari sifat-sifat tercela, seperti kikir dan individualisme;
- b. Untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak murni halal;<sup>17</sup>
- c. Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang kaya saja demi mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan;<sup>18</sup>
- d. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>19</sup>

Secara sederhana hikmah zakat adalah pemantapan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia secara simultan.<sup>20</sup> Dari segi yang pertama maksudnya jelas, sedang dari

---

<sup>16</sup> Ali Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan," dalam *Pesantren*, Nomor 2/Vol. III/1986, hal. 8).

<sup>17</sup> Al-Taubah (9) : 103 yang artinya, "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya".

<sup>18</sup> Al-Hasyr (59) : 7 yang artinya, "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya".

<sup>19</sup> Abbas Kararah, *Al-Din wa al-Zakah* (Mesir : Syirkah Fann al-Thiba'ah, 1956), hal. 64-65 dan Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, vol. I (Kairo : Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931), hal. 174-186 sebagaimana dikutip Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, edisi II cetakan 2 (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1991), hal. 235-236; Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), hal. 277; dan M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wacana Fiqih* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 107.

<sup>20</sup> Hasbi Ash Shiddieqi, *Kuliah Ibadah : Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan Hikmah*, cetakan 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1963), hal. 67.

segi yang kedua, hikmah dan fungsi zakat adalah memberantas kefakiran dan kemiskinan serta sebagai satu unsur pembina masyarakat adil dan makmur, sejahtera material dan spiritual.<sup>21</sup>

Secara agak rinci Al-Qardawi membagi tujuan dan fungsi zakat menjadi tiga, yaitu bagi pihak wajib zakat, pihak penerima zakat, dan kepentingan masyarakat/sosial. Tujuan dan fungsi zakat bagi pihak wajib zakat antara lain mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus dan egois, melatih jiwa untuk bersyukur atas nikmat Allah, tidak berlebihan dalam mencintai harta benda dan menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama. Bagi penerima, zakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghilangkan rasa dengki dan benci kepada orang kaya, memunculkan sikap simpatik, hormat dan rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan *muzakki*. Sedang dari kaca mata sosial, zakat bernilai ekonomi dan merupakan alat perjuangan menegakkan jiwa ummat dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>22</sup>

Tujuan dan fungsi zakat baru dapat dipahami, diyakini dan diamalkan apabila dalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, al-Qur'an menggunakan kata "*shadaqah*" sebagai padanan kata zakat. Hal ini karena makna "*shadaqah*" adalah manifestasi atas pengakuan dan pembenaran

---

<sup>21</sup> Demikian menurut Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Naourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hal. 211.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Op cit.*, hal. 848-885.

yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul kesadaran untuk memberikan sebagian harta yang disayangi.<sup>23</sup>

#### 4. Beberapa Ketentuan Teknis Mengenai Zakat

Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat, baik secara normatif maupun praktis. Setidaknya ada enam poin yang akan dibahas di sini, yaitu jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai (baca : menjadi obyek) zakat, besarnya kekayaan yang menjadi obyek zakat, besarnya zakat yang dibayarkan, waktu pembayaran, badan pengelola zakat, dan pihak-pihak atau pos-pos penerima zakat. Namun, karena alasan keterkaitan beberapa poin dijadikan satu sub bahasan.

##### a. Obyek Zakat

Penentuan tentang obyek zakat didasarkan pada petunjuk wahyu, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini al-Qur'an hanya menentukan secara umum dan garis besarnya saja, sedangkan penjelasan dan rinciannya diberikan oleh Hadits.<sup>24</sup> Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadits ada lima kelompok obyek zakat, yaitu tumbuh-tumbuhan dan buah-

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdlah dan Sosial* (Jakareta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 62.

<sup>24</sup> Menurut ilmu ushul fiqih, al-Qur'an merupakan sumber hukum (Islam) yang pertama dan utama. Selanjutnya adalah Hadits, Ijma', Qiyas dan lain-lain. Fungsi Hadits kaitannya dengan al-Qur'an dalam hal ini adalah 1) menetapkan dan mengukuhkan hukum yang telah ada dalam al-Qur'an, 2) menjelaskan apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara global dan membatasi apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara umum, atau 3) menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an secara eksplisit. Baca, misalnya, Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, cetakan ke 12 (kuwait : Dar al-Qalam, 1978/1389), hal. 39-40; dan bandingkan dengan Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid I, cetakan ke 7 (Jakarta : Bulan Bintang : 1994), hal. 192-195 dan Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, cetakan ke 2 (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1995), hal. 38-39.

buahan, hewan ternak, emas dan perak, harta yang diperdagangkan, dan harta yang ditemukan dari perut bumi.<sup>25</sup>

Sampai di sini tidak ada perbedaan sama sekali di kalangan para ahli hukum Islam dari dulu hingga sekarang, terutama dari golongan Sunni, apapun madzhabnya. Yang menjadi perdebatan terus menerus dan tak kunjung usai hingga kini adalah cakupan dari tiap-tiap kelompok tersebut di atas. Dalam hal ini materi perdebatannya adalah apakah cakupan tiap-tiap kelompok tersebut sama persis sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an dan Hadits, atau perlu dikembangkan lagi?

Argumen yang dikemukakan untuk mendukung alternatif pertama adalah bahwa *nash-nash* (diktum-diktum hukum) al-Qur'an dan Hadits sudah sedemikian jelasnya, sehingga tidak ada peluang bagi jenis kekayaan lain yang tidak disebut untuk menjadi obyek zakat. Kecuali itu, zakat merupakan ibadah, sehingga di dalam pelaksanaan zakat tidak dikenal apa yang dikenal sebagai *qiyas* atau analogi hukum. Di sini ada kaidah hukum yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu dalam ibadah adalah dilarang, kecuali jika ada dalil yang memperbolehkannya.<sup>26</sup> Sehingga menurut kelompok yang pro dengan alternatif ini obyek zakat adalah onta, lembu dan kambing dari kelompok binatang ternak; emas dan perak dari kelompok barang berharga; gandum,

---

<sup>25</sup> Hampir semua kitab fiqh membuat pengelompokan seperti ini, terutama yang masuk kategori kitab klasik (baca : kitab kuning). Bahkan kitab tashawwuf seperti *Ihya' 'Ulumiddin* dan *Tanwil al-Qulub* pun memuatnya. Lihat Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, juz I (t.p. : Syirkah Nur Asia, t.t.), hal. 210-212; dan Al-Syaikh Ahmad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allam al-Ghuyub* (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hal. 218-224.

<sup>26</sup> Teks aslinya adalah : الأصل في العبادة الحظر حتى يدل الدليل على إباحته

jelai, kurma dan anggur dari kelompok tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan; barang-barang yang diperdagangkan; dan harta yang ditemukan dari perut bumi, baik dalam bentuk emas, perak maupun yang lain.

Sedangkan argumen yang dikemukakan untuk mendukung alternatif yang kedua adalah bahwa nash-nash al-Qur'an dan Hadits itu turun dalam suatu konteks tertentu yang sudah pasti tidak sama dengan konteks-konteks permasalahan yang timbul sesudahnya. Sehingga walaupun nash-nash itu telah melakukan pembatasan terhadap kekayaan yang menjadi obyek zakat, maka itu harus dipahami sebagai pembatasan yang bersifat idlafi atau temporer. Konsekwensinya adalah diakui dan diperlukannya perubahan hukum oleh karena adanya perubahan masa, tempat, situasi, motif dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Kelompok yang pro terhadap pengembangan obyek zakat pun terbelah antara mereka yang mengembangkan obyek zakat secara hati-hati dan selektif yang dalam prakteknya berjalan dengan metode *qiyas*<sup>28</sup> atau analogi hukum dan mereka yang mengembangkan dan memperluas obyek zakat secara progressif yang dalam prakteknya berjalan dengan metode

---

<sup>27</sup> Baca, misalnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid III (Beirut : Dar al-Jail, t.t.), hal. 3.

<sup>28</sup> *Qiyas* adalah mengembalikan suatu cabang pada asalnya karena adanya persamaan *illah* (motif) hukum diantara keduanya. Lebih jelasnya adalah menetapkan hukum suatu persoalan yang belum diatur dalam al-Qur'an maupun Hadits dengan hukum suatu persoalan yang telah diatur dalam kedua sumber hukum tersebut atau salah satunya karena ada persamaan motif diantara kedua persoalan tersebut. Baca, misalnya, Al-Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Waraqat*, dicetak pada bagian pinggir Asy Syaikh Ahmad Ibn Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'ala Syarh al-Waraqat* (Semarang : Usaha Keluarga, t.t.), hal. 20; Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Ra'ini, *Qurrah al-'Ain fi Syarh Waraqat Imam al-Haramain*, dicetak pada bagian pinggir al-Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali, *Lathaif al-Isyarat* (Sûrabaya : Dar al-Tsaqaf, t.t.), hal. 51-52; Hasbi Ash Shiddieqy, *Op cit.*, hal. 215; dan Wahbah al-Zuhaili, *Op cit.*, hal. 56.



*istihsan*<sup>29</sup> maupun *istishlah*<sup>30</sup> yang penuh spekulatif dengan menyuarakan keadilan bagi setiap sumber perekonomian (baca: kekayaan) yang ada di muka bumi.

Menurut kelompok yang pro pengembangan dan perluasan obyek zakat secara progressif, dan inilah pendapat yang dominan saat sekarang serta penulis pun cenderung kepadanya, obyek zakat adalah emas dan perak dari kelompok barang berharga; onta, sapi, kerbau, kuda dan kambing dari kelompok binatang ternak; segala hasil pertanian dan perkebunan, baik berupa makanan pokok maupun bukan; segala harta perniagaan baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri ataupun jasa; harta yang didapat dari profesi seperti pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris dan lain-lain; hasil tambang dan kekayaan laut; harta temuan dari dalam bumi; dan harta-harta lain seperti saham dan obligasi, undian dan kuis berhadiah, hasil penjualan properti, dan investasi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Istihsan* adalah berpindah dari ketentuan *qiyas* yang satu ke *qiyas* yang lain atau dari ketentuan umum ke ketentuan khusus berdasarkan pertimbangan rasional. Atau lebih jelasnya *istihsan* adalah suatu konsep penalaran dalam rangka penggunaan rasio secara lebih luas untuk menggali dan menemukan hukum sesuatu kejadian yang tidak ditetapkan hukumnya secara tersurat dalam al-Qur'an dan Hadits. Ja'far Baehaqi, *Corak pemikiran Hukum Islam Prof. K.H. Ali Yafie*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999, hal. 50.

<sup>30</sup> *Istishlah* adalah suatu konsep pemikiran hukum Islam yang menjadikan masalah yang sifatnya tidak terikat (*mashlahah mursalah*) menjadi suatu sumber hukum sekunder. Ja'far Baehaqi, *Ibid.*, hal. 51.

<sup>31</sup> Rosihan, *Panduan Praktis Zakat dan Cara Menghitungnya*, cetakan pertama (Semarang : Lembaga ZIS Masyarakat Peduli, 2001), hal. 20-33 dengan beberapa modifikasi. Bandingkan dengan Tabel Zakat rumusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut tabel tersebut, hanya ada empat kelompok obyek zakat mal plus zakat fitrah. Harta tambang dan rikaz tidak masuk menjadi obyek zakat, barangkali, karena keduanya merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan tidak memungkinkan dimiliki secara perorangan. Namun demikian, jumlah item-item obyek zakat yang ada dalam tabel dimaksud hampir tidak berbeda dengan item-item yang ada di atas, kecuali dalam hal pengelompokan. Ternak unggas, perikanan, dan profesi, misalnya untuk menyebutkan

b. *Nishab*, Kadar Zakat dan Waktu Pembayaran

1) Emas dan Perak

*Nishab* emas adalah 94 gram emas senilai 94 gram emas murni. Sedang *nishab* perak adalah 672 gram perak senilai 94 gram emas murni.<sup>32</sup> Kadar yang dikeluarkan sebagai zakat adalah 2,5 persen dan dibayarkan setelah berlalu satu tahun (*haul*) sejak kepemilikan mencapai satu *nishab*.

2) Hewan Ternak<sup>33</sup>

a). Kambing/biri-biri/domba

*Nishab* kambing/biri-biri/domba adalah 40 ekor dan harus dikeluarkan zakatnya setelah berlalu satu tahun sejak kepemilikan mencapai satu *nishab* dengan rincian kadar zakat sebagai berikut :

- (1). 40 s.d. 120 ekor zakatnya 1 ekor;
- (2). 121 s.d. 200 ekor zakatnya 2 ekor;
- (3). 201 s.d. 300 ekor zakatnya 3 ekor; dan
- (4). Setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya bertambah 1 ekor.

b). Sapi, kerbau dan kuda

---

sebagian, masuk ke dalam kelompok harta perusahaan/pendapatan perdagangan. Lihat Tabel Zakat Rumusan MUI Pusat sebagaimana dikutip Masfuk Zuhdi, *Op cit.*, hal. 271-272.

<sup>32</sup> Bandingkan, misalnya, dengan Ahmad Yasin bin Asymuni al-Jaruni, *Fiqh al-Zakah fi Tadqiq wa Ta'miq Ahkam Anwa' al-Zakawat wa Bayan Qadr al-Nishab bi Auzan wa Mikyal Baladina al-Indonesiyyi* (Kediri : PP. Al-Islami al-Salafi, t.t.), hal. 41.

<sup>33</sup> Di sini sengaja penulis tidak menyebutkan onta karena alasan relevansi. Artinya, tidak disebutkan onta sebagai obyek zakat dalam tesis ini karena ternak itu tidak banyak hidup di Indonesia.

*Nishab* sapi, kerbau dan kuda adalah 30 ekor dan harus dikeluarkan zakatnya setelah lewat satu tahun dengan rincian kadar zakat sebagai berikut :

- (1). 30 s.d. 39 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun;
- (2). 40 s.d. 59 ekor zakatnya 1 ekor umur 2 tahun;
- (3). 60 s.d. 69 ekor zakatnya 2 ekor umur 1 tahun;
- (4). 70 s.d. 79 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun; dan
- (5). Setiap tambahan 30 ekor kadar zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun, dan setiap tambahan 40 ekor kadar zakatnya bertambah 1 ekor umur 2 tahun.

### 3) Hasil Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian dan perkebunan adalah hasil panen dikurangi biaya-biaya. *Nishab* hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 wasaq atau senilai 1.250 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat obyek zakat ini dikeluarkan setiap panen dengan kadar 5 persen jika pengairannya susah dan memerlukan biaya , dan 10 persen jika pengairannya mudah dan atau tanpa biaya.

### 4) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai, dan piutang dikurangi hutang yang harus dibayar dan pajak. *Nishab* harta perniagaan adalah senilai 94 gram emas murni dan dibayarkan zakatnya setelah lewat satu tahun dengan kadar 2,5 persen.

#### 5) Harta Profesi

Harta profesi adalah harta hasil pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang melebihi kebutuhan hidup. Nishab harta profesi adalah senilai 94 gram emas murni dan dibayarkan zakatnya pada akhir tahun atau bisa dicicil kapanpun dengan kadar 2,5 persen.

#### 6) Hasil Tambang dan Kekayaan Laut

Hasil tambang dan kekayaan laut adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan lautan yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, mutiara, ambar, marjan, dan lain sebagainya. Zakat harta tambang dan kekayaan laut berkisar antara 2,5 sampai 20 persen, tergantung pada tingkat kesulitan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan mengolahnya<sup>34</sup>, dan dibayarkan zakatnya setiap saat setelah didapatkan. Sedangkan nishabnya sama dengan logam mulia, yakni senilai 94 gram emas murni.

#### 7) Harta Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam yang merupakan peninggalan orang-orang zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Tidak ada nishab dan haul bagi harta rikaz. Berapapun jumlah yang

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Op cit.*, hal. 417.

didapat dari harta rikaz maka harus dikeluarkan zakatnya 20 persen yang dibayarkan pada waktu itu juga.

#### 8) Harta Lain-lain

Yang dimaksud dengan harta-harta lain adalah harta-harta tertentu yang mempunyai kesamaan-kesamaan sifat dengan satu atau beberapa harta yang menjadi obyek zakat sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi tidak mungkin dimasukkan di dalamnya karena perbedaan sumber. Secara berurutan akan dibahas di sini : saham dan obligasi, hadiah kuis/undian, hasil penjualan properti, dan investasi.

##### a). Saham dan Obligasi

Pada hakikatnya baik saham maupun obligasi termasuk juga sertifikat bank merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang berpotensi untuk berkembang. Oleh karenanya harta-harta tersebut juga harus dizakati apabila telah mencapai satu nishab. Zakatnya sebesar 2,5 persen dari nilai kumulatif riil, bukan nilai nominal yang tertulis dan dibayarkan setelah lewat satu tahun.

##### b). Hadiah Kuis/Undian

Harta yang diperoleh dari kuis/undian berhadiah diidentikkan dengan harta temuan (rikaz) karena sama-sama diperoleh secara mudah. Seperti halnya harta rikaz, harta hasil kuis/undian berhadiah pun harus dizakati sebesar 20 persen waktu itu juga.

#### c). Hasil Penjualan Properti

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan properti (rumah, misalnya) dapat dikategorikan dalam dua hal. *Pertama*, penjualan rumah yang disebabkan oleh kebutuhan mendesak, termasuk penggusuran secara paksa. Di sini hasil penjualan itu lebih dahulu dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan (baca: membeli/atau membangun rumah baru). Apabila ada sisa yang mencapai nishab, maka harus dizakati sebesar 2,5 persen. *Kedua*, penjualan rumah yang tidak didasarkan pada kebutuhan (yang mendesak). Maka harta hasil penjualan tersebut harus dizakati sebesar 2,5 persen.

#### d). Investasi

Hasil yang diperoleh dari investasi barang, seperti gedung-gedung yang disewakan, pabrik-pabrik yang memproduksi, mobil angkutan, kapal terbang, kapal laut dan semua peralatan transportasi merupakan kekayaan yang harus dizakati bukan karena diperdagangkan, akan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan menjadi lapangan usaha bagi pemiliknya.

Di bawah ini adalah tabel pedoman jenis dan perhitungan modern yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sebagaimana dikutip Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam fiqh Kontemporer* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hal. 26-29. Tabel zakat ini secara substansial sama dengan tabel zakat rumusan MUI Pusat, sebagaimana dikutip Masjfuk Zuhdi, hanya saja di sana urutannya berbeda dimulai dengan tumbuh-tumbuhan, emas perak dan uang,

**Tabel : 1**  
**Jenis Harta, Nishab, Haul dan Kadar Zakatnya**

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR	KETERANGAN
A.	<b>ZAKAT HARTA</b>				
I.	<b>EMAS, PERAK DAN UANG</b>				
	1. Emas murni	94 gram emas	1 tahun	2,5 %	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya
	2. Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari emas	senilai 94 emas murni	1 tahun	2,5 %	
	3. Perak	672 gram senilai	1 tahun	2,5 %	
	4. Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari perak	672 gram perak	1 tahun	2,5 %	
	5. Logam mulia selain emas, perak, seperti platina	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	6. Batu permata seperti intan berlian	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
II.	<b>PERUSAHAAN/PENDAPATAN/PERDAGANGAN</b>				
	1. Industri, seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/tahu, batik, ukir-ukiran	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	Cara menghitungnya penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima
	2. Industri pariwisata, seperti hotel, cottage, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	3. perdagangan, seperti ekspor-impor, perdagangan dlm negeri, pertokoan, warung, depot/kios, percetakan, penerbitan	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	4. Jasa, seperti notaries, akuntan, travel biro, biro reklame, designer, salon, transportasi laut, darat dan udara	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	5. Real estate, seperti perumahan, penyewaan rumah/tanah	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	6. Pendapatan, seperti gaji, honorarium, komisi, penghasilan dokter	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	7. Usaha-usaha, perkebunan, perikanan, seperti, kebun the/karet/kopi, peternakan ayam, bebek, kelinci dan sebagainya	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	8. Uang simpanan, seperti tabanas, deposito, uang tunai	senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
III.	<b>BINATANG TERNAK</b>				
	1. Kambing, biri-biri, domba	40 – 120 ekor 121 – 200 ekor 201 – 300 ekor	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 ekor 2 ekor 3 ekor	Dan seterusnya setiap tambah 100 ekor kadar zakat-

perusahaan/pendapatan perdagangan, binatang ternak dan kemudian menyebutkan zakat fitrah.  
Lihat catatan kaki nomor 31.

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR	KETERANGAN
IV.	2. Sapi	30 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 tahun	nya tambah 1 ekor Dan seterusnya setiap tambahan 30 ekor sapi kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun
		40 ekor	1 tahun	1 ekor umur 2 tahun	
		60 ekor	1 tahun	2 ekor umur 1 tahun	
		70 ekor	1 tahun	1 ekor umur dan 1 ekor umur 2 tahun	
	3. Kerbau dan kuda	30 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 tahun	Zakat kerbau dan kuda sama dengan zakat sapi
		40 ekor	1 tahun	1 ekor umur 2 tahun	
		60 ekor	1 tahun	2 ekor umur 1 tahun	
		70 ekor	1 tahun	1 ekor umur dan 1 ekor umur 2	
	TUMBUH-TUMBUHAN				
	1. Padi	1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5 % atau 10 %	Jika airnya susah 5 %, jika airnya mudah 10 %
	2. Biji-bijian, seperti jagung, kedelai	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5 % atau 10 %	
	3. Umbi-umbian, seperti ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5 % atau 10 %	
	4. Buah-buahan, seperti kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpokat, pala, lada, pinang	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5 % atau 10 %	
	5. Tanaman hias, seperti anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5 % atau 10 %	
	6. Rumput-rumputan, seperti serai (minyak serai), bamboo, tebu	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5 % atau 10 %	
	7. Daun-daunan, seperti teh, tembakau, fanili	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap akhir Ramadhan	5 % atau 10 %	
	8. Kacang-kacangan, seperti kacang hijau, kedelai, kacang tanah	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras		5 % atau 10 %	
	9. Sayur-sayuran, seperti bawang, mentimun, kol, bit, wortel, petai, bayam, sawi, cabai	senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras		5 % atau 10 %	
B.	ZAKAT FITRAH : Beras, sagu, jagung, singkong/ gaplek	mempunyai		2,5 kg atau 3,5 liter	Dikeluarkan pada bulan Ramadhan.



NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR	KETERANGAN
		kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri			Biasanya dibayarkan dengan uang seharga barang tersebut. Dilakukan di daerah yang berlaku makanan pokoknya.

Dalam tabel di atas disebutkan jenis-jenis usaha modern yang berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian seseorang yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan boleh dibilang tidak ada satupun bidang usaha pada saat ini yang tidak dikenai zakat. Semuanya menjadi obyek zakat.

#### c. Pihak-pihak dan Pos-pos Penerima Zakat

Sasaran zakat telah ditentukan oleh Allah sebagaimana tertuang dalam kitab suci al-Qur'an. Dia telah membaginya kepada dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah zakat karena memang membutuhkannya. Tipe kedua, mereka yang mendapatkan bagian zakat karena pertimbangan jasa. Apabila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat.<sup>36</sup>

Dana zakat diperuntukkan bagi pihak-pihak atau pos-pos tertentu yang jumlahnya ada delapan, yaitu fakir, miskin, *amilin* (petugas

<sup>36</sup> H.M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, cetakan pertama (Jakarta : Nuansa Madani Publisher, 2004), hal. 98.

pemungut zakat), *mu'allafah qulubuhum* (orang yang dijinakkan hatinya), *riqab* (penebus diri dari perbudakan), *gharimin* (orang yang jatuh pailit), *ibnu sabil*, dan *sabilillah* (perjuangan dan pembangunan di jalan Allah).<sup>37</sup>

Persoalannya adalah apakah kedelapan golongan itu harus selalu ada dan harus disampaikan haknya tanpa ada yang boleh tidak kebagian, atau tidak harus selalu begitu? Menurut pendapat mayoritas ulama, demikian Hasbi, boleh dilakukan kebijaksanaan. Artinya harta zakat boleh seluruh atau sebagiannya diberikan kepada salah satu atau sebagian golongan saja menurut situasi dan kondisi. Jelasnya, berdasarkan pertimbangan mana yang lebih membutuhkan.<sup>38</sup>

Hasbi melihat zakat dari sudut hikmah dan fungsinya, yaitu memberantas kefakiran dan kemiskinan serta sebagai satu unsur pembina masyarakat adil dan makmur, sejahtera material dan spiritual. Karena itu, menurutnya, dana yang terkumpul dari zakat sebagian besarnya harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir-miskin. Untuk mencapai tujuan itu, dana zakat dapat digunakan untuk membuka kursus-kursus latihan kerja dan keterampilan bagi fakir miskin.

Kepada fakir miskin, lanjut Hasbi, sebaiknya tidak diberikan ikan tetapi pancing. Maksudnya, bagian zakat yang mereka peroleh tidak diberikan dalam wujud uang jika tidak terpaksa sekali, tetapi dalam wujud modal kerja atau saham dalam perusahaan-perusahaan yang di situ pula mereka ditampung untuk bekerja. Dengan demikian, di samping

---

<sup>37</sup> Al-Taubah (9) : 60.

<sup>38</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Op cit.*, hal. 208-209 dan Yusuf Qardhawi, *Op cit.*, hal. 667.

mendapatkan penghasilan tetap, mereka juga akan memperoleh laba tahunan dari perusahaan yang didirikan dengan modal dari dana zakat tersebut. Dengan cara ini secara berangsur-angsur jumlah fakir miskin dapat dikurangi. Masyarakat sejahtera yang diidam-idamkan pun akan dapat terwujud.<sup>39</sup>

Para ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana diketahui, bahwa yang wajib zakat adalah orang yang kaya/mampu saja. Kriteria kaya menurut Islam adalah orang mempunyai harta benda yang telah mencapai nishabnya (lebih kurang senilai 94 gram emas murni), sedangkan ia telah mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, berupa sandang, pangan, papan, alat kerja, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan.<sup>40</sup>

Baik dana zakat yang diserahkan kepada perorangan yang dapat dimiliki secara pribadi maupun untuk kepentingan umum yang tidak dimiliki secara pribadi, dapat diberikan dalam bentuk barang jadi yang langsung dimanfaatkan secara konsumtif; dan dapat pula diberikan tidak secara langsung dalam bentuk barang jadi dengan arti lebih dahulu dikembangkan melalui suatu usaha investasi. Masing-masing

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 211. Bandingkan dengan A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 141-142; dan Zuhdi, *Op cit.*, hal. 242. Zuhdi memerinci pemanfaatan hasil zakat untuk keperluan-keperluan konsumtif, keperluan-keperluan yang bersifat produktif dan untuk mendirikan pabrik-pabrik dan proyek-proyek yang profitable dan hasilnya untuk pos-pos mustahiqqin yang membutuhkan.

<sup>40</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, volume I (Libanon : Darul Fikar, 1981), hal. 397 sebagaimana dikutip Masjfuk Zuhdi, *Op cit.*, hal. 239.

kemungkinan mengandung nilai maslahat atau positif dan nilai mafsadat atau negatif.

Penggunaan secara produktif dalam keadaan tertentu tidak mendatangkan maslahat bahkan mungkin menemukan mafsadat karena dalam usaha investasi tersebut terkandung suatu resiko yang dapat merugikan kepada dana zakat yang telah ada. Namun pada saat yang lain usaha itu dapat mendatangkan nilai tambah yang menguntungkan bagi kepentingan zakat. Penggunaan secara konsumtif dari satu segi lebih aman terhadap dana zakat karena bebas dari resiko merugi; tetapi tindakan ini dalam keadaan tertentu tidak bersifat mendidik sehingga yang miskin akan tetap saja miskin.<sup>41</sup>

#### d. Pengelolaan Zakat

Secara pasti tidak terdapat dalam al-Qur'an petunjuk yang memerintahkan pengerusan atau pengelolaan zakat melalui lembaga amil. Demikian pula tidak ada dalil yang menentukan keharusan pelaksanaan zakat oleh muzakki sendiri secara langsung.<sup>42</sup> Meskipun demikian ada beberapa petunjuk dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang dapat membawa kita kepada kesimpulan pengorganisasian urusan zakat melalui lembaga amil. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dituju dengan syari'at zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Petunjuk-petunjuk tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1993), hal. 195.

<sup>42</sup> Bandingkan dengan Yusuf Qardhawi, *Op Cit.*, hal. 733-741.

- 1). Adanya secara jelas dalam al-Qur'an lembaga amil dengan tugas mengumpulkan, memelihara dan menyalurkan zakat;
- 2). Adanya perintah Allah kepada Nabi dalam kedudukan beliau sebagai penguasa, pengelola dan amil untuk mengambil zakat dari pihak wajib zakat dan menyampaikannya kepada para pihak yang berhak;
- 3). Hadits Nabi dari Muaz bin Jabal waktu ia diutus ke Yaman menjadi wali, Nabi bersabda : "Ambillah zakat bijian dari biji-bijian, zakat kambing dari kambing, zakat sapi dari sapi dan zakat unta dari unta". Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini menurut zahirnya Nabi menugaskan kepada Muaz untuk bertindak sebagai pengelola zakat;
- 4). Hadits Nabi dari Muaz menurut riwayat jamaah, sabda Nabi : "Sesungguhnya Allah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat), dipungut dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin. Dalam Hadits ini terlihat kegiatan pengelola zakat yaitu memungut dan membagikan, keduanya dilakukan oleh sebuah badan yang dinamakan amil.<sup>43</sup>

Sumber dana yang tetap dan besar melalui zakat sebagaimana diinginkan tidak akan mungkin tercapai dan atau tidak akan tepat mengenai sasaran apabila pelaksanaan zakat diserahkan kepada kemauan para wajib zakat saja. Peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid.*, hal. 196.

dan mengayomi diperlukan juga, yaitu dengan adanya amilin dan imam yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan sistemnya.<sup>44</sup>

Apabila zakat diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa campur tangan pemerintah, maka bisa timbul hal-hal yang negatif antara lain sebagai berikut :

- 1). Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya, atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan, atau egoistis yang berlebihan pula tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat;
- 2). Fakir miskin dan mustahiq lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat dalam artian tidak merasa malu, segan, atau tersinggung perasaannya, apabila mereka menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari wajib zakat;
- 3). Distribusi zakat tidak merata kepada mustahiqqin, tidak efisien dan tidak pula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama dari zakat;
- 4). Zakat merupakan sumber dana yang tetap yang sangat potensial yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan masyarakat dan negara, baik dalam bidang materiil maupun dalam bidang spiritual. Dan sumber dana yang besar dan tetap melalui zakat ini tidak akan

---

<sup>44</sup> KH. Ali Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan", *Pesantren*, No. 2, Vol. III, Tahun 1986, hal. 8.

terkumpul, apabila pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat saja.<sup>45</sup>

Menurut Hasbi, semua fuqaha sepakat bahwa pada asalnya tugas pengelolaan zakat dilaksanakan oleh sebuah instansi yang dibentuk pemerintah. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M) berhubung jumlah wajib pajak sudah bertambah banyak, sedangkan aparat pemerintah tidak mampu mengimbangnya, maka Utsman mengambil kebijaksanaan bahwa yang diurus oleh pemerintah hanyalah zakat ternak dan hasil bumi atau biasa disebut harta lahir. Sedangkan harta batin (selain ternak dan hasil bumi) diserahkan kebijaksanaan penyerahannya kepada wajib zakat sendiri-sendiri sesuai dengan petunjuk agama.

Tindakan Utsman tidak mengurus harta batin hanyalah satu kebijaksanaan karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Oleh karenanya tindakan itu tidak boleh dijadikan sebagai satu pegangan. Sebab, kebijaksanaan ini tidak sama dengan perbuatan Nabi dan khalifah-khalifah sebelum Utsman. Untuk itu, para fuqaha berpendapat, jika penduduk suatu negeri tidak mau menunaikan zakat harta batin mereka, pemerintah wajib turun tangan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Masjfuk Zuhdi, *Op cit.*, hal. 251.

<sup>46</sup> Nourouzzaman Shidiqi, *Op cit.*, hal. 206-207 dan bandingkan dengan Muhammad, *Op cit.*, hal. 36.

## B. Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,<sup>47</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat maupun dari sisi ekonomis. Dari sisi ajaran Islam, zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan mensyukuri nikmatNya. Dari sisi pembangunan kesejahteraan sosial, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (baca: keadilan sosial), suatu jaminan sosial, salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana kehidupan, dan sekaligus pilar amal bersama antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.<sup>48</sup> Sedangkan dari sisi ekonomi, zakat merupakan suatu instrumen untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar<sup>49</sup> dan penambah produktifitas kerja sehingga meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat.<sup>50</sup>

Dalam ungkapan yang lain M. Abdul Mannan menegaskan bahwa zakat meliputi tiga bidang; moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan oleh Islam untuk menghapuskan

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), hal. 235.

<sup>48</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), hal. 11-12.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam* (Bandung : Mizan, 1987); dan *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), sebagaimana dikutip Muhammad, *Op cit.*, hal. 20.



kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab yang mereka miliki. Sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya.<sup>51</sup>

#### 1. Zakat dan Keadilan Sosial (Distribusi Pendapatan)

Di dalam Islam sebagai ajaran ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan; shalat dan zakat. Dua perintah itu dalam banyak ayat al-Qur'an memperlihatkan dirinya sebagai induk dari seluruh "jalan" keislaman itu sendiri. Dalam Hadits Nabi saw. Kedua perintah itu diletakkan sebagai rukun Islam segera setelah pengakuan terhadap keesaan Allah. Baru setelah itu rukun-rukun yang lain; puasa dan haji.<sup>52</sup>

Penggandengan kedua perintah tadi mengandung makna yang sangat dalam. Perintah shalat dimaksudkan untuk menegakkan keislaman jati diri manusia pada dimensi spiritualnya yang bersifat personal. Sedang perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi kesadaran etis dan moralitasnya yang terkait dengan realitas sosial. Yang pertama merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai obyek pencarian personal yang subyektif dan transenden, sementara yang kedua merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai cita pencarian sosial yang obyektif dan immanent.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 256.

<sup>52</sup> Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk lebih detailnya lihat catatan kaki nomor 11 pada bab I.

<sup>53</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cetakan ketiga (Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1991), hal. 27-28.

Dan, manusia dalam keutuhannya tidak akan mengambil hanya salah satu, tetapi mesti keduanya secara integral.

Zakat dicanangkan dalam rangka mencapai keadilan sosial berdasarkan cita keruhanian.<sup>54</sup> Demikian sebagaimana dikemukakan oleh al-Qur'an, misalnya ayat yang artinya "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"<sup>55</sup>, dan ayat yang artinya "Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"<sup>56</sup>, dan Hadits Nabi, misalnya hadits yang artinya "Sesungguhnya Allah memfardhukan pada mereka zakat atas harta mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dibagikan/didistribusikan kepada orang-orang fakir"<sup>57</sup>.

Islam mensyari'atkan zakat dengan tujuan meratakan jaminan sosial (baca: menciptakan keadilan sosial).<sup>58</sup> Orang yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin sedang yang miskin makin miskin. Sebagaimana tersebut dalam Hadits di atas, zakat merupakan dana yang diapungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Jadi tujuan zakat jelas untuk mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 107.

<sup>55</sup> Al-Dzariyat (51) : 19.

<sup>56</sup> Al-Hasyr (59) : 7.

<sup>57</sup> Hadits riwayat Bukhari.

<sup>58</sup> Selain zakat ada banyak sub sistem penyediaan dana yang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial, yaitu *nafaqah*, *waqaf*, *washiyah*, *ghanimah*, *rikaz*, *nudzur*, *kafarah*, *udlhiyah*, *baitul mal*, dan *shadaqah (sunnah)*. Ali Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan", dalam *Pesantren Nomor 2/Volume III/1986* hal. 8.

sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun umat Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita.

Kekuatan suatu masyarakat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian besar yang lain dalam keadaan miskin, maka masyarakat yang demikian menjadi lemah. Harta ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau seluruh bagian tubuh, sebagian anggota badan kebanyakan terlalu banyak darah sementara sebagian yang lain mendapatkannya terlalu sedikit, maka badan akan menjadi sakit. Oleh karena itu untuk mencegah mengalirnya harta yang terlalu banyak ke tangan orang-orang kaya, Islam telah memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk membayar zakat.<sup>59</sup>

Ajaran zakat memang tidak serta dapat diandalkan untuk membuka kunci segala persoalan ketidakadilan yang secara kasat mata semakin menjadi-jadi seiring dengan kemampuan manusia untuk mengeksploitasi anugerah alam. Dimulai dari ketidakadilan di bidang sosial ekonomi, selanjutnya menjalar pada bidang-bidang kehidupan yang lain; politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Namun, di antara kelima ajaran pokok Islam, ajaran zakatlah yang paling dekat dengan inti persoalan, yakni ketidakadilan.<sup>60</sup>

Akan tetapi, *adrengh* untuk mencari konsep tentang keadilan sosial dari zakat ini sepertinya sudah mendekati titik jenuh yang mematikan. Diskursus tentang zakat dinilai tidak mampu lagi memberi harapan yang memadai. Persoalannya

---

<sup>59</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cetakan II Jilid III terjemahan Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 249-250; dan Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan H. Imam Saefudin (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 126.

<sup>60</sup> Masdar, *Op cit.*, hal. 3.

bukan lantaran faktor ketidakadilan sudah mereda, tetapi karena apa yang dihasilkan oleh diskursus ini semakin tidak sepadan dengan tantangan ketidakadilan yang justru semakin tak terkendali.

Apabila kejenuhan seperti dimaksud terus terjadi, tidak mustahil, akan muncul tiga sikap di kalangan umat Islam yang sama-sama membersihkan keputusasaan. Pertama, sikap fatalis yang mengatakan bahwa dengan keunggulan apriorinya yang dijamin Tuhan, Islam melalui ajaran zakatnya pasti akan dapat mengatasi ketidakadilan itu. Tidak mungkin Tuhan memproklamirkan Islam sebagai agama paling unggul tanpa disertai pembuktian nyata atas keunggulannya.

Kedua, sikap apatis yang meyakini bahwa klaim Islam dapat memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan dalam kenyataannya tidak lebih dari sekedar mitos. Upaya mencari kaitan antara Islam dan persoalan-persoalan kemanusiaan seperti keadilan sosial yang tampak belakangan ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar olah pikir dan retorika kosong. Islam adalah Islam, suatu agama yang hanya relevan untuk kehidupan personal bagi yang mempercayainya. Sedangkan persoalan-persoalan nyata pada level sosial tetap saja merupakan daerah otonom yang ada pada kewenangan manusia dengan potensi nalarnya. Biarlah masing-masing diurus menurut tata caranya sendiri.

Ketiga, sikap dogmatis formalistis lama yang memperoleh hujjah kuat meneguhkan kembali. Sikap ini dengan penuh olok mengatakan, “sejak dulu sydah dibilang bahwa terhadap ajaran agama, tak terkecuali zakat, tugas manusia adalah menerima sebagaimana adanya dan mengamalkannya, bukan mendiskusikan atau menseminarkannya. Apa yang diperintahkan agama

sebagaimana dikonsepsikan oleh para pendahulu kita ikuti dan apa yang dilarang agama kita tinggalkan. Percaya dan jalankan, inilah prinsip manusia dalam beragama. Soal ketidakadilan itu hal lain. Semua yang terjadi di dunia ini toh atas kehendak dan takdir Tuhan juga. Apa yang Ia kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Ia kehendaki tidak terjadi. Tidak perlu satu dengan yang lain saling dihubungkan. Masing-masing mempunyai mekanismenya sendiri-sendiri”.<sup>61</sup>

Menurut Masdar, dalam rentang waktu yang demikian panjang, 12 abad atau bahkan lebih, pemikiran dan paraktek zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi cirri pokoknya yang saling mengkait. Pertama, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Sejak waktu yang sangat lama umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual yang terpisah dari konteks sosial apapun. Seperti halnya shalat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari atas; suatu kewajiban “langit” yang harus dipenuhi hanya karena ia perintah dari Dzat yang haram ditolak perintahnya.

Kedua, kelemahan segi struktur dan kelembagaan/tata laksananya. Misalnya tentang konsep zakat itu sendiri, obyek zakat (baca: harta yang harus dizakati), kadar zakat, waktu zakat, mashrafuz zakah (mustahik atau jelasnya untuk kepentingan apa dan atau siapa zakat itu harus dipergunakan), dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqh dengan pendekatannya yang legal formalistis.

---

<sup>61</sup> Masdar, *Op cit.*, hal. 4-5.

Dan ketiga, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Apabila pada zaman Nabi saw. Dan seterusnya sampai zaman khulafaurrasyidin secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaannya tidak berbeda dengan pajak. Ia berada di bawah tanggung jawab pemerintah; dipungut oleh pemerintah dan ditasharufkan pula oleh pemerintah. Maka ketika umat Islam di mana-mana jatuh ke dalam kekuasaan penjajah Barat yang kafir, tidak ada lagi umat Islam yang bersedia menunaikan zakat lewat tangan kekuasaan yang tidak pernah mereka terima itu. Dalam keadaan demikian, kekuasaan atau *imamah* de facto yang mengendalikan umat adalah “imamah swasta” yang berpusat pada tokoh-tokoh keagamaan terutama para guru sufi selaku pemandu kehidupan agama rakyat. Untuk konteks Indonesia, terutama Jawa, pemegang *imamah* de facto itu adalah para kyai atau ajengan yang membangun “kerajaan”nya di wilayah-wilayah pedesaan, dengan pesantren sebagai sentral pemerintahannya. Jika dari rakyatnya *imamah* duniawi menerima sedekah upeti yang kini disebut pajak, maka dari rakyatnya *imamah* ukhrawi menerima sedekah upeti yang disebut zakat, shadaqah, dan lain-lain.<sup>62</sup>

Gabungan yang saling berkelindan antara tiga kelemahan itu telah membuat zakat yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu “gerakan sosial” dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-kultural, teredusir hanya

---

<sup>62</sup> Kaitannya dengan kelemahan yang ketiga ini Ahmad Rofiq menyatakan bahwa sudah saatnya kaum muslimin melakukan otokritik bahwa selama ini kita belum bisa mengelola zakat sesuai dengan misi utama zakat itu sendiri. Ahmad Rofiq, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat”, dalam *Suara Merdeka*, edisi Jumat Pon, 12 Nopember 2004, hal. 1 kolom 1 dan hal. 9 kolom 1-4.

menjadi aktifitas personal yang sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang perorang.<sup>63</sup>

## 2. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Lemah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sasaran utama dari zakat adalah memecahkan problema kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis.<sup>64</sup>

Menurut para ahli ekonomi modern, baik atau buruknya suatu sistem perpajakan tergantung pada akibatnya pada masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak; suatu sistem di mana kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan.<sup>65</sup> Memang tidak semua pihak sepakat mengidentikkan zakat dengan pajak. Tetapi harus diakui bahwa ada banyak persamaan diantara keduanya. Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat sebagai sejenis pajak karena memenuhi beberapa persyaratan perpajakan, yaitu (a) pembayaran yang diwajibkan, (b) tidak ada balasan atau imbalan, dan (c) diwajibkan kepada seluruh masyarakat.<sup>66</sup>

Suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat memerlukan dua syarat pokok, yaitu perbaikan dalam produksi dan perbaikan dalam distribusi yang

---

<sup>63</sup> Lebih lanjut baca Masdar, *Op cit.*, terutama bab II dan bab III hal. 31-86.

<sup>64</sup> Muhammad, *Op cit.*, hal. 20.

<sup>65</sup> M. Abdul Mannan, *Op cit.*, hal. 268.

<sup>66</sup> Afzalur Rahman, *Op cit.*, hal. 242

dihasilkan. Perbaikan dalam produksi meliputi : (a) meningkatkan daya produksi sehingga hasil yang diperoleh oleh setiap pekerja lebih besar hanya dengan upaya yang lebih kecil, (b) perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya, dan (c) perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.

Perbaikan dalam distribusi meliputi : (a) pengurangan perbedaan dalam pendapatan pelbagai individu dan keluarga yang berlainan, yang biasa terdapat dalam kebanyakan komunitas yang beradab, dan (b) pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin.<sup>67</sup>

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang beruntung sehingga mengabaikan orang tak beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dalam analisis dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. Karena suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli selalu merintangi pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya.

---

<sup>67</sup> M. Abdul Mannan, *Loc cit.* Pemerataan pendapatan (kesejahteraan) pada sisi yang lain merupakan salah satu kriteria penilaian terhadap hasil yang dicapai oleh suatu sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, atau Islam(?). Kriteria-kriteria yang lain adalah melimpah, pertumbuhan, stabilitas, keamanan, efisiensi, kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi, perlindungan lingkungan, nilai-nilai dan lain-lain. Lebih lanjut baca Bachrawi Sanusi, *Sistem Ekonomi Suatu Pengantar* (Jakarta : Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, 2000), hal. 19-28.



Zakat merupakan musuh yang tidak kenal kompromi terhadap penimbunan dan sekaligus pembunuh kapitalisme. Sebab, zakat adalah pajak wajib bagi kalangan orang Islam yang kaya dengan tujuan untuk melenyapkan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Tidak ada salahnya orang berusaha mendapatkan uang, akan tetapi pada saat yang bersamaan Islam mengusahakan tidak adanya seorangpun umatnya tidak memperoleh kebutuhan hidup yang paling sederhana.

Hal demikian dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian dana zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang berkekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat telah memberikan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang. Dengan demikian zakat memudahkan jalannya produksi dan pada saat yang bersamaan melicinkan jalan kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Jelasnya demikian : setelah memiliki daya beli mereka akan meminta lebih banyak barang, dan para pengusaha pun akan mencoba memproduksi lebih banyak, sehingga kesempatan kerja dalam negeri akan bertambah, dan pendapatan nasional pun akan naik.<sup>68</sup>

Sebagai penjabar terhadap uraian di atas berikut ini perhitungan secara matematis potensi zakat di Indonesia yang nota bene negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data statistik, penduduk Indonesia sekarang mencapai 210 juta orang. Apabila satu keluarga dimisalkan rata-rata terdiri dari 5 orang, yaitu suami, istri dan 3 orang anak, maka ada 42 juta kepala keluarga. Kalau

---

<sup>68</sup>M. Abdul Mannan, *Op Cit.*, hal. 268-269.

diperkirakan 10 % adalah non muslim, berarti yang beragama Islam adalah 90 %  
 $\times 42 \text{ juta KK} = 37,8 \text{ juta KK}$ .

Jika penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin mencapai 50 %, maka masih ada 18,9 juta KK yang dikategorikan non miskin dan berpotensi membayar zakat. Bila satu nishab adalah 96 gram emas murni atau uang senilai Rp. 10 juta dan satu KK memiliki modal perniagaan/usaha sebesar Rp 10 juta, maka yang bersangkutan wajib mengeluarkan zakat sebesar  $2,5 \times \text{Rp } 10 \text{ juta} = \text{Rp } 250.000,-$  pertahun. Apabila memiliki modal usaha Rp 100 juta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya. Apabila dimisalkan rata-rata per KK memiliki modal usaha Rp 200 juta saja yang berarti membayar zakat sebesar  $2,5 \% \times \text{Rp } 200 \text{ juta} = \text{Rp } 5 \text{ juta}$  pertahun, maka dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya adalah  $18.900.000 \times \text{Rp } 5 \text{ juta rupiah} = \text{Rp } 94,5$  trilyun, belum termasuk zakat perkebunan dan zakat barang tambang.<sup>69</sup>

Bila dana sebanyak itu dialokasikan pada sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, maka dapat dipastikan gaji guru bisa naik sampai batas kewajaran, para orang tua murid dibebaskan dari uang sekolah sampai tingkat SMU atau bahkan sampai perguruan tinggi, mutu pendidikan akan lebih berkualitas, dan masyarakat miskin penerima zakat akan cepat berkurang secara drastis untuk selanjutnya menjadi pembayar zakat.

Demikian tadi potensi zakat di Indonesia dengan perhitungan sederhana. Hasil yang relatif sama juga diperoleh dengan perhitungan secara terperinci dan detail sebagai berikut. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia

---

<sup>69</sup> Perlu diketahui anggaran pembangunan untuk pendidikan dalam APBN 2004 hanya lebih kurang sebesar Rp 11 trilyun dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi lemah hanya sebesar 1 trilyun. H.M. Djamal Doa, *Op cit.*, hal. 31-32.

sekarang berjumlah 210 juta jiwa dengan 40 juta jiwa atau sama dengan 8 juta KK yang miskin.<sup>70</sup> Ini berarti ada 34 juta KK yang tidak miskin dan berpotensi membayar zakat. Jika diasumsikan bahwa 10 % dari penduduk Indonesia terdiri dari non muslim, maka ada 30,6 juta KK yang berpotensi membayar zakat atau dibulatkan ke bawah menjadi 30 juta KK. Dimisalkan KK yang mempunyai modal usaha dari Rp 10 juta sampai Rp 200 juta sebanyak 5 % dan KK yang mempunyai modal usaha dari Rp 210 juta sampai Rp 500 juta sebanyak 1 %, maka dana zakat yang bisa terkumpul adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini.

**Tabel : 2**  
**Asumsi Potensi Zakat di Indonesia**

No.	Jumlah KK	Modal	Jumlah Harta	Tarif Zakat	Jumlah Zakat
1	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 10 jt	Rp 15 trl	2,5 %	Rp 37,5 milyar
2	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 20 jt	Rp 30 trl	2,5 %	Rp 75 milyar
3	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 30 jt	Rp 45 trl	2,5 %	Rp 112,5 milyar
4	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 40 jt	Rp 60 trl	2,5 %	Rp 1,5 trilyun
5	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 50 jt	Rp 75 trl	2,5 %	Rp 1,875 trilyun
6	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 60 jt	Rp 90 trl	2,5 %	Rp 2,25 trilyun
7	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 70 jt	Rp 105 trl	2,5 %	Rp 2,625 trilyun
8	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 80 jt	Rp 120 trl	2,5 %	Rp 3 trilyun
9	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 90 jt	Rp 135 trl	2,5 %	Rp 3,375 trilyun
10	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 100 jt	Rp 150 trl	2,5 %	Rp 3,75 trilyun
11	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 110 jt	Rp 165 trl	2,5 %	Rp 4,125 trilyun
12	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 120 jt	Rp 180 trl	2,5 %	Rp 4,5 trilyun
13	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 130 jt	Rp 195 trl	2,5 %	Rp 4,875 trilyun
14	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 140 jt	Rp 210 trl	2,5 %	Rp 5,25 trilyun
15	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 150 jt	Rp 225 trl	2,5 %	Rp 5,625 trilyun
16	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 160 jt	Rp 240 trl	2,5 %	Rp 6,000 trilyun
17	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 170 jt	Rp 255 trl	2,5 %	Rp 6,375 trilyun

<sup>70</sup> Para akademisi, ahli statistik di BPS dan pemerintah mendefinisikan dan menganalisis "kemiskinan" sebagai individu yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966 Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, terjemahan Tim PAU Ekonomi UGM, cetakan pertama (Yogyakarta : Pusat Antar Universitas (Studi ekonomi) UGM dan PT. Tiara Wacana Yogya, 1996), hal. 276.

18	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 180 jt	Rp 270 trl	2,5 %	Rp 6,75 trilyun
19	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 190 jt	Rp 285 trl	2,5 %	Rp 7,125 trilyun
20	5 % x 30 jt = 1,5 jt	Rp 200 jt	Rp 300 trl	2,5 %	Rp 7,5 trilyun
21	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 210 jt	Rp 63 trl	2,5 %	Rp 1,57 trilyun
22	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 220 jt	Rp 66 trl	2,5 %	Rp 1,65 trilyun
23	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 230 jt	Rp 69 trl	2,5 %	Rp 1,725 trilyun
24	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 240 jt	Rp 72 trl	2,5 %	Rp 1,80 trilyun
25	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 250 jt	Rp 75 trl	2,5 %	Rp 1,875 trilyun
26	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 260 jt	Rp 78 trl	2,5 %	Rp 1,95 trilyun
27	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 300 jt	Rp 90 trl	2,5 %	Rp 2,25 trilyun
28	1 % x 30 jt = 0,3 jt	Rp 500 jt	Rp 150 trl	2,5 %	Rp 3,75 trilyun
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 93,295 trilyun</b>

Dari tabel tersebut jelas bahwa baik dihitung secara sederhana maupun dihitung secara terperinci hasilnya relatif sama. Yang demikian itu KK yang mempunyai modal usaha yang melebihi Rp 510 juta sampai dengan Rp 5 milyar belum dihitung. Demikian halnya zakat pertambangan, zakat perkebunan dan zakat profesi juga belum dihitung.<sup>71</sup>

### 3. Pengaruh Zakat terhadap Investasi dan Terciptanya Lapangan Kerja

Dari sisi yang lain secara ekonomis pula zakat mendorong perilaku berinvestasi. Semua jenis harta benda termasuk uang tunai yang tidak diinvestasikan, uang yang tersimpan, emas, perak, perhiasan dan sebagainya yang dipegang selama satu tahun penuh dikenakan zakat sebesar dua setengah persen. Kewajiban ini akan membantu meningkatkan jumlah investasi sekaligus meningkatkan kecenderungan untuk berkonsumsi.

Di samping itu, zakat menghambat umat Islam untuk memegang uang dalam bentuk tunai. Ada beberapa faktor bahwa dalam peningkatan pemilihan likuiditas akan berakibat berkurangnya pertumbuhan kekayaan. Banyak orang yang

<sup>71</sup> H.M. Djamal Doa, *Op cit.*, hal. 33-36.

mengalami kegagalan untuk mempertahankan jumlah investasi pada tingkat yang cukup tinggi untuk menjamin tingkat pengerjaan penuh disebabkan oleh asset likuiditas sebagai pilihan utama. Melalui pembayaran zakat Islam telah memberikan pengekangan yang sangat kuat dan efektif terhadap kesenangan memegang uang dalam bentuk likuid yang merupakan hambatan utama bagi kemajuan umat manusia

Pilihan terhadap tunai akan terhapus sama sekali dengan pengenalan zakat. Jika sebageian orang masih berketetapan untuk menumpuk hartanya, maka pengenalan zakat setiap tahun akan mengurangi perbendaharaan hartanya. Oleh karena itu, mereka terpaksa menginvestasikan harta mereka, cepat atau lambat. Mereka akan memilih membayar zakat dari keuntungan usaha daripada membayar zakat dari harta yang mereka tumpuk. Dengan demikian, seluruh modal cenderung mengalir melalui saluran-saluran investasi dan sedikit atau sama sekali tidak ada yang tersisa dalam bentuk tunai.<sup>72</sup>

Kecuali membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta, zakat juga memberikan dorongan untuk membelanjakan harta guna membeli barang konsumsi, baik itu dari pihak pembayar zakat maupun pihak penerima zakat. Arus modal dari dua saluran ini; investasi dan pembelanjaan, akan menciptakan kesempatan kerja bagi jutaan orang dan bersamaan dengan itu memelopori cepatnya pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara.

Tujuan ganda zakat, yaitu mendorong investasi dan mendorong pembelanjaan, merupakan manfaat yang sangat besar terhadap bidang ekonomi.

---

<sup>72</sup> Afzalur Rahman, *Op cit.*, hal. 230-231 dan 310-315; dan Muhammad, *Op cit.*, hal. 95-100.

Tersedianya dana untuk investasi mendorong perkembangan industri dan mempercepat langkah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan di dalam konsumsi yang berlebihan akan menciptakan permintaan secara efektif terhadap produk suatu industri di negara yang bersangkutan. Jelaslah bahwa meningkatnya kecenderungan untuk berkonsumsi serta meningkatnya tingkat investasi baru sangat dibutuhkan untuk memenuhi lapangan pekerjaan dan demikian pula terhadap kemajuan ekonomi.

Pungutan zakat merupakan sejenis obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit-penyakit masyarakat, baik bagi si miskin maupun si kaya. Zakat merupakan sebuah metode yang sangat efektif untuk meningkatkan permintaan maupun menggalakkan investasi. Zakat memberikan insentif yang sangat besar terhadap investasi maupun pembelanjaan yang sedemikian rupa sehingga kedua variable tersebut meningkat pesat hampir sejajar. Dengan demikian pembelanjaan dana zakat secara hati-hati dan bijaksana akan selalu mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi tanpa adanya was-was akan kekurangan permintaan maupun menurunnya kesempatan kerja.<sup>73</sup>

### C. Zakat dalam Perspektif UUPZ

Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di

---

<sup>73</sup> Afzalur Rahman, *Ibid.*, hal. 315-317.

negeri-negeri Muslim.<sup>74</sup> Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Pada saat ditulis oleh para pengarangnya, kitab-kitab fiqh tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negeri, meskipun dalam sejarah ada beberapa buku fiqh tertentu telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang. Kitab-kitab fiqh juga ketika ditulisnya tidak dimaksudkan untuk digunakan pada masa atau periode tertentu. Dengan tidak adanya masa laku ini maka kitab-kitab fiqh cenderung dianggap harus berlaku untuk semua masa. Kitab-kitab fiqh mengikat setiap muslim berdasarkan keimanannya. Sebab, sebagai produk ijtihad, kitab fiqh tidak dapat disamakan dengan penalaran rasional atau ilmiah semata. Ijtihad, meskipun ia merupakan upaya penalaran, tetapi lebih dari sekedar penalaran ia juga suatu interaksi antara wahyu dan rasio yang menjadikan pancaran dan bimbingan wahyu itu melekat padanya. Fatwa ulama atau mufti bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti isi/hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Seperti halnya isi kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad, fatwa mengikat setiap muslim atas dorongan imannya untuk melaksanakannya.<sup>75</sup> Berbeda dengan kitab fiqh dan fatwa, keputusan pengadilan agama bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan peraturan perundangan di negeri Muslim bersifat mengikat dan bahkan daya ikatnya lebih

---

<sup>74</sup> H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, cetakan I (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hal. 91.

<sup>75</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cetakan 2 (Bandung : Mizan, 1994), hal. 89-90 dan 118-119.

luas. Orang yang terlibat di dalam perumusannya juga tidak terbatas pada para fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya.<sup>76</sup>

Untuk konteks Indonesia produk pemikiran tentang zakat dapat kita temukan dalam semua produk pemikiran hukum Islam tersebut minus keputusan pengadilan agama.<sup>77</sup> Semua kitab fiqih, bahkan beberapa kitab non fiqih seperti tasawuf, *akhlaq* dan *mawa'idl*, membahas masalah zakat dengan intensitas yang berbeda tergantung besar kecil atau tipis tebalnya kitab-kitab dimaksud. Tak terhitung fatwa ulama dan cerdik pandai tentang zakat, baik secara formal maupun non formal dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan terakhir, persoalan zakat telah sejak lama sekitar tahun 1950-an menjadi produk perundangan di negeri ini dalam bentuknya yang meliputi surat edaran Menteri Agama, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,<sup>78</sup> dan produk perundangan lain yang secara hirarkhis berada di bawah keduanya. Baru pada tahun 1999 bersamaan dengan momentum reformasi disahkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat atau disingkat UUPZ.

---

<sup>76</sup> H.M. Atho Mudzhar, *Op cit.*, hal. 91-92.

<sup>77</sup> Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan (c) wakaf dan shadaqah. Di sini tidak dijelaskan apakah yang dimaksud shadaqah adalah shadaqah sunnah saja atau termasuk pula shadaqah wajib dalam artian zakat. Namun dalam buku ketiga kompilasi hukum Islam yang nota bene adalah hukum material yang berlaku di PA hanya berisi tentang wakaf saja. Kecuali itu penulis tidak pernah mendengar kasus zakat dibawa ke PA. Dari sini penulis sampai pada kesimpulan bahwa zakat tidak termasuk wewenang dari PA. Hal senada baca H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan pertama (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 2-7.

<sup>78</sup> K.H. Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cetakan pertama (Yogyakarta : LKPSM, 1997), hal. 119.



## 1. Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya UUPZ

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima dan memerlukannya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial untuk dipergunakan dalam memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang nantinya dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka diperlukan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada wajib zakat, mustahiq dan pengelola zakat.

Demikianlah dasar pemikiran yang melatar belakangi fakta disusun dan disahkannya UUPZ pada tahun 1999, selain faktor tuntutan masyarakat secara terus menerus dari waktu ke waktu. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>79</sup>

Sudah cukup lama penanganan masalah zakat di kalangan kaum muslimin hanya dikelola secara tradisional dan suka rela. Di zaman sebelum kemerdekaan,

---

<sup>79</sup> Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

masalah zakat sama sekali tidak menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintah kolonial menghendaki potensi ini terabaikan supaya rakyat jajahannya tetap lemah kondisi ekonominya sekaligus tetap rendah tingkat kesejahteraannya.

Setelah kemerdekaan berhasil dicapai, mulailah masalah zakat dipikirkan agak serius oleh para pemimpin bangsa. Secara berangsur-angsur pemerintah memberikan perhatian, misalnya pada tahun 1951 pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah (S.E No.A/VII/17367 Tgl 8 Desember 1951). Selanjutnya pada tahun 1964 kepada Parlemen diajukan RUU tentang pelaksanaan zakat dan RPPUU (Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan baitul mal. Pada tahun 1967 disusul RUU tentang zakat yang diajukan kepada pimpinan DPRGR melalui surat Menteri Agama No.MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Dalam surat tersebut Menteri Agama menjelaskan :

“...Mengenai Rancangan Undang-Undang Zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian pemerintah berkewajiban moral untuk meningkatkan manfaat daripada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dengan undang-undang”.

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat. Belum berlangsung lama pelaksanaan PMA tersebut, keluar anjuran Presiden dalam peringatan Isra' Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara tentang pelaksanaan zakat. Seruan dan dorongan Presiden tentang zakat kembali dikumandangkan pada sambutan shalat

Idul Fitri tanggal 21 Desember 1968. Kemudian lahir Keppres No. 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat dan diikuti oleh keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) yang itu berarti mempertegas status dan fungsi BAZIS di seluruh Indonesia.<sup>80</sup> SKB tersebut ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan teknis BAZIS.<sup>81</sup>

Tidak puas dengan kondisi perzakatan yang ada banyak pihak berharap agar SKB dua menteri tersebut ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penggalan, pengembangan dan pengelolaan zakat. Akhirnya setelah berselang satu windu apa yang dicita-citakan banyak pihak itupun terwujud dengan diundangkannya UUPZ pada tanggal 23 September 1999 ketika Prof. Dr. Eng. Bacharuddin Jusuf Habibie menduduki kursi kepresidenan menggantikan Presiden Soeharto yang turun tahta karena tuntutan reformasi setahun sebelumnya.

Sebagai peraturan pelaksanaan UUPZ, pada tahun itu juga di keluarkan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UUPZ (selanjutnya disebut KMA Lama) yang kemudian digantikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UUPZ (selanjutnya disebut KMA Baru). Selain itu sebagai pedoman teknis diterbitkan pula

---

<sup>80</sup> Ali Yafie, *Op cit.*, hal. 119-120.

<sup>81</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 87-88 sebagaimana dikutip Zaenuri, "Reformulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia" dalam *Al-Ahkam*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Volume XIV/Edisi II/Oktober 2003, hal. 48.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Kemudian karena zakat dan pajak merupakan dua potensi yang kuat maka diharapkan agar ada penataan yang menjadikan masing-masing potensi saling melengkapi. Harapan inipun tidak bertepuk tangan sebelah dengan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UUPP). Pasal 9 ayat (1) huruf g UUPP tersebut berbunyi: “untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan hukum dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

## 2. Zakat dalam Perspektif UUPZ

Secara prinsipil UUPZ mengatur tentang asas dan tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, mekanisme pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi dan ketentuan lain terutama tentang kewajiban pemerintah untuk membantu biaya operasional badan amil zakat.

UUPZ ini pada dasarnya adalah formalisasi hukum Islam (baca: fiqih) tentang zakat. Yang demikian karena seluruh materinya merupakan wilayah yang selama ini menjadi yurisdiksi hukum Islam, baik yang diakui secara eksplisit

dengan menyebutkan kalimat-kalimat “sesuai dengan tuntutan agama”,<sup>82</sup> “sesuai dengan ketentuan agama”,<sup>83</sup> dan “berdasarkan hukum agama”<sup>84</sup> maupun tidak diakui.

Nilai lebih dari UUPZ ini kaitannya dengan tujuan dan hikmah zakat pada masa sekarang adalah : *Pertama*, pilihannya terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer terutama dalam hal obyek zakat yang semangatnya adalah pengenaan (baca: perluasan obyek) zakat pada hampir semua komoditas perekonomian masa kini yang sebelumnya tidak dikenal.<sup>85</sup> *Kedua*, fokus dan perhatiannya yang besar pada masalah manajemen pengelolaan zakat yang selama ini dianggap sebagai titik sentral penyebab terpuruknya kondisi perzakatan. Konsep yang ada cukup menjanjikan dan membuat semua pihak optimis akan keberhasilannya.<sup>86</sup> *Ketiga*, pendayagunaan dana zakat yang tidak saja untuk keperluan konsumtif para mustahiq berdasarkan skala prioritas kebutuhan mereka, tetapi juga pemanfaatan untuk usaha yang produktif.<sup>87</sup> *Keempat*, pemberian sanksi yang cukup berat terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat.<sup>88</sup> *Kelima*, pemberian kewajiban kepada pemerintah untuk membantu biaya operasional badan amil zakat.<sup>89</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 5 angka 1.

<sup>83</sup> Pasal 8 dan Pasal 16 ayat (1).

<sup>84</sup> Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14.

<sup>85</sup> Pasal 11 ayat (2).

<sup>86</sup> Pasal 2 s.d. Pasal 20, dan Pasal 22 s.d. Pasal 24.

<sup>87</sup> Pasal 16 dan 17.

<sup>88</sup> Pasal 21.

<sup>89</sup> Pasal 23.

Satu kelemahan mendasar yang menjadi problem utama pengelolaan zakat hingga enam tahun terakhir sejak diundangkannya UUPZ adalah tiadanya sanksi pada wajib zakat yang tidak patuh.<sup>90</sup> Suatu sanksi sangat dibutuhkan demi terciptanya hasil seperti tercantum dalam maksud dikeluarkannya UU ini. Pentingnya sanksi ini karena bangsa ini telah dibawa oleh kolonialisme menuju kemerosotan organisasi di tingkat pedesaan tanpa menciptakan penggantinya. Tekanan untuk mengintroduksi ekonomi yang didasarkan pada uang, administrasi kolonial yang terutama ditujukan untuk mengumpulkan pajak dan mempertahankan ketenteraman dan ketertiban, menyebabkan melemahnya sistem hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang asli, bahkan di daerah-daerah tertentu menyebabkan itu semua runtuh sama sekali. Tradisi otoriter yang telah ada sebelum masa penjajahan, dengan datangnya kolonialisme malah diperkuat oleh pemerintahan kolonial itu dan dialihkan kepada paternalisme. Dalam sistem yang demikian ini rakyat menjadi terbiasa untuk diperintah, tetapi juga sedapat mungkin berusaha untuk menghindarkan diri.<sup>91</sup>

Menurut Sjechul Hadi Permono, tidak adanya sanksi bagi muzakki dalam UUPZ dikarenakan UU tersebut lahir di awal reformasi yang rakyat pada saat itu tidak percaya kepada aparat pemerintah dan jenuh terhadap hal-hal yang bersifat memaksa. Langkah pertama dan terpenting, demikian pemikiran yang berkembang pada saat itu, adalah menciptakan citra bersih dan wibawa para pengelola zakat, sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya bila masyarakat telah sadar terhadap kewajiban zakat dan memberi

---

<sup>90</sup> Didin Hafidhuddin, *Op cit.*, hal. 126.

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 231.

kepercayaan kepada pengelola, maka masih dimungkinkan adanya penambahan pasal-pasal dalam UUPZ terutama tentang sanksi terhadap muzakki yang melanggar. Pada saat itulah nanti UUPZ benar-benar mempunyai sifat memaksa kepada muzakki,<sup>92</sup> sehingga tidak lagi dikatakan sebagai “banci”.

---

<sup>92</sup> Sjechul Hadi Permono, “Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat dalam Kaitannya dengan UU No. 38 Tahun 1999,” makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah Program Pasca Sarjana IAIN Se Indonesia di Semarang, 10-11 Nopember 2001, hal. 16.

### BAB III

## POTENSI ZAKAT SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN UMAT DI KABUPATEN KENDAL: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

#### 1. Kondisi Geografis dan Topografi

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara  $109^{\circ} 40'$  –  $110^{\circ} 18'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 32'$  –  $7^{\circ} 24'$  Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal meliputi : Laut Jawa di arah utara, Kota Semarang di arah timur, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung di arah selatan, dan Kabupaten Batang di arah barat. Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari barat ke timur adalah 40 Km, sedangkan dari utara ke selatan adalah sejauh 36 Km.<sup>1</sup>

Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 19 (sembilan belas) kecamatan dengan 265 desa dan 20 kelurahan.<sup>2</sup> Sembilan belas kecamatan tersebut masing-masing adalah Plantungan (48,82 Km<sup>2</sup>/12 desa), Sukorejo (76,01 Km<sup>2</sup>/18 desa), Pageruyung (51,43 Km<sup>2</sup>/14 desa), Patean (92,94 Km<sup>2</sup>/14 desa), Singorojo (124,55 Km<sup>2</sup>/14 desa), Limbangan (71,72 Km<sup>2</sup>/16 desa), Boja (64,09 Km<sup>2</sup>/18 desa), Kaliwungu (107,69 Km<sup>2</sup>/15 desa), Brangsong (34,54 Km<sup>2</sup>/12 desa), Pegandon (31,12 Km<sup>2</sup>/12 desa), Ngampel

---

<sup>1</sup> "Letak Geografis Kabupaten Kendal", [www.kabupaten-kendal.go.id](http://www.kabupaten-kendal.go.id), edisi Rabu, 2 Pebruari 2005; dan *Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2003* (Kendal : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dan Bapeda Kabupaten Kendal, 2004), hal. 1.

<sup>2</sup> "Letak Geografis Kabupaten Kendal", [www.kabupaten-kendal.go.id](http://www.kabupaten-kendal.go.id), *Ibid*.



(33,88 Km<sup>2</sup>/12 desa), Gemuh (38,17 Km<sup>2</sup>/16 desa), Ringinarum (23,50 Km<sup>2</sup>/12 desa), Weleri (30,28 Km<sup>2</sup>/16 desa), Rowosari (32,64 Km<sup>2</sup>/16 desa), Kangkung (38,98 Km<sup>2</sup>/15 desa), Cepiring (30,08 Km<sup>2</sup>/15 desa), Patebon (44,30 Km<sup>2</sup>/18 desa), dan Kota Kendal (27,49 Km<sup>2</sup>/20 kelurahan).<sup>3</sup>

Tabel : 3  
LUAS WILAYAH KABUPATEN KENDAL  
DIRINCI MENURUT KECAMATAN  
TAHUN 2003

NO	KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1	Plantungan	48,82	4,87
2	Sukorejo	76,01	7,58
3	Pageruyung	51,43	5,13
4	Patean	92,94	9,27
5	Singorojo	124,55	12,43
6	Limbangan	71,72	7,16
7	Boja	64,09	6,39
8	Kaliwungu	107,69	10,75
9	Brangsong	34,54	3,45
10	Pegandon	31,12	3,11
11	Ngampel	33,88	3,38
12	Gemuh	38,17	3,81
13	Ringinarum	23,50	2,34
14	Weleri	30,28	3,02
15	Rowosari	32,64	3,26
16	Kangkung	38,98	3,89
17	Cepiring	30,08	3,00
18	Patebon	44,30	4,42
19	Kota Kendal	27,49	2,74
Jumlah/Total		1.002,23	100,00

<sup>3</sup> *Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2002* (Kendal : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dan Bapeda Kabupaten Kendal, 2003), hal. 3 dan 15; dan *Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2003, Op cit.*, hal. 3 dan 17.

Tabel : 4  
BANYAKNYA DESA, DUKUH, RW DAN RT  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2003

NO	KECAMATAN	DESA	DUKUH	RW	RT
1	Plantungan	12	57	60	238
2	Sukorejo	18	79	86	417
3	Pageruyung	14	68	72	246
4	Patean	14	86	88	300
5	Singorojo	14	68	97	333
6	Limbangan	16	64	71	220
7	Boja	18	93	106	418
8	Kaliwungu	15	107	122	485
9	Brangsong	12	44	66	246
10	Pegandon	12	47	57	195
11	Ngampel	12	45	61	220
12	Gemuh	16	50	74	301
13	Ringinarum	12	38	50	248
14	Weleri	16	49	93	373
15	Rowosari	16	70	82	331
16	Kangkung	15	45	60	332
17	Cepiring	15	40	52	309
18	Patebon	18	74	82	405
19	Kota Kendal	20	51	74	259
Jumlah/Total		285	1.175	1.453	5.876

Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl yang meliputi 12 kecamatan, yaitu Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong dan Kaliwungu. Sedang wilayah bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan

ketinggian 10-2.579 meter dpl yang meliputi 7 kecamatan, yaitu Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Singorojo, Boja dan Limbangan.

Kondisi topografi tersebut mempengaruhi kondisi iklim yang ada. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan Laut Jawa beriklim cenderung lebih panas dengan suhu rata-rata 27° C. sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi beriklim cenderung lebih sejuk dengan suhu rata-rata 25° C.<sup>4</sup>

## 2. Kondisi Demografis

Data terkini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kendal berjumlah 891.166 jiwa yang terdiri dari 439.666 (49,34 %) penduduk laki-laki dan 451.500 (50,66 %) penduduk perempuan. Jumlah penduduk sebanyak itu tersebar dalam 19 (sembilan belas) kecamatan dan terbesar ada di Kecamatan Kaliwungu sebanyak 89.412 jiwa atau 10,03 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Limbangan dengan 29.396 jiwa atau 3,30 persen. Rincian penduduk berikut penyebarannya sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

---

<sup>4</sup> [www.kabupaten-kendal.go.id](http://www.kabupaten-kendal.go.id), *Loc cit.*

Tabel : 5  
PENDUDUK KABUPATEN KENDAL  
DIRINCI MENURUT RUMAH TANGGA DAN JENIS KELAMIN  
TAHUN 2003

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Plantungan	7.649	15.086	15.349	30.435
2	Sukorejo	13.357	27.304	28.088	55.392
3	Pageruyung	8.376	15.903	16.510	32.413
4	Patean	12.041	23.047	23.533	46.580
5	Singorojo	11.381	23.340	23.646	46.986
6	Limbangan	7.407	14.666	14.730	29.396
7	Boja	15.101	30.843	31.978	62.821
8	Kaliwungu	22.955	43.999	45.413	89.412
9	Brangsong	10.704	22.121	22.467	44.588
10	Pegandon	8.777	17.317	18.006	35.323
11	Ngampel	8.079	16.191	17.110	33.301
12	Gemuh	12.600	23.513	24.335	47.848
13	Ringinarum	9.180	17.330	17.545	34.875
14	Weleri	14.297	27.727	28.652	56.379
15	Rowosari	13.466	24.144	24.567	48.711
16	Kangkung	11.731	23.123	23.628	46.751
17	Cepiring	12.310	23.924	24.980	48.904
18	Patebon	14.386	25.348	25.525	50.873
19	Kota Kendal	11.991	24.740	25.438	50.178
Jml/Total 2003		225.788	439.666	451.500	891.166
2002		220.277	437.822	449.464	887.286
2001		216.616	435.496	447.433	882.929

Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi, seperti Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kota Kendal. Pada kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 1.862 dan 1.825 jiwa setiap kilometer persegi. Kecamatan Singorojo dan Limbangan tercatat sebagai yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya sebesar 377 dan 410. Sedangkan tingkat kepadatan pada lima belas kecamatan yang lain berkisar antara 501 hingga 1.626.

Tabel : 6  
RATA-RATA BANYAKNYA PENDUDUK PER DESA  
DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2003

No	Kecamatan	Desa	Luas Daerah	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-rata per	
						Desa	Km <sup>2</sup>
1	Plantungan	12	48,82	7.649	30.435	2.536	623
2	Sukorejo	18	76,01	13.357	55.392	3.077	729
3	Pageruyung	14	51,43	8.376	32.413	2.315	630
4	Patean	14	92,94	12.041	46.580	3.327	501
5	Singorojo	14	124,55	11.381	46.986	3.356	377
6	Limbangan	16	71,72	7.407	29.396	1.837	410
7	Boja	18	64,09	15.101	62.821	3.490	980
8	Kaliwungu	15	107,69	22.955	89.412	5.961	830
9	Brangsong	12	34,54	10.704	44.588	3.716	1.291
10	Pegandon	12	31,12	8.777	35.323	2.944	1.135
11	Ngampel	12	33,88	8.079	33.301	2.775	983
12	Gemuh	16	38,17	12.600	47.848	2.991	1.254
13	Ringinarum	12	23,50	9.180	34.875	2.906	1.484
14	Weleri	16	30,28	14.297	56.379	3.524	1.862
15	Rowosari	16	32,64	13.466	48.711	3.044	1.492
16	Kangkung	15	38,98	11.731	46.751	3.117	1.199
17	Cepiring	15	30,08	12.310	48.904	3.260	1.626
18	Patebon	18	44,30	14.386	50.873	2.826	1.148
19	Kota Kendal	20	27,49	11.991	50.178	2.509	1.825
Jml/Total 2003		285	1.002,23	225.788	891.166	3.127	889
2002		285	1.002,23	220.277	887.286	3.113	885
2001		285	1.002,23	216.616	882.929	3.098	881

Pertumbuhan penduduk tahun 2003 sebesar 0,44 persen. Pertumbuhan penduduk terjadi di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Weleri yang pertumbuhan penduduknya justru menurun 0,40 persen. Adapun pertumbuhan penduduk tertinggi dialami oleh Kecamatan Rowosari sebesar 1,56 persen dan Kecamatan Kota Kendal sebesar 1,03 persen. Enam belas kecamatan yang lain mengalami pertumbuhan sekitar 0,10 hingga 0,74 persen.

Tabel : 7  
PERTUMBUHAN PENDUDUK  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2002-2003

N0	KECAMATAN	2002	2003	LAJU PERTUMBUHAN
1	Plantungan	30.414	30.435	0,07
2	Sukorejo	55.150	55.392	0,44
3	Pageruyung	32.193	32.413	0,68
4	Patean	46.409	46.580	0,37
5	Singorojo	46.869	46.986	0,25
6	Limbangan	29.181	29.396	0,74
7	Boja	62.593	62.821	0,36
8	Kaliwungu	89.092	89.412	0,36
9	Brangsong	44.381	44.588	0,47
10	Pegandon	35.064	35.323	0,74
11	Ngampel	33.220	33.301	0,24
12	Gemuh	47.801	47.848	0,10
13	Ringinarum	34.817	34.875	0,17
14	Weleri	56.603	56.379	-0,40
15	Rowosari	47.963	48.711	1,56
16	Kangkung	46.589	46.751	0,35
17	Cepiring	48.749	48.904	0,32
18	Patebon	50.530	50.873	0,68
19	Kota Kendal	49.668	50.178	1,03
		887.286	891.166	0,44

Dari jumlah penduduk Kabupaten Kendal sebesar 891.166 bila dikelompokkan menurut strata umur, maka kelompok umur 10 – 14 tahun menempati urutan terbanyak dengan jumlah 96.120 jiwa. Sedangkan strata 55 – 59 tahun menempati urutan tersedikit dengan jumlah 29.197 jiwa. Dan, secara keseluruhan kelompok umur usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Komposisi strata unur selengkapnya adalah sebagai berikut : 0 – 4 tahun sebesar 80.638 jiwa, 5 - 9 tahun sebesar 89.064 jiwa, 10 – 14 tahun sebesar 96.120 jiwa, 15 – 19 tahun sebesar 93.109 jiwa, 20 – 24 tahun sebesar 75.133 jiwa, 25 – 29 tahun sebesar 69.630 jiwa, 30 –34 tahun sebesar 72.149 jiwa, 35 – 39 tahun sebesar 69.549 jiwa, 40 – 44 tahun sebesar

60.325 jiwa, 45 – 49 tahun sebesar 44.856 jiwa, 50 – 54 tahun sebesar 32.736 jiwa, 55 – 59 tahun sebesar 29.197 jiwa, 60 – 64 tahun sebesar 31.016 jiwa dan strata 60 tahun ke atas sebesar 47.644 jiwa.<sup>5</sup>

### 3. Kondisi Keagamaan

Kendal beribadat (: akronim dari bersih, indah, barokah, aman, damai dan tertib) adalah semboyan dari Kabupaten Kendal. Hal ini mencerminkan bahwa aspek kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan.<sup>6</sup> Demikian pula makna religius sangat kental dalam Lambang Daerah Kabupaten Kendal antara lain (1) tulisan “Ngesti Widdhi” yang berarti suatu fatwa mutiara yang melambangkan watak bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, tekun beribadah dan beramal, (2) bamboo runcing yang beruas sembilan dengan warna kuning menjulang ke atas menuju ke arah bintang melambangkan perjuangan Wali Songo di dalam kepahlawanan dan keperwiraan mereka menyebarkan agama Islam yang sampai sekarang masih dianut oleh rakyat Kendal, dan kubah/menara mesjid yang melambangkan teguhnya kepribadian rakyat Kendal; bahwa daerah ini banyak memiliki ajaran dan kebudayaan yang memberikan andil besar dalam hal perkembangan dan pertumbuhan ajaran Islam, begitu pula perkembangan-perkembangan berikutnya dengan adanya banyak pondok pesantren.<sup>7</sup>

Data tentang tingkat dan kondisi keberagaman masyarakat Kendal secara empiris belum dijumpai. Dengan demikian parameter-parameter untuk mengukurnya secara lebih mendekati pun belum ditetapkan atau dipakai. Memang

---

<sup>5</sup> Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2003, *Op cit.*, hal. 56-89.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 92.

<sup>7</sup> “Lambang Kendal”, [www.kabupaten-kendal.go.id](http://www.kabupaten-kendal.go.id), *Loc cit.*

mengukur tingkat keberagamaan masyarakat suatu daerah dihadapkan pada kesulitan penetapan parameter yang tepat dikarenakan tingginya tingkat karakter individualitas agama-agama yang ada, terutama Islam sebagai agama yang dominan di Kendal.

Parameter-parameter yang umumnya dipakai untuk mengukur tingkat keberagamaan suatu masyarakat muslim dan juga kategori sosial lainnya antara lain adalah jumlah tempat ibadah yang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan demikian diasumsikan bahwa semakin banyak jumlah tempat ibadah di suatu tempat maka semakin tinggi tingkat keberagamaan masyarakat itu. Atau dengan kata lain jumlah tempat ibadah berbanding terbalik dengan jumlah umat pemakai tempat ibadah itu.<sup>8</sup> Kecuali tempat ibadah parameter yang lain adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, jumlah umat yang menunaikan ibadah keagamaan tertentu seperti haji, dan jumlah pemeluk yang menekuni bidang keilmuan dan profesi keagamaan seperti santri, ulama, mubaligh dan khotib.<sup>9</sup>

Dari segi pemeluk agama Islam di Kendal menempati posisi yang sangat dominan dengan jumlah umat sebanyak 880.316 jiwa (98,8 %) disusul kemudian secara berurutan agama Katolik dengan 4.350 pemeluk, Kristen dengan 4.083 pemeluk, Hindu dengan 509 pemeluk dan Budha dengan 339 pemeluk. Data selengkapnya mengenai jumlah pemeluk agama di Kendal sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

---

<sup>8</sup> H.M. Muchojjar HS. dkk., *Kecenderungan Akulturasi Praktek-Praktek Ibadah Kaum Nahdliyin dan Muhammadiyah Di Semarang*, laporan penelitian kelompok yang dibiayai dari Proyek IAIN Tahun Anggaran 1994/1995, hal. 44-45.

<sup>9</sup> Untuk konteks Kabupaten Kendal data-data empiris mengenai hal-hal tersebut ada dalam *Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2003*, *Op cit.*, hal. 155-164.



Tabel : 8  
BANYAKNYA PEMELUK AGAMA DIRINCI MENURUT KECAMATAN  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2003

NO	KECAMATAN	ISLAM	KATHOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA
1	Plantungan	30.251	133	75	10	0
2	Sukorejo	54.723	313	241	50	10
3	Pageruyung	31.889	390	23	4	75
4	Patean	46.099	273	86	75	46
5	Singorojo	46.195	161	473	156	1
6	Limbangan	28.888	115	274	0	116
7	Boja	61.492	489	817	10	14
8	Kaliwungu	88.510	434	394	39	27
9	Brangsong	44.444	27	114	0	0
10	Pegandon	35.174	78	39	0	0
11	Ngampel	33.283	41	9	1	0
12	Gemuh	47.693	107	47	0	1
13	Ringinarum	34.798	7	70	0	0
14	Weleri	54.791	882	615	72	19
15	Rowosari	48.613	88	8	0	0
16	Kangkung	46.730	2	1	0	0
17	Cepiring	48.640	155	120	0	12
18	Patebon	49.669	315	240	48	0
19	Kota Kendal	48.454	340	437	44	18
	Jml/Total 2003	880.316	4.350	4.083	509	339
	2002	877.641	4.116	4.184	554	301
	2001	874.017	4.231	3.965	601	115

Dari segi tempat ibadah, agama Islam di Kabupaten Kendal juga sangat mendominasi seiring dengan jumlah umatnya. Tercatat ada 3.961 tempat ibadah bagi umat Islam yang terdiri dari 805 mesjid, 2.979 langgar dan 177 mushalla. Tempat ibadah bagi umat beragama lain tercatat 53 gereja dan 6 pura/vihara. Jika diperbandingkan dengan jumlah umat Islam yang ada di Kabupaten, maka rata-rata setiap 222 orang Islam mempunyai satu tempat ibadah. Dari data yang ada dapat diambil suatu pemahaman bahwa ada kepedulian masyarakat terhadap

kebutuhan pembangunan dan penambahan sarana-sarana ibadah. Berikut ini tabel yang menunjukkan angka-angka di atas.

Tabel : 9  
BANYAKNYA TEMPAT IBADAH  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2003

NO	KECAMATAN	ISLAM	KATHOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA
1	Plantungan	44	195	6	2	0
2	Sukorejo	81	245	12	4	0
3	Pageruyung	54	157	9	4	0
4	Patean	72	136	6	9	4
5	Singorojo	58	115	3	4	0
6	Limbangan	64	121	20	5	1
7	Boja	99	184	29	10	0
8	Kaliwungu	42	268	18	1	1
9	Brangsong	24	184	5	0	0
10	Pegandon	19	124	11	0	0
11	Ngampel	16	123	5	0	0
12	Gemuh	29	149	6	0	0
13	Ringinarum	25	125	3	0	0
14	Weleri	34	133	6	6	0
15	Rowosari	31	125	1	0	0
16	Kangkung	35	151	4	0	0
17	Cepiring	26	118	3	0	0
18	Patebon	29	161	12	3	0
19	Kota Kendal	23	165	18	5	0
	Jml/Total 2003	805	2.979	177	53	6
	2002	777	1.947	152	53	8
	2001	778	2.940	163	56	6

Setiap tahun rata-rata ada dua kloter atau sekitar 700 – 800 jamaah haji Kabupaten Kendal atau 0,08 % – 0,09 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kendal. Fenomena ini bisa diartikan bahwa tingkat perekonomian penduduk Kendal cukup di satu sisi dan tingkat keberagaman umat Islam yang cukup tinggi di sisi yang lain.

Sejalan dengan tempat peribadatan dan jumlah jamaah haji, jumlah sarana dan prasarana pendidikan keagamaan maupun jumlah umat yang menekuni keilmuan dan profesi keagamaan pun cukup tinggi. Hal demikian bisa dilihat dari data tentang jumlah pondok pesantren yang berjumlah 129 buah dengan 2.093 pengajar/ustadz dan 13.388 orang santri. Data ini tidak termasuk jumlah madrasah diniyah, taman pendidikan al-Qur'an, dan majlis taklim beserta santri/murid dan para ustdznya. Sedangkan data tentang ulama, mubaligh dan khotib, maka pada tahun 2003 tercatat sebagai berikut : ulama 1.900 orang, mubaligh 554 orang dan khotib 3.169 orang.

Dari ratusan ribu umat Islam yang ada di Kendal, secara global mereka dapat dikelompokkan menjadi pengikut dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Berapa jumlah warga NU dan berapa jumlah warga Muhammadiyah, sampai saat ini belum pernah diadakan perhitungan baik oleh kedua organisasi massa tersebut maupun oleh lembaga lain. Pencatatan yang dilanjutkan dengan pemberian kartu anggota memang pernah dilakukan. Tetapi pemberian kartu ini didahului dengan pendaftaran atas dasar inisiatif dari pendaftar sendiri. Dengan demikian, bagi warga yang pasif dan tidak mendaftarkan diri tidak akan mempunyai kartu dan sekaligus tidak akan tercatat sebagai anggota. Padahal warga/anggota pasif yang demikian itu, terutama dalam ormas NU, justru yang terbanyak dibandingkan dengan anggota aktif.

Dalam hal ini, agakanya, perkiraan dapat dilakukan dengan menghitung jumlah pondok pesantren yang merupakan basis NU, banyaknya kegiatan yang membawa bendera kedua ormas tersebut, dan dari ada tidaknya kepengurusan

kedua ormas itu dalam suatu daerah/wilayah tertentu. Bila itupun tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, maka pendataan bisa dilakukan dengan sensus *door to door* melalui penyebaran angket atau pertanyaan tentang beberapa ritual keagamaan yang antara kedua ormas tersebut mempunyai perbedaan. Ritual-ritual dimaksud adalah (a) kegiatan tahlil, (b) qunut subuh, (c) azan dua kali dalam Jum'at, (d) selamatn sehabis kematian, (e) tawassul dalam berdoa, (f) praktek talqin, (g) mengeraskan basmalah dalam membaca Fatihah dalam shalat, dan (h) shalat tarawih, 20 atau 8 rakaat.<sup>10</sup>

#### 4. Kondisi Perekonomian

Kabupaten Kendal boleh dibilang memiliki semua yang dibutuhkan bagi suatu daerah dan rakyatnya untuk menjadi kaya, makmur dan jaya. Letak geografisnya, yaitu di jalur utama Jakarta-Surabaya yang tidak pernah sepi sepanjang 24 jam, memungkinkan apapun yang ditawarkan orang di sana untuk dilirik calon pembeli. Daerah dengan keunggulan geografis seperti itu cuma tinggal menunggu waktu saja untuk mencapai kemajuan.

Selain itu, posisi Kendal sebagai daerah penyangga (*hinterland*) bagi Kota Semarang yang juga ibukota Jateng sangat memungkinkan pada suatu saat akan mampu menampung limpahan kegiatan yang sudah jenuh atau tidak mungkin lagi dilakukan di Kota Semarang. Apalagi sejumlah elit Kota Semarang berkomitmen

---

<sup>10</sup> Harus diingat bahwa pada saat ini antara Muhammadiyah dan NU telah terjadi proses akulturasi yang berjalan secara damai dan alami, tanpa menimbulkan gejolak sosial. Di samping faktor pendidikan, faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya akulturasi adalah industrialisasi, urbanisasi, teknologi dan proses perkawinan antara keluarga anggota Nu dan Muhammadiyah. H.M. Muchojjar HS. dkk., *Op cit.*, hal. 5 dan 87-88.

untuk tidak menambah kawasan industri baru, tetapi cukup bermain di sektor perdagangan dan sektor jasa saja.<sup>11</sup>

Usaha pemerintah pusat maupun daerah untuk memulihkan perekonomian Indonesia, minimal seperti sebelum terjadi krisis yang melanda wilayah Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan berlanjut pada krisis kepercayaan, kini sedikit demi sedikit mulai dapat dirasakan hasilnya. Keadaan ini sangat menggembirakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan. Keberhasilan ini tampak terlihat dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini.

Kondisi perekonomian yang semakin stabil dan keamanan yang terjamin mempengaruhi produktivitas suatu usaha yang pada akhirnya akan membentuk kondisi perekonomian yang semakin membaik pula. Keadaan yang demikian sangat berpengaruh terhadap angka produk domestik regional bruto (PDRB), terutama di Kabupaten Kendal.

---

<sup>11</sup> "Kendal Bertekad Jadi Daerah Kaya", *Suara Merdeka*, Edisi Selasa, 7 Juni 2005, hal. 10.

Tabel : 10  
PDRB DAN PDRB PER KAPITA  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 1993-2003

TAHUN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU		ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993	
	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB PER KAPITA (Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB PER KAPITA (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1993	1.308.848,47	1.615.589,05	1.308.848,47	1.615.589,05
1994	1.474.693,66	1.807.244,77	1.390.947,55	1.704.613,48
1995	1.705.502,56	2.075.858,56	1.477.758,47	1.798.659,02
1996	1.978.990,53	2.340.817,75	1.572.394,36	1.859.881,88
1997	2.348.479,14	2.749.054,93	1.640.379,24	1.920.175,73
1998	3.348.771,81	3.903.147,57	1.487.811,38	1.734.112,59
1999	3.448.591,00	3.990.210,16	1.517.220,96	1.755.508,41
2000	3.778.520,28	4.318.466,82	1.550.774,70	1.772.378,76
2001	4.286.260,70	4.865.084,08	1.592.755,76	1.807.844,00
2002*)	4.907.854,81	5.541.015,57	1.629.913,63	1.840.188,26
2003**)	5.522.226,77	6.196.630,90	1.664.885,50	1.868.210,30

Catatan : \*) angka diperbaiki

\*\*) angka sementara

Membaiknya kondisi perekonomian sebagaimana tergambar dalam tabel di atas ditunjukkan oleh hasil perhitungan dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, PDRB naik dari 3.778.520,28 juta rupiah di tahun 2000 menjadi 4.286.260,70 juta rupiah di tahun 2001 dan 4.907.854,81 juta rupiah di tahun 2002, kemudian sebesar 5.522.226,77 juta rupiah pada tahun 2003. Demikian pula PDRB per kapita, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2003 sebanyak 891.166 jiwa, mencapai 6.196.630,90 rupiah. Dalam hal ini

terjadi peningkatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2002 yang mencapai 5.541.015,57 rupiah, tahun 2001 mencapai 4.865.084,08 rupiah, dan tahun 2000 mencapai 4.318.466,82 rupiah.

Perhitungan berdasarkan harga konstan tahun 1993 ternyata juga mengalami kenaikan baik PDRB maupun PDRB per kapita. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas dari angka 1.550.774,70 juta rupiah di tahun 2000 naik menjadi 1.592.755,76 juta rupiah di tahun 2001, 1.629.913,63 juta rupiah pada tahun 2002 dan 1.664.885,50 juta rupiah pada tahun 2003. Sedangkan PDRB per kapita mengalami kenaikan dari 1.772.378,76 rupiah menjadi 1.807.844,00 rupiah di tahun 2001, 1.840.188,26 rupiah tahun 2002 dan 1.868.210,30 rupiah tahun 2003.

Perlu dicatat di sini, PDRB atas harga konstan pada tahun 2003 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB atas harga konstan sebelum krisis yakni pada tahun 1997 sebesar 1.640.379,34 juta rupiah. Ini berarti bahwa secara umum produksi barang dan jasa di Kabupaten Kendal telah berada di atas hasil yang dicapai pada waktu sebelum krisis. Ini membuktikan bahwa kabupaten Kendal telah pulih dari krisis.

Kecuali itu membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten juga ditandai oleh kenaikan laju pertumbuhan ekonomi selama empat tahun berturut-turut sejak krisis tahun 1998. Dalam hal ini tercatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 sebesar 2,21 persen, tahun 2001 sebesar 2,71 persen, tahun 2002 sebesar 2,33 persen, dan tahun 2003 sebesar 2,15 persen.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Pendapatan Regional kabupaten Kendal tahun 2003*, (Kendal : BPS bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Kendal, 2004), hal. 39-42.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mengalami kenaikan, namun harus diakui bahwa tidak semua sektor pendukungnya mengalami kenaikan. Dari sembilan sektor yang membentuk PDRB, ada satu sektor yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,20 persen, yaitu sektor listrik dan air minum. Hal ini disebabkan oleh banyaknya KWh yang terjual mengalami penurunan. Delapan sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif.

Sektor pertanian - yang merupakan sektor unggulan karena mampu memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri yaitu sebesar 24,61 persen pada tahun ini pertumbuhannya sangat kecil. Yang demikian karena ada beberapa sub sektornya yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan sebesar -1,38 persen dan sub sektor tanaman perkebunan sebesar -0,47 persen. Penurunan pertumbuhan pada sub sektor tanaman bahan makanan karena penurunan jumlah produksi buah-buahan yang peranannya pada sektor ini sebesar 20 persen, terutama mangga dan durian. Sedangkan penurunan pertumbuhan pada sub sektor tanaman perkebunan karena faktor turunnya produksi tanaman perkebunan rakyat, terutama tembakau yang peranannya dalam sektor ini mencapai 70 persen.

Dari seluruh sektor yang ada, sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 10,64 persen, disusul kemudian sektor bangunan sebesar 7,33 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,21 persen. Perincian lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam dalam tabel berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 42-43.



Tabel : 11  
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI PER SEKTOR  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2003

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	PERANAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian	0,15	24,61
2	Pertambangan & Penggalian	7,21	0,42
3	Industri Pengolahan	1,58	39,76
4	Listrik, Gas & Air Minum	-5,20	1,82
5	Bangunan	7,33	2,13
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,92	16,60
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,76	2,70
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,18	2,38
9	Jasa-jasa	10,64	9,57
PDRB		2,15	100,00

#### 5. Kondisi Kesejahteraan Sosial

Meskipun secara keseluruhan kondisi perekonomian Kabupaten Kendal cukup baik, akan tetapi tidak serta merta hal itu berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan sosial. Menurut data yang ada, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ternyata cukup tinggi, yang secara global dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut : anak-anak, wanita, lansia, penyandang cacat, keluarga dan masyarakat.

PMKS kategori anak-anak terdiri dari berbagai jenis antara lain anak balita terlantar (661 jiwa), anak terlantar (6.775 jiwa), anak yang menjadi korban kekerasan (91), anak nakal (948 jiwa), anak jalanan (291), dan anak cacat (1.148 jiwa). PMKS kategori wanita terdiri dari dua jenis yaitu wanita rawan sosial

ekonomi (6.538 jiwa) dan wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah (223 jiwa). Sedangkan PMKS kategori lansia terdiri dari lansia terlantar (7.706 jiwa) dan lansia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah (11 jiwa).

Penyandang cacat meliputi penyandang cacat mental eks psikotik (247 jiwa), penyandang cacat ganda (117 jiwa), penyandang cacat bibir sumbing (53 jiwa), penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (754 jiwa), penyandang cacat bekas penderita penyakit kusta (29), tuna susila (203 jiwa), pengemis (31 jiwa), gelandangan (3 jiwa), bekas nara pidana (735 jiwa), pekerja migran bermasalah (204 jiwa), dan korban penyalahgunaan NAPZA (3 jiwa).

Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial terdiri dari keluarga fakir miskin (69.623 KK dengan 234.431 jiwa),<sup>14</sup> keluarga berumah tak layak huni (7.447 KK), keluarga bermasalah sosial psikologis (860 KK dengan 3.061 jiwa), dan keluarga rentan (1.234 KK dengan 3.959 jiwa). Masyarakat yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana (2.144 KK dengan 9.332 jiwa), masyarakat korban bencana alam (236 KK dengan 1.051 jiwa), dan masyarakat korban bencana sosial (327 KK dengan 1.255 jiwa).<sup>15</sup>

Data terbaru mengenai kesejahteraan sosial menyatakan bahwa sesuai hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh Badan Kependudukan keluarga

---

<sup>14</sup> Bandingkan dengan "Penduduk Miskin di Jawa Tengah", *Suara Merdeka*, Edisi Kamis Kliwon, 2 juni 2005, hal. 1. Sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, penduduk miskin di Jawa tengah sebesar 6.979.700 jiwa dan 201.400 jiwa diantaranya berada di Kabupaten Kendal.

<sup>15</sup> *Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kendal Tahun 2004*, Kantor Kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Kendal, hal. 4-14.

Berencana dan Catatan Sipil dari jumlah penduduk sebanyak 899.916 jiwa yang terdiri dari 444.238 laki-laki dan 455.678 perempuan dengan 244.624 KK, 67.764 KK (27,70 %) diantaranya merupakan keluarga pra sejahtera secara ekonomis. Selebihnya secara berurutan adalah sebagai berikut : keluarga pra sejahtera bukan alasan ekonomi sebesar 57.719 (23,60 %), keluarga sejahtera I alasan ekonomi sebesar 13.819 (5,64 %), keluarga sejahtera I bukan alasan ekonomi sebesar 19.767 (8,08 %), keluarga sejahtera II sebesar 28.435 (11,62 %), keluarga sejahtera III sebesar 51.700 (21,13 %), dan sisanya sebesar 5.420 (2,22 %) merupakan keluarga sejahtera III plus.<sup>16</sup> Data di atas menunjukkan bahwa secara global jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera relatif berimbang dengan perbandingan 51 berbanding 49. Tetapi harus diingat dari 49 persen keluarga sejahtera tersebut 70 persennya adalah keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus. Ini berarti keluarga di Kabupaten secara ekonomis merupakan keluarga sejahtera; persoalannya hanyalah bagaimana agar kesejahteraan itu dapat merata? Jadi yang terjadi adalah persoalan distribusi kesejahteraan tersebut.

## **B. Profil Badan/Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Kendal**

Sering orang salah persepsi terhadap istilah pengelolaan zakat. Istilah ini sering dikonotasikan sebagai pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga berbekal persepsi ini secara latah dan terburu-buru orang berpendapat UUPZ tidak memadai karena dengan demikian hanya mengatur satu hal dari dua aktifitas

---

<sup>16</sup> *Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kendal Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuppten Kendal tentang Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2004*, Buku II, hal. 448.

utama dalam bidang perzakatan. Sedangkan satu hal lagi yang lebih penting dan merupakan bagian dari keislaman yang *alma'lum bi al-dlarurah*, yakni pengumpulan zakat justru tidak diatur, demikian kata mereka. Padahal sebagaimana dinyatakan dalam UUPZ, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>17</sup> Jadi singkatnya pengelolaan zakat adalah manajemen zakat karena beberapa fungsi manajemen (untuk tidak mengatakan keseluruhannya) ada di sana yaitu *planning, organizing, staffing, motivating* dan *controlling*.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>18</sup>

Untuk mencapai tujuan yang demikian itu pengelolaan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang terdiri dari dua jenis, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ).<sup>19</sup> BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan

---

<sup>17</sup> Pasal 1 poin (1) UUPZ.

<sup>18</sup> Pasal 5 UUPZ.

<sup>19</sup> Pasal 6-9 UUPZ.

kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama.<sup>20</sup>

BAZ terdiri dari BAZ Nasional, BAZ Daerah Propinsi, BAZ Daerah Kabupaten/Kota, dan BAZ Kecamatan. BAZ Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama, BAZ Daerah Propinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, BAZ Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, dan BAZ Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>21</sup> BAZ di semua tingkatan itu memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.<sup>22</sup>

Berbeda dengan BAZ yang keberadaannya berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, LAZ hanya ada di tingkat pusat dan daerah propinsi. Kecuali itu persyaratan agar suatu LAZ dapat dikukuhkan juga mengalami perubahan sangat radikal; ialah kecuali diajukan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai organisasi Islam dan atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam, LAZ yang bersangkutan juga harus memenuhi sembilan persyaratan lain yang sangat berat diantaranya memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 propinsi untuk LAZ tingkat pusat dan minimal 40 % dari jumlah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan untuk LAZ tingkat daerah propinsi, telah mampu mengumpulkan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut KMA Baru).

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (2) UUPZ; dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Keputusan Dirjen Bimas Haji).

<sup>22</sup> Pasal 6 ayat (3) UUPZ;

dana satu milyar rupiah dalam satu tahun untuk LAZ tingkat pusat dan dana lima ratus juta rupiah untuk LAZ tingkat daerah propinsi, dan melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama/Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dan diaudit oleh akuntan publik.<sup>23</sup>

Masalah eksistensi LAZ dan aneka ragam persyaratan itulah antara lain materi esensial dari KMA Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UUPZ yang merupakan revisi dari KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang hal yang sama (selanjutnya disebut KMA lama). Menurut KMA lama, seperti halnya BAZ, LAZ ada di setiap tingkat pemerintahan dari pusat, daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Persyaratan pengukuhan hanya meliputi berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahiq, memiliki program kerja, memiliki pembukuan, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>24</sup> Terbitnya KMA baru yang mencabut KMA lama tentang pelaksanaan UUPZ berarti juga Keputusan Dirjen Bimas & Haji Nomor D/291 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Keputusan Dirjen Bimas Haji) batal demi hukum karena ia dibuat dengan mengacu pada KMA lama yang secara substansial bertentangan dengan KMA terbaru terutama masalah eksistensi dan pengukuhan LAZ.<sup>25</sup>

Agaknya, ada motif tertentu di balik perubahan regulasi tentang LAZ dan persyaratan serta prosedur pengukuhan itu, meskipun dalam pertimbangan KMA Baru ada klausul bahwa perubahan itu dilatar belakangi oleh adanya perkembangan organisasi Departemen agama Republik Indonesia. Motif itu

---

<sup>23</sup> Lebih lanjut baca Pasal 21 dan 22 KMA Baru.

<sup>24</sup> Pasal 21 dan 22 KMA Nomor 581 Tahun 1999 (yang kini sudah tidak berlaku).

<sup>25</sup> Pasal 10 dan 11 Keputusan Dirjen Bimas Haji.

adalah mengantisipasi (baca: mengurangi) merebaknya LAZ-LAZ yang bersebaran di mana-mana yang tentunya tidak semuanya dikelola oleh orang-orang yang memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Kecuali itu, regulasi baru tersebut juga secara tidak langsung mengarah pada upaya menjadikan BAZ di semua tingkatan sebagai satu-satunya organisasi pengelola zakat dengan hak monopoli. Yang terakhir ini merupakan manifestasi dari pemikiran perlunya pengelolaan oleh negara, baik yang pro terhadap penyatuan zakat dan pajak maupun yang kontra dengan argumentasinya masing-masing.<sup>26</sup> Dalam konteks ini BAZ meskipun tidak sepenuhnya merupakan instansi pemerintah akan tetapi peran dan keterlibatan pemerintah di sana cukup besar.

Sebagaimana diamanatkan UUPZ, organisasi pengelola zakat di Kabupaten Kendal juga terdiri dari BAZ dan LAZ. LAZ yang telah ada pada saat ini adalah Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (disingkat BAPELURZAM) yang berafiliasi dengan persyarikatan Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (disingkat LAZIS) yang berafiliasi dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama dan karenanya biasa disebut LAZIS NU, dan Badan Pelaksana Zakat, Infaq dan Shadaqah (disingkat BAPELAZIS) yang berada dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal. Berikut ini profil masing-masing organisasi pengelola zakat tersebut dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

---

<sup>26</sup> Dalam hal ini diantara mereka yang pro (bahkan tokoh dan pioneer) terhadap penyatuan zakat dengan pajak, untuk menyebut sebagian, adalah Masdar Farid Mas'udi. Sedangkan diantara mereka yang tidak setuju terhadap penyatuan, akan tetapi memandang perlu pembentukan kementerian urusan zakat adalah Djamal Doa.

## 1. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal

BAZ Kabupaten Kendal berdiri pada 27 september 2004 yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2004-2007 selanjutnya disebut SK Bupati). Diberlakukannya UUPZ, diterbitkannya KMA lama, lalu keluarnya SK Dirjen Bimas Haji tidak serta merta diikuti oleh pembentukan BAZ di Kabupaten Kendal. Bahkan terbentuknya BAZ Kabupaten Kendal tersebut lebih dari satu tahun setelah lahirnya KMA Baru tertanggal 18 juli 2003.

Ada banyak hal yang menyebabkan molornya pembentukan BAZ Kabupaten Kendal. Yang pasti warna politis jelas tampak dalam hal ini. Beberapa saat setelah pasangan Hendy Budoro dan Masduki Yusak memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2000-2005, ketidakcocokan terjadi antara dua tokoh yang diusung oleh Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (FDIP) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) ini. Bahkan ujung dari persaingan itu adalah sang Wabup diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal setelah menerima laporan Pansus DPRD yang dibentuk untuk itu. Pembentukan Pansus itu sendiri didahului oleh pencabutan dukungan politik oleh FPPP kepada yang bersangkutan. Namun karena alasan pencopotan itu tidak tepat, maka Menteri Dalam Negeri atas nama pemerintah pusat tidak menyetujuinya dan bertahanlah sang Wabup hingga akhir masa jabatannya. Namun demikian, selama sang Wabup menjabat keberadaannya sama halnya dengan ketiadaannya. Artinya, Masduki



Yusak hanya secara formal dan *de jure* saja sebagai Wakil Bupati, sedang secara *de facto* dan kenyataannya dia tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang sama sekali. Semua “pekerjaan” dipegang sendirian oleh Bupati.

Dalam kondisi seperti itulah berlangsung proses pembentukan BAZ Kendal. Tercatat telah tiga kali Tim Pembentukan BAZ melakukan studi banding antara lain ke BAZ Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun setiap kali susunan pengurus BAZ diajukan kepada Bupati selalu saja ditolak dengan berbagai alasan. Agaknya penolakan itu karena nama Masduki Yusak masuk dalam kepengurusan. Masduki sendiri ngotot terlibat dalam pembentukan BAZ karena selaku Wakil Bupati dia merasa bidang kesejahteraan sosial, dimana zakat menjadi salah satu sub bidangnya, merupakan kewenangannya. Akhirnya, setelah Masduki Yusak mengalah yang ditandai dengan ketiadaan namanya dalam struktur kepengurusan yang diusulkan, maka Bupati pun berkenan menanda tangannya. Dan, terbentuklah BAZ Kabupaten Kendal untuk pertama kalinya setelah melewati masa cukup lama dengan proses yang cukup melelahkan.<sup>27</sup>

Sebelum BAZ Kendal berdiri di Kabupaten Kendal telah ada BAZIS Amal Sholih yang didirikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Nomor 451.1/175/1996 tanggal 16 Pebruari 1996. BAZIS Amal Sholih itu sendiri merupakan perubahan dari Yayasan Amal Sholih Kabupaten Kendal menyusul adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri Nomor 29 tahun 1991 dan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang

---

<sup>27</sup> Berdasarkan wawancara dengan sebuah sumber kategori A1 yang tidak mau disebut namanya karena alasan keamanan baik diri, keluarga maupun karir pekerjaannya.

Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh. BAZIS Amal Sholih bertugas (1) menghimpun dana masyarakat Islam di wilayah Kabupaten Kendal yang berupa amal, zakat, infaq dan shodaqoh termasuk zakat (mal) dan zakat fitrah, dan (2) mendayagunakan hasil pengumpulan dana sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hingga saat terakhir berubah menjadi BAZIS Amal Sholih, selama tujuh tahun perjalanannya (1989-1996) Yayasan Amal Sholih telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 229.220.211,33 yang diperoleh dari setoran dinas/instansi dan masyarakat, dan bunga deposito. Dana tersebut dipergunakan untuk membantu sarana peribadatan seperti mesjid, musholla, madrasah, pondok pesantren, TK/TPQ, tempat pengajian, MTs, Yarsi kabupaten Kendal, Masjid Agung Kendal, Balkemas, panti asuhan; dan bantuan alat sholat/rukuk.<sup>28</sup>

Sebagaimana diamanatkan oleh UUPZ, BAZ Kendal terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana<sup>29</sup> yang anggotanya terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah. Satu-satunya unsur yang tidak ada dalam BAZ Kendal adalah tenaga professional. Memang sepintas tenaga professional yang diinginkan oleh peraturan perundangan itu ada, misalnya pimpinan PT. Bank BPD Jateng Cabang Kendal dan Unsur BRI Cabang Kendal. Benar mereka itu professional dibidangnya (perbankan), tetapi tidak dalam pengelolaan zakat. Boleh dibilang semua personal kepengurusan BAZ, tak terkecuali Badan Pelaksana, merupakan pengurus

---

<sup>28</sup> Pengurus BAZIS Amal Sholih Kabupaten Kendal, "Sejarah Berdirinya BAZIS Amal Sholih Kabupaten Dati II Kendal", hal. 1-2.

<sup>29</sup> Pasal 6 ayat (5) UUPZ, Pasal 4 ayat (1) KMA Baru, dan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Dirjen BIPH.

kehormatan yang duduk di sana semata karena jabatan dinasny, tidak karena kapasitas diri dan dedikasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya. Berikut ini susunan Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal masa bhakti 2004-2007 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1/333/2004 tanggal 27 September 2004.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BAZ
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DEWAN PERTIMBANGAN</b>		
1	Hendy Boedoro, SH., M.Si.	Bupati Kendal	Ketua
2	Letkol Inf. Arief Prayitno	Dandim 0715 Kendal	Wakil Ketua
3	AKBP Drs. Achmad Syukrani	Kapolres Kendal	Wakil Ketua
4	Drs. H. Sudjoko Ridwan	Kasubdin Kebudayaan pada Dinas P & K Kab. Kendal	Sekretaris
5	AKP Muslih, S.Ag.	Kapolsek Rowosari	Wakil Sekretaris
6	KH. Wildan Abdul Hamid	Ketua MUI Kendal	Anggota
7	KH. Muhsin Yunus, BA.	Syuriyah PCNU Kendal	Anggota
8	Drs. H. Abdullah Syakur	Ketua PD Muhammadiyah Kendal	Anggota
9	KH. Makmun Amin	Wakil Ketua MUI kendal	Anggota
10	KH. Drs. Asmawi Usman	Anggota MUI Kendal	Anggota
11	KH. Hafidzin	Ulama	Anggota
12	KH. Farhan Tantowi	Angg. PD Muhammadiyah Kendal	Anggota
<b>B.</b>	<b>KOMISI PENGAWAS</b>		
1	H. Zaenal Abidin, SH., M.Kn.	Kepala Bawasda Kab. Kendal	Ketua
2	Mulyadi, SH., MM.	Ka. Dinas P&K Kab. Kendal	Wakil Ketua
3	Drs. H. M. Ali Chasan, M.Si.	Ketua PCNU Kendal	Wakil Ketua
4	Dr. H.M. Kadar suyanto	Ka. Dinas Kesehatan Kab. Kendal	Sekretaris
5	H. Abdul Wahab, S.Pd.	Kepala SMP Al-Hidayah	Wakil Sekretaris
6	Juli Mudjiono	Staf Kandepag Kendal	Wakil Sekretaris
7	Drs. H. Warsa Susilo, M.Pd.	Kepala DPKD Kab. Kendal	Anggota
8	H. Bakri Malika	Anggota DPRD Kab. Kendal	Anggota
9	dr. H. Bambang Eko Listianto	Anggota DPRD Kab. Kendal	Anggota
10	H.M. Danial, BA.	Anggota DPRD Kab. Kendal	Anggota
11	Rahadi Widayanto, SE.	Pimpinan Bank BPD Jateng Cab. Kendal	Anggota
12	Akhmad Wahib, SH.	Kasi Gara Zawa Kandepag Kendal	Anggota
13	Agus Susanto, SH.	Kabag. Hukum Setda Kab. Kendal	Anggota
14	KH. Ismangun, BA.	Anggota PD Muhammadiyah Kdl	Anggota
<b>C.</b>	<b>BADAN PELAKSANA</b>		
1	Endro Arintoko, SH., MH.	Sekda Kab. Kendal	Ketua
2	Drs. H. Agus Sholeh, M.Ag.	Ka. Kandepag Kendal	Wakil Ketua
3	H. Sugiyono, SH.	Kabag Kesos Setda Kab. Kendal	Wakil Ketua
4	KH. M. Ubaidi, BA.	Kasi Pend. Keagamaan Ponpes Kandepag Kendal	Sekretaris
5	Sam'ani, S.Ag.	Kasubag Agama, Pend. & Budaya pd. Bag. Kesos Setda Kab. Kendal	Wakil Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BAZ
6	Drs. Ahmad Tantowi, M.Si.	Guru SMP Al-Hidayah	Wakil Sekretaris
7	Ir. Bambang Dwiyono, MT.	Kepala Bapeda Kab. Kendal	Bendahara
8	H. Djamzuri, SH.	Kasi Gara Haji & Umrah Kandepag Kendal	Bendahara
9	H. Agus Subiyakto, SH., S.Sos	Kasi Akuntansi & TI Bank BPD Jateng Cabang Kendal	Kasi Pengumpulan
10	Ahmad Subhan Darussalam	Unsur BRI Kab. Kendal	Kasi Pengumpulan
11	Drs. Khaerondi	Kasi Urais Kandepag Kendal	Kasi Pengumpulan
12	Ir. Sukron Syamsul Hadi, M.Si	Sekretaris BKD Kab. Kendal	Kasi Pengumpulan
13	Ir. Kardani Iswantah	Asist. Pemerint. Sekda Kendal	Kasi Pendistribusian
14	Drs. Biyanto	Kabag Org. Setda Kab. Kendal	Kasi Pendistribusian
15	H. Ahmad Ridha, SE.	Kasubag TU Kandepag Kendal	Kasi Pendistribusian
16	Ir. H. Toha, MT	DPU Kab. Kendal	Kasi Pendistribusian
17	Drs. H.M. Khaeruddin, M.Si.	Kasi Penamas Kandepag Kendal	Kasi Pendayagunaan
18	Ir. H. Sugiyono, MT.	DPU Kab. Kendal	Kasi Pendayagunaan
19	Drs. H. Hasan Mu'arif, M.Si.	Pengawas Pend. Agama Islam	Kasi Pendayagunaan
20	Sumaryatmo, S.Sos.	Kasubag Keg. Sosial Bagian Kesos Setda Kab. Kendal	Kasi Pendayagunaan
21	Drs. H. Abdul Wahid	Pengawas Pend. Agama Islam	Kasi Pengembangan
22	Drs. H. Bambang Karnadi	Pengawas Pend. Agama Islam	Kasi Pengembangan
23	Subari Syam, SE.	Kasubid Agama, Pend & Kebud. Bapeda Kab. Kendal	Kasi Pengembangan
24	Drs. H. Muryono, SH., M.Pd.	Kabag. Humas Setda Kab. Kendal	Kasi Pengembangan

Susunan pengurus BAZ Kendal di atas memberikan pemahaman bahwa kecuali tiadanya unsur tenaga professional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan, perekrutan nama juga hanya memperhatikan posisi jabatan dinas yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan apakah bisa dan dapat bekerja sesuai sistem atau tidak. Agaknya, konseptor kepengurusan ini lupa bahwa tidak hanya faktor jabatan saja yang mendukung kinerja seseorang dalam suatu aktivitas sosial, terutama yang tidak menjanjikan keuntungan materi seperti tugas pengelolaan zakat ini. Lebih dari itu, dan ini justru yang sangat menentukan, adalah faktor dedikasi dan kesediaan berkorban baik tenaga, pikiran maupun waktu.

Asumsi saya di atas didukung oleh fakta di lapangan bahwa BAZ Kendal bukan saja tidak lebih baik daripada BAZIS Amal Solih melainkan tidak bekerja sama sekali. Keberadaannya seperti ketiadaannya. Hingga hampir sembilan bulan sejak dibentuk BAZ Kendal belum melakukan apa-apa; tidak koordinasi dan tidak pula hanya sekedar rapat. Bahkan beberapa orang yang namanya tercantum sebagai pengurus BAZ tidak tahu menahu akan hal itu karena SK belum diterima oleh yang bersangkutan. Jadi sampai saat ini belum satu kalipun pengurus BAZ melakukan rapat, baik harian maupun pleno. Ketika saya mempertanyakan hal itu kepada seorang pejabat di Pemda yang juga pengurus BAZ, tepatnya sebagai wakil sekretaris badan pelaksana, jawaban beliau adalah bahwa belum ada waktu yang pas.<sup>30</sup> Berjalan berkelindan dengan BAZ Kabupaten Kendal, BAZ-BAZ kecamatan pun belum semua terbentuk. Menurut informasi beberapa kecamatan telah membentuk BAZ, seperti Kota Kendal, Boja, Gemuh dan lain-lain.<sup>31</sup> Namun hingga saat ini hanya BAZ Kota Kendal yang telah memberikan laporan sekaligus mengirimkan susunan kepengurusannya.

Kecuali itu BAZ mesti mempunyai tenaga *full timer* sebagai pelaksana harian yang mendapatkan gaji penuh seperti layaknya pegawai negeri. Bukankah UUPZ dan SK Bupati telah mengamanatkan hal demikian? Dalam UUPZ dijelaskan bahwa dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sam'ani, S.Ag. pada tanggal 17 Mei 2005. Beliau adalah Kasubag Agama, Pendidikan dan Budaya pada Bagian Kesusjahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan dalam BAZ Kendal duduk sebagai wakil sekretaris Badan Pelaksana.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Drs. H. Bambang Karnadi pada tanggal 31 Mei 2005. Beliau adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kendal dan dalam struktur kepengurusan BAZ Kendal duduk sebagai Kasi Pengembangan BAZ. Sebelumnya beliau terlibat banyak dalam pembentukan BAZ karena posisinya waktu itu sebagai Kasi Urais Kandepag Kendal.

pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.<sup>32</sup> Demikian pula pada diktum kelima SK Bupati Kendal dinyatakan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan (pembentukan BAZ) ini dibebankan pada dana yang syah.<sup>33</sup> Agaknya, tidak adanya tenaga professional yang bekerja secara penuh waktu itu karena tidak adanya *good will* dari pemerintah; dalam hal ini Bupati. Pemerintah tidak begitu serius dan peduli terhadap masalah zakat. Pemerintah lari dari tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah digariskan sendiri.

Menurut Wahib, semenjak BAZ Kendal belum terbentuk hingga saat ini terlalu banyak persoalan mendasar yang dalam pemikiran para eksponen BAZ berpotensi menjadi penghambat operasionalisasi BAZ. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain : Pertama, kekhawatiran akan terjadinya tabrakan antara BAZ dengan LAZ yang lebih dulu ada. Jelasnya, demikian Wahib, akan ada perebutan “mangsa” antara kedua organisasi pengelola zakat tersebut. Karena kekhawatiran seperti ini dalam diri para eksponen BAZ timbul sikap pesimistik dan akhirnya hanya “berharap” BAZ dapat beroperasi di lingkungan instansi pemerintah saja. Sikap pesimistik ini setidaknya tampak dari susunan kepengurusan BAZ yang tak ubahnya sebuah ajang pengumpulan para pejabat pemerintah yang bersifat lintas instansi. Kalaupun nanti berekspansi ke tengah masyarakat maka yang demikian itu hanya dalam bentuk koordinasi dan pengadministrasian hasilnya saja.

Kedua, resistensi dari para kyai terutama yang berafiliasi pada jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang di Kendal merupakan ormas dengan pengikut

---

<sup>32</sup> Pasal 23 UUPZ.

<sup>33</sup> Surat keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1/333/2005 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2004-2007.

terbesar (untuk tidak mengatakan mayoritas).<sup>34</sup> Ketiga, kontroversi di seputar UUPZ itu sendiri yang menurut sebagian orang dianggap banci karena tidak mengatur masalah sanksi bagi para wajib zakat yang tidak patuh. Kecuali itu kontroversi juga muncul terkait masalah tiadanya PP yang mengatur pelaksanaan UUPZ, akan tetapi hanya KMA dan keputusan Dirjen BIPH terlepas dari sifat teknis dan operasional UUPZ itu sendiri yang menurut beberapa pihak tidak ubahnya seperti sebuah-PP atau peraturan lain yang mengatur masalah teknis. Keempat, keberadaan zakat profesi di Kendal masih menjadi polemik antara pihak yang mengatakan ada (dan ini yang dominan) dan pihak yang tidak mengakui keberadaannya (meskipun ini minoritas).<sup>35</sup>

Menurut Karnadi, belum bekerjanya BAZ Kendal tidak terkait dengan susunan kepengeurusan yang ada melainkan lebih pada faktor malas dari orang-orang yang tercantum di dalamnya, terutama Badan pelaksana. Mestinya diadakan dulu pertemuan (baca: koordiansi) terbatas Badan Pelaksana, baru kemudian diplenokan. Kuncinya, demikian Karnadi, adalah dicoba dulu. Soal berhasil atau tidak itu urusan belakang, toh sambil jalan nanti dapat dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.<sup>36</sup>

## 2. Bapelurzam

Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) merupakan badan pembantu Pengurus Muhammadiyah dengan tugas khusus mensukseskan

---

<sup>34</sup> Lebih lanjut mengenai masalah ini akan dibahas lebih detail pada sub bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penggalian potensi zakat di belakang nanti.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Akhmad Wahib, Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf kantor Departemen Agama Kendal dan juga sekaligus anggota Badan Pengawas BAZ Kendal, pada tanggal 1 Juni 2005.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Drs. Bambang Karnadi.

realisasi gerakan zakat. Karena itu di kalangan persyarikatan Muhammadiyah Bapelurzam biasa disebut dengan amilin. Bapelurzam ada di hampir semua tingkatan kepengurusan Muhammadiyah minus ranting. Artinya Bapelurzam ada mulai dari tingkat cabang (kecamatan), daerah (kabupaten), wilayah (propinsi) hingga pusat (nasional).<sup>37</sup>

Dasar pemikiran berdirinya Bapelurzam adalah bahwa zakat harus “diamili”, maksudnya ditangani - oleh amil/panitia. Bahkan di kalangan warga Muhammadiyah ditekankan sebuah prinsip bahwa zakat tanpa amil tidak sah atau minimal tidak dianggap sebagai zakat tetapi hanya shodaqoh. Kecuali itu Bapelurzam didirikan karena dalam kehidupan keseharian zakat yang merupakan salah satu rukun Islam sering diabaikan. Banyak sekali orang Islam yang merasa berdosa bila tidak mendirikan shalat, namun tidak merasa berdosa bila tidak menunaikan zakat. Padahal dalam al-Qur'an berkali-kali perintah zakat dirangkai dengan perintah shalat.

Sesuai dengan namanya Bapelurzam hanya mengurus zakat tidak yang lain, misalnya infaq dan shodaqoh sebagaimana lazimnya organisasi pengelola zakat. Alasannya adalah untuk menghilangkan kerancuan. Namun demikian tidak berarti bahwa Muhammadiyah selaku organisasi induk tidak peduli terhadap infaq, shodaqoh dan semisalnya. Ibadah-ibadah maliyah non fardlu ini tetap ditekankan dan diurusi, tetapi mekanismenya pengelolaannya dilaksanakan secara terpisah dan secara langsung oleh pengurus persyarikatan.

---

<sup>37</sup> Zakat Kita Zakat Terapan, Buku I (Kendal : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, 1999), hal. 7 dan wawancara dengan Pengurus dan tokoh Muhammadiyah Kendal tanggal 4 Juni 2005.



Bapelurzam bermula dari Instruksi Pengurus Pusat Muhammadiyah No. 02/PP/1979 sebagai tindak lanjut dari tanfidz dan pelaksanaan keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya tahun 1978 tentang Gerakan Zakat Muhammadiyah. Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kendal tahun 1979 cenderung mempetieskan Instruksi PP Muhammadiyah tersebut karena dirasa tidak mungkin dilaksanakan. Pada saat itulah KH. Abdul Bari Soim, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua-Majlis Pendidikan, tampil dan bersikeras agar Gerakan Zakat Muhammadiyah dilaksanakan. Kita, demikian KH. Abdul Bari Soim, telah melakukan dua dosa bila tidak menjalankan gerakan zakat tersebut; dosa pada Allah dan dosa pada pimpinan organisasi yang ada di atas (pusat). Forum pun menyetujui pendapat KH. Abdul Bari Soim dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mengurusnya. Didorong oleh rasa tanggung jawab dan komitmen keagamaannya, KH. Abdul Bari Soim menerima amanat itu dengan satu syarat ialah agar beliau diberi kewenangan mutlak dan jangan direcoki/diganggu. Akhirnya, PD Muhammadiyah Kendal pun resmi melaksanakan gerakan zakat dengan membentuk Bapelurzam.

Bapelurzam bersifat temporer dan demikian pula personalianya senantiasa mengalami pergantian tiap tahunnya. Setiap bulan Rajab Pimpinan Daerah dan Cabang Muhammadiyah menerbitkan Surat Tugas atau Surat Perintah kepada anggota Persyarikatan yang mampu, mau, bersemangat dan terpercaya untuk membentuk amilin (baca: Bapelurzam) dengan masa bhakti bulan Rajab sampai dengan akhir bulan Dzulhijjah tahun yang bersangkutan. Selanjutnya Pimpinan Daerah / Cabang membentuk Bapelurzam di tingkat masing-masing dengan

merekrut atau memasukkan tokoh pimpinan Persyarikatan, Majelis/Bagian, Lembaga, Badan, Ortom dan kekuatan-kekuatan lain yang ada sebagai personalia. Yang demikian itu karena Bapelurzam merupakan gerakan terpadu yang harus didukung dan disukseskan oleh seluruh kekuatan yang ada dan karenanya tidak boleh ada amilin tandingan terhadap Bapelurzam dengan alasan apapun.<sup>38</sup>

Bapelurzam Cabang Weleri sebagai *pioneer* dan percontohan dari Bapelurzam cabang-cabang yang lain, bahkan juga Bapelurzam-bapelurzam yang berada di tingkat daerah, wilayah dan nasional, secara rutin menyelenggarakan kegiatan pengelolaan zakat tiap tahun. Dari tahun ke tahun sejak pertama kali dirintis pada tahun 1979 Bapelurzam Weleri mencatat adanya perkembangan baik dari segi nilai nominal dana yang berhasil dikumpulkan dan dikelola maupun dari segi jumlah muzakki. Tahun 2005 ini Bapelurzam Cabang Weleri telah berhasil mengelola dana zakat sebesar Rp. 278.950.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah muzakki sebanyak 1083 orang. Berikut ini data perolehan dana yang berhasil dikelola sekaligus jumlah muzakki.

Tabel : 12  
PERKEMBANGAN PEROLEHAN ZAKAT AMWAL  
BAPELURZAM CABANG WELERI  
1979-2005

NO	TAHUN	JUMLAH ZAKAT	JUMLAH MUZAKKI
1	1979	Rp. 415.000,-	65
2	1980	Rp. 1.456.100,-	94
3	1981	Rp. 1.837.200,-	105
4	1982	Rp. 1.597.500,-	103
5	1983	Rp. 2.115.120,-	115

<sup>38</sup> *Ibid.*

NO	TAHUN	JUMLAH ZAKAT	JUMLAH MUZAKKI
6	1984	Rp. 2.612.750,-	115
7	1985	Rp. 2.391.500,-	104
8	1986	Rp. 3.567.400,-	114
9	1987	Rp. 4.347.555,-	147
10	1988	Rp. 7.225.960,-	181
11	1989	Rp. 12.500.000,-	332
12	1990	Rp. 18.554.100,-	495
13	1991	Rp. 22.625.760,-	590
14	1992	Rp. 28.000.000,-	716
15	1993	Rp. 31.435.175,-	754
16	1994	Rp. 30.871.600,-	421
17	1995	Rp. 37.775.000,-	467
18	1996	Rp. 40.320.325,-	483
19	1997	Rp. 46.268.425,-	520
20	1998	Rp. 51.775.200,-	551
21	1999	Rp. 92.750.000,-	587
22	2000	Rp. 122.763.000,-	633
23	2001	Rp. 170.400.000,-	774
24	2002	Rp. 194.320.000,-	864
25	2003	Rp. 220.822.000,-	914
26	2004	Rp. 247.000.000,-	1078
27	2005	Rp. 278.950.000,-	1083

Keberhasilan Bapelurzam mengelola zakat tersebut karena didukung oleh tenaga-tenaga “militan” yang bekerja secara terpadu dan tersebar di hampir seluruh desa di Kecamatan Weleri dan di lembaga/amal usaha Muhammadiyah di sana. Mereka terdiri dari dewan penasehat, dewan harian, tim penyuluh, koordinator-koordinator dan kader-kader muda selaku tenaga operasional di lapangan yang jumlahnya hampir mencapai angka ratusan. Berikut ini susunan lengkap personalia Bapelurzam Weleri tahun 2005.

Penasehat : 1. H. Muslim R.  
2. H. Su’ud Nasroh  
3. Drs. H. Musthofa  
4. Jazuri, BA.

Penanggung Jawab : PC Muhammadiyah Weleri

Koordinator Cabang : Mulyono Syafa'at  
 Wakil Koordinator : 1. Taufik Husain, S.Si.  
 2. Yusuf Darmawan

Sekretaris : Badaruddin  
 Wakil Sekretaris : 1. Sutarjo  
 2. Heru Adya Saputra

Bendahara : M. Nuri  
 Wakil Bendahara : Sri Mulyono

Anggota Pleno/Tim Penyuluh : 1. Ali Mu'zi  
 2. Akbaruddin, BA.  
 3. H. Rubaidi, Bc.Hk.  
 4. Mahfudz Ilzam

Koordinator dan Operasional :

NO	RANTING	KOORDINATOR	OPERASIONAL
1	Weleri	Munawir, BA	1. Sulis Mardianto 2. Drs. Heru Purnomo 3. M. Zaenuri 4. Sumardi
2	Bumiayu	Ahmad	1. Ngapin 2. Pujiono 3. Shobirin 4. Rahmadi 5. Zimam Z. 6. Samin
3	Sidomukti	Drs. Pujiono	1. Subandi 2. Karyanto 3. Muh. Busro 4. Muslih, S.Ag. 5. Paryan 6. Suyono
4	Nawangsari	Aris Mulatno	1. Tirah Priyono 2. Heri Setiawan
5	Panaruban	Joko Subagiyo, S.Ag.	1. Kamsari 2. Zaenal Abidin 3. Sazali 4. H. Adwin Namorasolna
6	Karangdowo	Purwanto	1. Husni Tamrin 2. Rohmad, S.Pd.

NO	RANTING	KOORDINATOR	OPERASIONAL
			3. Komari 4. Yanto Suparpto
7	Sambongsari	Guntoro	1. Masykuri Setiabudi, ST. 2. Solikhin 3. Sobirin 4. Suswanto
8	Tegalsari	Edy Turmudzi	1. Makruf 2. Ahmad
9	Payung	Sumaryadi	1. Drs. Waluyo Hadi 2. Drs. Subakir
10	Tratemulyo	Drs. H. Kasiyanto	Sunanto
11	Pucuksari	Mabrur	Sugiyanto
12	Ngasinan	H. Salim Arif	1. Sunaryo 2. Yusech
13	Montongsari	Mukhtar	Hartono
14	Karanganom	Moh. Mujahidin, S.Ag.	1. Masfui Hisyam 2. Nasrun
15	Panyangkringan : a. Sekepel  b. Kendayan  c. Krajan  d. Kedonsari 1  e. Kedonsari 2  f. Kedonsari 3  g. Kedonsari 4  h. Kedonsari 5	Ahmad Sukarno       Abdul Khanan	1. Warjan 2. Drs. Zaenal Arifin  1. Sukatmo 2. Masduki, S.Pd.  1. F. Soetijono, S.Pd. 2. Soemardjo  1. Drs. Ra Widiyanto 2. M. Heru Nugroho  1. Syahidin 2. Joko Ardi  Basuki Rahmat  1. Heru Santoso 2. Fengki Kurniawan  1. Drs. Wahid Asy'ari 2. M.T. Arifiyanto, SE.
16	Sumberagung	Joko Triyono	Supriyanto
17	Manggungsari	Supratikno	Subud
18	Rumah Sakit Islam	Mastuti	1. Bianto

NO	RANTING	KOORDINATOR	OPERASIONAL
			2. Joko Mulyadi
19	SMA Muhammadiyah 1	Moh. Amri, B.Sc.	St. Chodijah
20	SMK Muhammadiyah 2	Drs. Ahmad Murtadji	
21	SMK Muhammadiyah 3	Drs. H. Nuryadi	Shobirin
22	SLTP Muhammadiyah 1	Agus Martono, S.Pd.	LinasinMahmudah
23	MTs/MA Muh. 1	Drs. Solikhin	Bambang Purwanto
24	Akper Muh.	Teguh Anindito	

### 3. Lazis NU

Tidak banyak informasi tentang Lajnah Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lazis NU) yang dapat penulis sajikan karena keterbatasan data dan sumber. Seperti halnya pada lembaga milik jam'iyah NU dan warga NU pada umumnya, budaya menulis terutama untuk laporan-laporan kegiatan atau program dan rencana kerja organisasi masih sangat minim dan memprihatinkan. Kalaupun ada maka pengarsipannya yang mengesankan. Sudah demikian, aktifitas para eksponennya pun bersifat musiman, tidak kontinyu setiap saat.<sup>39</sup> Karena itu informasi singkat tentang Lazis NU ini hanya bersumber dari wawancara dengan beberapa pengurusnya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Biasanya para pengurus NU maupun lembaga/badan otonomnya baru aktif masuk kantor, kumpul-kumpul, sibuk kesana kemari bila ada hajat besar yang bersifat temporer, misalnya pemilu, pilkada (seperti saat ini), muktamar, konferensi dan forum-forum organisasi yang lain. Ketika saya datang ke kantor PCNU untuk keperluan penelitian ini, tidak seorang pun yang ada di sana, kecuali seorang aktifis IPNU yang memang tinggal di sana dan ternyata tidak banyak tahu menahu tentang NU Kendal dan pengurusnya. Ruang-ruang yang ada tidak tertata secara baik dan rapi mengindikasikan tidak adanya "tanda kehidupan". Memang ada alasan bahwa yang demikian karena kantor sedang direnovasi. Tetapi untuk kantor kepengurusan tingkat cabang yang megah seperti PCNU Kendal, mestinya ada staf khusus yang selalu *stand by* untuk melayani tamu yang sering berdatangan walau hanya bersifat informatif. Untuk mendapatkan alamat elitnya saja sungguh sulit bukan main. Sebelum ini, setidaknya dua kali saya datang ke kantor PCNU Kendal untuk suatu tugas dari PW Lajnah Falakiyah Jawa Tengah. Layanan dan jawaban yang saya terima sangat tidak memuaskan karena memang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

<sup>40</sup> Dari para pengurus Lazis Nu yang saya temui, beberapa diantaranya merasa mempunyai informasi/bahan/dokumen yang bersifat tertulis. Akan tetapi mereka semuanya tidak tahu lagi dimana menyimpannya. Semula mereka berjanji mencarikannya untuk saya, namun hingga tesis

Lazis NU Kabupaten Kendal merupakan suatu lajnah (lembaga) yang ada di lingkungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang zakat, infaq dan shadaqah.<sup>41</sup> Dengan demikian berbeda dari Bapelurzam di Muhammadiyah, Lazis NU merupakan lembaga yang permanen dengan masa bhakti pengurusnya ditentukan dalam suatu periodisasi waktu lima tahunan sesuai dengan masa bhakti kepengurusan NU.

Pengurus Lazis NU Kendal saat ini didominasi oleh orang IAIN atau setidaknya mereka yang berlatar belakang pendidikan IAIN yakni enam orang dari dua belas personalia yang ada. Enam personalia yang lain adalah dokter (1 orang), pesantren (3 orang), keguruan umum (1 orang), dan sarjana pertanian (1 orang). Berikut ini susunan kepengurusan Lazis NU Kendal saat ini :

Penanggung Jawab	: Ketua PCNU Kabupaten Kendal
Penasehat	: KH. Makmun Amin Dr. Hj. Ismawati, M.Ag. dr. H. Abdul Ghafar
Ketua	: Drs. Ahmad Tantowie, M.Si.
Wakil Ketua	: Nur Fatoni, M.Ag.
Sekretaris	: Ali Murtadlo, M.Ag.
Wakil Sekretaris	: Abdul Ghofur, M.Ag.
Bendahara	: H. Ghufon Amir

---

ini selesai mereka belum juga berhasil menemukannya, padahal saya telah berkali-kali menghubungi mereka.

<sup>41</sup> Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 16 ayat (1). Di situ dinyatakan bahwa lajnah adalah perangkat organisasi NU untuk melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus.

Anggota : Hj. Aisyah Asmawi  
Mahmudah, S.Pd.  
Ir. Sapuan Muhammad  
Abdul Ghofar, S.Ag.

Kepengurusan Lazis NU Kendal saat ini sebenarnya sudah mempunyai program kerja yang cukup baik antara lain: pemantapan kelembagaan, inventarisasi problematika seputar ZIS, penyusunan juklak teknis, inventarisasi sumber ZIS dan para mustahik, sosialisasi pengamalan ZIS, dan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Akan tetapi program kerja itu hingga kini hanya sebatas angan-angan yang belum terwujud. Hingga dua tahun berjalan lajnah ini belum bekerja sama sekali, apalagi memberikan hasil.

Tidak berjalannya kepengurusan Lazis NU ini, menurut saya, setidaknya karena tiga hal. Pertama, tidak adanya sarana dan prasarana kerja maupun tenaga operasional. Dalam hal ini Lazis NU belum mempunyai kantor tersendiri yang dilengkapi alat-alat komunikasi plus staf tetap yang senantiasa *stand by*. Yang demikian itu untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama Lazis anak cabang dan ranting. Harapan ini sebenarnya tidak terlalu mengada-ada, tetapi sungguh suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dan, secara materi PCNU mampu memenuhinya. Kedua, belum apa-apa Lazis sudah dituntut untuk mandiri dalam segala hal. Agaknya, PCNU tidak memiliki visi tentang ZIS. Mereka tidak melihat ZIS sebagai sebuah potensi pemberdayaan umat yang mestinya sangat cocok untuk kaum nahdliyin yang sebagian besar merupakan masyarakat ekonomi lemah. Tampaknya PCNU membentuk kepengurusan Lazis



hanya karena faktor latah, bukan karena alasan fungsional.<sup>42</sup> Ketiga, tidak bekerjanya Lazis NU Kendal karena para pengurusnya tidak punya semangat dan sikap militansi yang tinggi. Mereka kalah sebelum bertanding. Belum apa-apa mereka sudah bersikap pesimistis. Dalam pada ini mereka membayangkan adanya suatu kesulitan mendasar berkaitan dengan persepsi warga NU khususnya dan masyarakat Islam umumnya bahwa zakat itu perintah agama, kenapa mesti diatur sedemikian rupa? Orang merasa khawatir menyerahkan ZISnya pada Lembaga pengelola zakat karena tidak tahu mau dikemanakan ZISnya itu nanti. Di sini masyarakat tidak mau tahu bahwa organisasi pengelola ZIS itu mempunyai program kerja yang pasti dan jelas. Karena itu mereka lebih percaya pada kyai atau tokoh ditempat mereka.<sup>43</sup>

Meskipun Lazis NU Kendal tidak berjalan, akan tetapi beberapa ranting yang telah dapat beroperasi dengan baik. Di sini tercatat ranting Sukolilan dan Purin (Patebon), Panaruban (Weleri), dan Tanjungmojo (Kangkung). Sebenarnya masih banyak lagi ranting-ranting NU yang telah dapat menyelenggarakan pengelolaan ZIS, terutama zakat. Namun mereka tidak terkoordinasi secara baik dan rapi oleh karena Lazis NU cabang selaku koordinator tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Perlu dicatat di sini bahwa tidak berjalannya Lazis NU Kendal ini sebenarnya suatu ironi. Sebab, mayoritas masyarakat Kendal adalah nahdliyin. Suatu potensi yang amat besar terabaikan karena tidak adanya *good will* dan visi

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ahmad Tantowie, Ketua Lazis NU Kendal pada tanggal 3 Juni 2005.

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang tepat tentang ZIS pada para elit NU baik di jajaran struktural maupun kultural.

#### 4. Bapelazis

Badan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah Kantor Departemen Agama Kabupaten kendal (selanjutnya disebut Bapelazis Depag Kendal atau Bapelazis saja) adalah organisasi sosial yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah pada Kantor Departemen Agama kabupaten Kendal secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>44</sup> Bapelazis didirikan pada tanggal 1 April 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan para pegawai negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal dengan jalan menghimpun zakat, infaq dan shadaqah dari anggota.<sup>45</sup> Jelasnya sebagai abdi negara dan mendapatkan gaji setiap bulan, barangkali, para pegawai itu telah melakukan “korupsi waktu” berapa pun lamanya dalam menjalankan tugasnya. Nah, pembayaran zakat dan semacamnya diyakini bisa dijadikan ajang untuk membersihkan penghasilan yang diterima setiap bulannya.<sup>46</sup> Lebih dari itu pembentukan Bapelazis juga merupakan upaya meningkatkan pencapaian pelaksanaan program kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Bapelazis Depag Kendal.

<sup>45</sup> Pasal 2 ayat (2) Anggaran dasar Bapelazis Depag Kendal.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Drs. Khairuddin, M.Si., Kasi Penamas Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal yang juga Sekretaris Bapelazis periode tersebut pada tanggal 8 Juni 2005.

<sup>47</sup> Semua SK Bapelazis, sejak dari pembentukan hingga reformasi pengurus, dalam konsiderannya selalu memuat klausul tersebut. Yang demikian itu wajar dan memang sudah tempatnya karena salah satu tugas Depag, dalam hal ini Kantor Depag Kendal adalah menyelenggarakan kehidupan beragama termasuk pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah. Karena itu di Kandepag ada seksi penyelenggara zakat dan wakaf, dan di Depag Pusat ada direktorat

Secara embrional Bapelazis Bermula dari Badan Pengelolaan Infaq Kantor Departemen Agama Kabuapten Kendal yang berdiri sejak 3 Juni 1991. Badan ini mengupayakan gerakan amal infaq sebesar 1 % dari jumlah penerimaan gaji pegawai dan guru di lingkungan Kandepag Kendal. Memasyarakatnya zakat profesi di Indonesia pada awal-awal dekade 1990-an dan lahirnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29/27 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah dua alasan utama dibentuknya Bapelazis menggantikan Badan Pengelolaan Infaq.<sup>48</sup>

Pengurus Bapelazis dipilih dalam musyawarah pengurus (sebelumnya) dan utusan daerah, dan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabuapten Kendal. Pengurus Bapelazis dipilih untuk masa bhakti tiga tahun dan dapat dipilih kembali.<sup>49</sup> Berikut ini susunan pengurus Bapelazis periode 2001-2003 atau terakhir :<sup>50</sup>

No	Kepengurusan	Nama	Jabatan Dinas
1	Pelindung/Penanggung Jawab	Drs. H. Damzun Zaeroni	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal
2	Penasehat	Drs. H. Bambang Karnadi	Kepala Seksi Urais Kandepag Kendal
3	Ketua Umum	Drs. Abdul Wahid	Kepala Seksi Ruais Kandepag

Pengembangan zakat dan Wakaf yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

<sup>48</sup> Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal Nomor Mk.04/1.b/Kp.08.4/1254/1995 perihal Pembentukan Bapelazis Kandepag Kabupaten Kendal, terutama bagian konsiderannya.

<sup>49</sup> Pasal 5 dan 6 AD Bapelazis.

<sup>50</sup> Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal Nomor Mk.04/1.b/Kp.08.4/0053/2000 tertanggal 29 Desember 2000 perihal Pergantian Pengurus Bapelazis Kandepag Kabupaten Kendal. Dikatakan terakhir karena hingga saat ini disebabkan satu dan lain hal pengurus baru belum terbentuk, sehingga kepengurusan ditekel oleh pengurus periode 2001-2003. Dengan demikian terjadi molor waktu sekitar satu tahun lebih. Wawancara dengan Drs. Khairuddin, M.Si.

4	Ketua I	Drs. H. Hasan S. Mu'arif	Kendal Waspendais TK/RA, SD/MI Kec. Kangkung 02
5	Ketua II	H.M. Suhardi, SH.	Kepala KUA Kecamatan Limbangan
6	Sekretaris I	Drs. Khaeruddin	Kasubsi Doktik Rua Islam
7	Sekretaris II	Akhmad Wahib, SH.	Kasubsi Jidzawaibsos Urais
8	Bendahara I	Abdul Rachman	Ka. Ur. TU Keuangan
9	Bendahara II	Hj. Mahmudah	Pegawai Seksi Rua Islam
10	Anggota	Sjakroni, BA.	Ketua Pokjawas Kandepag Kendal/Waspendais TK/RA/ SD/MI Kec. Kendal 02
11	Anggota	Mulyo	Waspendais TK/RA, SD/MI Kec. Rowosari
12	Anggota	Drs. Ahmad Zaenudin	Kepala KUA Kec. Singorojo
13	Anggota	H.A. Choiruddin, BA.	Kepala KUA Kec. Kaliwungu
14	Anggota	Bedjo Santoso	Waspendais TK/RA. SD/MI Kec. Plantungan 01

Sesuai dengan namanya, Bapelazis mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah yang berasal dari pegawai dan guru agama pada Kantor Departemen Agama Kendal<sup>51</sup> yang telah menyatakan kesanggupannya secara tertulis untuk menyerahkan sebagian dari gajinya kepada Bapealzis.<sup>52</sup> Yang dimaksud zakat di sini adalah zakat profesi. Dalam kenyataannya tidak semua pegawai dan guru agama di lingkungan Kandepag Kendal bersedia membayarkannya. Hingga saat ini tercatat sekitar 75 persen hingga 80 persen saja dari pegawai dan guru Depag Kendal yang menjadi muzakki.<sup>53</sup> Sedangkan untuk infaq semua menyatakan kesanggupannya. Besarnya zakat adalah 2,5 persen dari penghasilan sementara infaq sebesar 1 persen dan keduanya dibayarkan setiap bulan melalui pemotongan

<sup>51</sup> Pasal 5 ART Bapelazis.

<sup>52</sup> Pasal 3 AD Bapelazis.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Drs. Khairuddin, M.Si.

gaji. Sedangkan shadaqah bersifat sukarela dan tidak ditentukan. Mungkin karena sifatnya yang demikian hingga saat ini tidak ada pemasukan dari pos shadaqah.

Selama periode kepengurusan 2001-2003, Bapelazis telah berhasil mengelola dana zakat sebesar Rp. 48.399.279,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tahun 2001, Rp. 70.380.479,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) pada tahun 2002, dan meningkat lagi pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 72.220.489,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). Sedangkan dana infaq yang berhasil dikelola lebih besar lagi ialah Rp. 66.239.362,- (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) tahun 2001, Rp. 79.027.554,- (tujuh puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) tahun 2002, dan kemudian meningkat sedikit menjadi Rp. 79.653.429,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) pada tahun 2003. Sementara itu pada tahun 2004 yang kepengurusannya masih dipegang oleh pengurus periode terdahulu berhasil mengelola dana zakat sebesar Rp. 63.671.269,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).<sup>54</sup>

Terlepas dari “prestasi” yang berhasil ditorehkan dalam mengelola zakat dan infaq, ternyata Bapelazis secara kelembagaan penuh dengan kejanggalan baik dari segi nama, status maupun eksistensinya khususnya dalam masa-masa mendatang kaitannya dengan telah terbitnya KMA Baru sebagaimana telah disinggung di

---

<sup>54</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Bapelazis periode 2001-2004. Khusus untuk data tentang jumlah dana infaq yang berhasil dikelola pada tahun 2004 ini saya tidak berhasil mendapatkannya.

muka yang memperberat syarat LAZ guna mendapatkan pengukuhan. Pertama, sebagaimana akronimnya, Bapelazis adalah Badan Pengelola ZIS. Sampai di sini kita mendapatkan kesan bahwa Bapelazis merupakan sebuah lembaga amil yang di dalamnya ada nama-nama tertentu sebagai pengurusnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Secara terbuka, sebagaimana tertuang dalam AD/ARTnya, Bapelazis Kendal merupakan suatu organisasi yang beranggotakan pegawai dan guru agama di lingkungan Kandepag Kendal yang telah menyatakan kesanggupan untuk berzakat dan berinfaq melalui pemotongan gaji tiap bulan. Zakat dan infaq itu dikelola oleh sekelompok orang yang nota bene pengurus Bapelazis. Di sini jelas Bapelazis bukan (lagi) sebuah badan/lembaga amil, tetapi sebuah organisasi sosial sebagaimana (juga) tertuang dalam ARTnya. Bila demikian keadaannya, agaknya nama Bapelazis tidak tepat untuk dipertahankan. Lebih tepat misalnya bila diubah dengan nama yang secara jelas mengandung konotasi sebagai sebuah organisasi sosial tadi. Atau Bapelazis dilikuidasi saja dan selanjutnya pengelolaan ZIS diserahkan kepada Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kandepag Kendal. Posisi Bapelazis antara sebagai organisasi sosial pada umumnya dan sebagai badan/lembaga amil sepintas tidak ada beda maupun pengaruhnya. Namun sebenarnya jelas beda serta mempunyai pengaruh yang besar. Bila Bapelazis tetap sebagai organisasi sosial biasa maka selamanya ia hanya biasa mengelola dana ZIS dari anggotanya saja. Lain halnya bila berubah menjadi lembaga amil, maka Bapelazis bisa berekspansi di luar lingkungan Kandepag. Namun demikian pun tidak berarti persoalan selesai sebagaimana terungkap dalam problem kedua berikut ini.

Kedua, apabila dulu Bapelazis boleh saja menganggap dirinya sebagai lembaga dan atau badan amil, setelah diberlakukannya UUPZ dan lahirnya KMA Lama keberadaan bapelazis hanyalah sebagai LAZ. Namun, setelah terbit KMA Baru dua tahun yang lalu, Bapelazis tidak lagi mempunyai prospek untuk mempertahankan diri sebagai LAZ. Posisi yang paling mungkin dan relevan bagi Bapelazis adalah merubah diri menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Yang demikian karena sesuai UUPZ organisasi pengelola zakat adalah BAZ dan LAZ. Bapelazis tidak mungkin menjadi BAZ karena untuk itu kecuali antara lain harus ditetapkan oleh Bupati Kendal dengan prosedur-prosedur tertentu, dus kenyataannya BAZ Kendal telah terbentuk. Begitu pula Bapelazis tidak mungkin menjadi LAZ --apalagi dengan status dikukuhkan--, sebab menurut peraturan perundangan Kandepag Kendal sebagai induk Bapelazis merupakan unsur utama penopang BAZ Kendal dan lembaga-lembaga zakat yang ada pada setiap instansi terutama instansi pemerintah, termasuk Kandepag Kendal tak ada pilihan lain kecuali merubah diri menjadi UPZ.

### **C. Penggalian Potensi Zakat di Kabupaten Kendal**

Dari perspektif manajemen pengelolaan, pranata zakat mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan zakat antara lain ditempuh dengan langkah sebagai berikut : (i) muzakki secara langsung datang kepada BAZ/LAZ, (ii) melalui counter zakat, (iii) melalui UPZ, (iv) melalui pos, (v) melalui bank, (vi) melalui pemotongan gaji, dan (vii) melalui pemotongan pajak. Sedang penyaluran zakat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal

berikut : (i) penyaluran terdiri atas pendistribusian dan pendayagunaan, (ii) pendistribusian dan pendayagunaan diperuntukkan delapan ashnaf, (iii) penekanan kepada kelangsungan hidup fakir miskin, (iv) untuk menciptakan lapangan kerja, (v) memenuhi kebutuhan pokok akan makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan, (vi) sumber perekonomian untuk pemeliharaan mesjid dan kesejahteraan umat, (vii) untuk keperluan masyarakat umum (sekolah, masjid, irigasi, sumur, jalan, dan lain-lain), (viii) bantuan pendidikan berupa beasiswa da'i dan pembinaan umat Islam, dan (ix) bantuan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>55</sup>

Berikut ini akan dipaparkan mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal yang meliputi proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Data diperoleh dari Bapelurzam dan Bapelazis, karena memang dari empat organisasi pengelola zakat yang ada di Kendal hanya dua itulah yang telah berjalan efektif dan mampu mengelola dana zakat dalam jumlah yang cukup besar. Dua organisasi yang lain, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah BAZ dan Lazis NU.

#### 1. Pengumpulan Zakat

Tersedianya kader-kader muda militan selaku tenaga operasional pada setiap ranting membuat Bapelurzam berinisiatif memungut zakat dari para wajib zakat secara langsung. Para tenaga operasional itu secara *door to door* datang kepada para wajib zakat di rumah mereka. Dalam hal ini, para wajib zakat tidak begitu saja dipungut zakatnya, melainkan melalui tahapan tertentu. Mulanya wajib zakat diberi surat pemebritahuan yang isinya menyatakan bahwa Bapelurzam siap

---

<sup>55</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003), hal. 128-129.



memungut dan mengelola zakat mereka. Kecuali itu, dalam surat pemberitahuan itu juga dicantumkan jadwal dan tahapan-tahapan kegiatan berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran zakat dari awal hingga akhir. Kemudian sesuai dengan jadwal tersebut para tenaga operasional itu datang lagi kepada wajib zakat guna memungut zakatnya. Berikut ini contoh surat pemberitahuan dimaksud :

Nomor : 01/BUPZ/Cab/1999  
 Lamp. : 1 (Satu) Bendel  
 Hal : Pemberitahuan-Pengelolaan Zakat Amwal Tahun 1419 H.

Kepada yang kami hormati  
 Bapak Ibu / Saudara MUZAKKI  
 Di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai dengan amanat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri, maka Bapelurzam Kecamatan weleri tahun 1419 H siap memungut dan mengelola zakat. Adapun alokasi kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN
1	10 – 20 Ramadhan	Pemberitahuan kepada Muzakki
2	21 Ramadhan – 21 Syawal	Pemungutan zakat dari Muzakki
3	22 Syawal	Ceking I penarikan zakat amwal
4	29 Syawal	Ceking II dan persiapan tasharruf
5	10 Dzulqa'dah	Tasharruf
6	25 Dzulqa'dah	Laporan kepada Muzakki

Dengan demikian petugas operasional Amilin Ranting akan memungut Zakat Amwal Bapak / Ibu / Saudara Muzakki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami mengucapkan syukur dan terima kasih.

Billahit taufiq wal hidayah,  
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Weleri, 13 Ramadhan 1419 H  
 01 Januari 1999 M

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Mustofa  
NBM. Dalam proses

Karti Ustanto  
NBM. 829 577

Dalam kenyataannya tidak semua wajib zakat membayar zakatnya setelah didatangi oleh petugas pengumpul. Banyak para muzakki yang secara langsung dalam berbagai kesempatan menyerahkannya kepada pengurus Bapelurzam baik tenaga operasional maupun bukan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyerahkan zakatnya jauh hari sebelum tenaga oprasional menyebarkan surat pemberitahuan pengelolaan zakat.

Begitu muzakki membayar zakatnya, dalam hal ini terutama wajib zakat kategory pertama, maka yang bersangkutan mendapatkan surat tanda terima sebagai semacam kuitansi dan juga blanko isian nama calon mustahiq yang diusulkan. Setiap muzakki hanya diperbolehkan mengusulkan mustahiq maksimal empat orang. Blanko isian calon mustahiq dijadikan bahan musyawarah dalam rangka penyaluran zakat. Berikut ini contoh blanko isian calon mustahiq dan tanda terima setoran zakat.

Kepada Yth.

BAPELURZAM Cabang .....

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini saya

Nama : .....

Alamat : .....

Akan mengeluarkan / membayar Zakat Amwal, agar dikelola sebaik-baiknya.

Sebesar Rp. ....  
(.....)

Bersama ini pula saya kirimkan daftar calon mustahiq.

No.	Nama Mustahiq	Alamat Lengkap	Keterangan

Billahit taufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

....., .....H  
..... M

Muzakki,

.....

-----  
TANDA TERIMA

Telah terima dari : .....  
Alamat : .....  
Uang sebanyak : Rp. ....

(.....)  
Guna penyetoran / pembayaran Zakat Amwal.

....., .....H  
..... M

Bapelurzam Cabang .....  
Ranting .....

.....

Beberapa waktu kemudian setelah dana zakat yang terkumpul telah disalurkan (istilah Bapelurzam ditasharrufkan), para muzakki mendapatkan satu bendel buku laporan pengelolaan zakat amwal tahun yang bersangkutan. Biasanya buku laporan itu tidak hanya disampaikan kepada para muzakki saja namun juga berbagai pihak yang lain. Buku laporan itu berisi laporan mengenai jumlah dana zakat yang terkumpul, pos-pos penggunaan (baca: penyaluran), susunan amilin Bapelurzam, daftar muzakki per ranting Muhammadiyah berikut besarnya jumlah zakat masing-masing, data global mustahiq bagian konsumtif, daftar penerima zakat bagian sabilillah berikut dana zakat yang diterimakan, daftar penerima zakat bagian sabilillah untuk kategori organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, dan ortom ranting Muhammadiyah, dan data perkembangan perolehan zakat amwal dari tahun ke tahun.

Buku laporan pengelolaan zakat amwal itu dimaksudkan tidak saja untuk menjadi semacam kwitansi/tanda terima zakat bagi para muzakki, lebih dari itu juga dimaksudkan untuk meyakinkan mereka bahwa dana zakat mereka tidak salah sasaran. Dengan demikian diharapkan para muzakki akan merasa puas dan mantap dan selanjutnya pada masa mendatang akan mempercayakan pengelolaan zakatnya pada Bapelurzam. Bagi non muzakki buku laporan itu jelas dimaksudkan untuk memasyarakatkan zakat (dakwah *bil hal*) dan sekaligus untuk meminta masukan. Sedangkan bagi Bapelurzam buku laporan itu jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada umat Islam umumnya dan para muzakki khususnya di samping tanggung jawab kepada Allah SWT.

Suatu hal yang menarik adalah meskipun Bapelurzam adalah milik persyarikatan Muhammadiyah akan tetapi tidak hanya warga Muhammadiyah saja yang mempercayakan zakatnya pada Bapelurzam. Dalam kenyataannya tidak sedikit warga NU yang menitipkan zakatnya pada Bapelurzam, meskipun di NU sendiri ada lembaga amil yaitu Lazis NU. Memang data tentang warga NU yang berzakat pada Bapelurzam ini tidak bersifat tertulis, namun bersumber semata dari pengurus Bapelurzam. Dan, memang dalam daftar nama muzakki yang dirilis Bapelurzam tidak menyebutkan ormas yang diikuti oleh para muzakki. Artinya data itu tidak menyebutkan apakah muzakki itu warga NU atau Muhammadiyah.

Meskipun diakui oleh eksponennya belum berhasil, Bapelurzam Weleri beberapa langkah cukup maju bila dibandingkan dengan organisasi pengelola zakat yang lain terutama yang ada di Kabupaten Kendal. Penilaian itu secara mudah saja dapat dilakukan berdasarkan pada jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Pada tahun zakat 1425 H / 2005 M Bapelurzam Weleri berhasil mengumpulkan dan mengelola dana zakat sebesar Rp. 278.950.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau naik 13 persen dari tahun zakat sebelumnya yaitu Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Sementara itu secara keseluruhan dana yang berhasil dikumpulkan dan dikelola Bapelurzam se Kabupaten Kendal pada tahun 1425 H / 2005 M adalah 702.988.650,- (tujuh ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh

delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah). Berikut ini rincian dana zakat per cabang Muhammadiyah :<sup>56</sup>

Tabel : 13  
DAFTAR HIMPUNAN ZAKAT BAPELURZAM DAERAH KENDAL  
TAHUN ZAKAT 1425 HIJRIYAH

No.	Cabang	Dana Terhimpun	Jumlah Muzakki
1	Boja	Rp. 59.000.000,-	100
2	Brangsong	Rp. 3.345.000,-	62
3	Cepiring	Rp. 13.785.500,-	91
4	Gemuh	Rp. 18.535.000,-	38
5	Kaliwungu	Rp. 8.000.000,-	187
6	Kangkung	Rp. 75.777.500,-	350
7	Kendal	Rp. 56.587.500,-	302
8	Limbangan	Rp. 2.500.000,-	26
9	Ngampel	Rp. 2.335.000,-	9
10	Pageruyung	Rp. 14.109.600,-	120
11	Patean	Rp. 19.664.250,-	240
12	Patebon	Rp. 7.549.000,-	52
13	Pegandon	Rp. 5.914.600,-	38
14	Plantungan	Rp. 1.000.000,-	5
15	Ringinarum	Rp. 10.902.000,-	83
16	Rowosari	Rp. 67.685.700,-	363
17	Singorojo	Rp. 1.696.800,-	8
18	Sukorejo	Rp. 55.651.200,-	306
19	Weleri	Rp. 278.950.000,-	1.083
	Total	Rp. 702.988.650,-	3.463

Keberhasilan pengumpulan zakat bagi Bapelurzam bukan semata dari banyak atau meningkatnya jumlah dana yang dihimpun. Yang justru sangat diharapkan adalah peningkatan jumlah muzakki di samping jumlah dana zakatnya. Sebab, semakin banyak orang berzakat berarti semakin dekat dengan tujuan disyariatkannya pranata zakat itu sendiri.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Lembaga Amil Zakat "Badan Pelaksana Urusan Zakat Zakat Muhammadiyah" (Bapelurzam) Daerah kendal, *Laporan Zakat Tahun 1425 H*, hal. 5.

<sup>57</sup> Wawancara.

Karena merasa belum sukses dan berhasil itulah maka kecuali melakukan dakwah bil hal dengan memberikan contoh tauladan dalam berzakat, para tokoh dan pimpinan Muhammadiyah terus berusaha menggerakkan umat, terutama warga Muhammadiyah untuk berzakat dengan gerakan sadar zakat yang antara lain melalui khutbah-khutbah, penataran amil, penyuluhan dan pengajian khusus tentang zakat dalam berbagai kesempatan. Namun sayang dalam pengajian-pengajian khusus tentang zakat itu sedikit sekali para aghniya yang datang. Namun demikian upaya itu selalu dan selalu dilaksanakan tanpa kenal lelah bosan.<sup>58</sup>

Agaknya, ada beberapa “kejanggalan” berkaitan dengan konsepsi yang dipilih dan strategi yang diterapkan oleh Bapelurzam dalam hal pengelolaan zakat terutama dari sisi pengumpulan ini. Pertama, obyek zakat tidak dirinci menurut bidang atau jenisnya. Ketika para muzakki menyerahkan zakatnya pengurus tidak menanyakan jenis harta yang dizakati dan karena itu pula dalam tanda terima setoran zakat tidak ada klausul jenis harta. Yang demikian karena Bapelurzam Kendal (dan Muhammadiyah?) berpendapat bahwa zakat dipungut dari “amwal” artinya seluruh kekayaan atau istilahnya harta terpadu, bukan hanya dari harta kekayaan tertentu. Jelasnya, semua jenis harta harus dizakati. Tidak ada harta kekayaan yang terbebas dari pensucian atau pemutihan oleh zakat. Konsepsi zakat sektoral seperti pertanian, peternakan, perhiasan, perdagangan, barang tambang,

---

<sup>58</sup> Wawancara.

barang temuan/harta karun, dan profesi, demikian Bapelurzam, merupakan bagian dari sumber kemacetan pengamalan zakat.<sup>59</sup>

Kedua, tidak dipakainya standar atau batasan (*nishab*) harta kekayaan sebagaimana lazimnya. Dalam hal ini Bapelurzam mengeluarkan aturan *nishab* tersendiri yang lain daripada yang lain. Peraturan *nishab* yang digunakan oleh Bapelurzam adalah **kekayaan terpadu dikurangi hutang terpadu sama dengan plus**. Betapapun plusnya hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) saja harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Lebih jelasnya berikut ini aturan *nishab* ala Bapelurzam.

$k - h = +$  (kekayaan terpadu dikurangi hutang terpadu sama dengan sisa plus), maka memenuhi kriteria *nishab* (kaya/mampu) dan wajib zakat;

$k - h = 0$  (kekayaan terpadu dikurangi hutang terpadu sama dengan nol/tidak memiliki kekayaan), maka tidak memenuhi kriteria *nishab* dan karenanya tidak wajib zakat. Bahkan bila perlu dapat diberi zakat sebagai peringkat kedua;

$k - h = -$  (kekayaan terpadu dikurangi hutang terpadu sama dengan minus), maka termasuk fakir miskin/dlu'afa dan berhak menerima santunan/dana bimbingan ekonomi.<sup>60</sup>

Konsekwensi dari aturan *nishab* tersebut, sebagaimana tercermin dalam daftar nama muzakki, banyak sekali ditemukan besaran zakat yang dibayarkan di bawah

---

<sup>59</sup> *Zakat Kita Zakat Terapan Buku I*, (Kendal : Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, 199), hal. 4-5.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 5 dan 11.



Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).<sup>61</sup> Dalam hal ini diantara para muzakki itu terdapat para tukang becak.<sup>62</sup>

Ketiga, sebagai konsekwensi dari “kejanggalan” yang pertama kadar zakat ditentukan secara pasti 2,5 persen dari kekayaan murni tanpa melihat jenis harta kekayaan tersebut.

Keempat, cara menghitung kekayaan oleh Bapelurzam ditentukan sebagai berikut :

- Kekayaan baru / belum pernah dizakati pada tahun yang lalu dihitung 100 persen. Kekayaan yang selalu berubah/beredar seperti barang dagangan, bahan maupun hasil produksi dan lain-lain dinilai sebagai kekayaan baru;
- Kekayaan lama adalah kekayaan yang sudah pernah dizakati dan tidak pernah berubah dihitung nilai atau harga jasanya semacam sewa saja. Rumah hasil rehabilitasi dihitung nilai sewa ditambah biaya rehab. Harta lama yang harganya cukup tinggi dianjurkan untuk dinilai jasa sewanya ditambah sedikit sebagai bentuk kehati-hatian (lil ihtiyath);
- Penghasilan baru seperti gaji atau honor yang sebagian besar habis untuk kebutuhan hidup harian yang wajar dihitung kenyataan sisanya yang menjadi kekayaan meskipun tidak berujud uang, misalnya sudah berupa meubeler, kendaraan, perhiasan, biaya rehab baru dan lain-lain.<sup>63</sup>

Para muzakki diharapkan dapat menghitung sendiri kekayaan dan zakatnya dengan mengacu pada ketentuan di atas. Namun demikian, Bapelurzam terutama

---

<sup>61</sup> Baca, misalnya, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri, *Laporan Pengelolaan Zakat Amwal Periode XXVII Tahun 1425 H/2005 M*, hal. 4 – 24.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Pengurus Bapelurzam.

<sup>63</sup> *Zakat Kita*, *Op cit.*, hal. 11,

petugas operasional bisa membantu memberikan tuntunan tentang cara penghitungan harta kekayaan dan zakatnya.

Kelima, zakat (warga Muhammadiyah) harus kepada amilin (baca : Bapelurzam). Memberikan zakat secara langsung kepada mustahiqin, menurut Bapelurzam, tidak sah. Yang demikian itu bukan zakat, tetapi shadaqah atau lainnya misalnya promosi.<sup>64</sup>

Strategi pengelolaan zakat progressif tersebut agaknya didorong oleh cita-cita akan terlaksananya pranata zakat secara sukses. Karena itu seluruh perangkat baik keras maupun lunak harus dipersiapkan secara matang termasuk pemilihan konsepsi-konsepsi progressif tadi. Menurut Bapelurzam, semua aturan zakat yang berakibat pada kegagalan dan kemacetan realisasi zakat adalah batal walaupun dikatakan berdasar ayat al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang diambil pastilah tidak relevan karena terjadi kesalahan dalam penginterpretasiannya.<sup>65</sup>

Sehubungan dengan pemilihan konsepsi dan strategi perzakatan ala Bapelurzam tersebut agaknya dipahami secara berbeda, terutama oleh kalangan internal Bapelurzam itu sendiri, dalam hal ini pencetus Bapelurzam dan eksponen Bapelurzam pasca pencetus. Pencetus Bapelurzam cenderung pada pemikiran bahwa konsepsi dan strategi perzakatan ala Bapelurzam itu merupakan pilihan "darurat" di saat kondisi perzakatan sangat memprihatinkan. Maksudnya, penciptaan konsepsi dan pemilihan strategi progresif itu bukan sekedar untuk alasan praktis, simpel, kemudahan atau asal beda dari yang lain, namun

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 6 dan 11.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 5.

merupakan suatu siasat yang berorientasi pada terealisasinya pranata zakat di tengah masyarakat, terutama warga Muhammadiyah. Jadi, sejak semula pencetus Bapelurzam menyadari akan posisi konsepsi dan strategi perzakatan itu dalam perspektif hukum Islam (fiqh) dan metodologinya. Dalam pada ini, sebagaimana terangkum dalam buku panduan, para pencetus Bapelurzam mengemukakan :

“Amilin Bapelurzam harus berpendirian kokoh dan konsepsional. Namun pada situasi dan kondisi khusus dapat melakukan kebijakan fleksibel untuk tujuan realisasi zakat pada masa berikutnya. ... Haruslah dipahami bahwasanya pelaksanaan fardlu zakat tidak mungkin sekaligus sempurna seperti apa yang dikehendaki syara’, melainkan berproses dan memerlukan waktu”.<sup>66</sup>

Jika asumsi di atas dapat diterima, maka itu berarti bahwa konsepsi dan strategi perzakatan ala Bapelurzam itu bersifat situasional dan kondisional. Jika situasi dan kondisi perzakatan suatu saat berubah dan berbeda dari situasi dan kondisi ketika konsepsi dan strategi itu diciptakan, maka tidak bijaksana bila tetap mempertahankan konsepsi dan strategi tersebut.

Terhadap konsepsi dan strategi perzakatan ini para eksponen Bapelurzam saat ini mempunyai cara pandang yang berbeda dengan cara pandang pencetusnya seperti di atas. Menurut mereka, konsepsi dan strategi itu bersifat final dan diyakini kebenarannya baik secara praktis maupun teoritis dan karenanya perlu terus dipertahankan. Konsepsi dan strategi itu kecuali bersifat praktis, simpel, dan mudah dilaksanakan, juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (teologis). Namun demikian, perbedaan itu tidak tampak ke permukaan dan oleh sebab itu tidak mempunyai implikasi serius secara praktis, karena mereka “sepakat” bahwa hingga saat ini kondisi perzakatan cenderung masih seperti yang dulu.

---

<sup>66</sup> *Zakat Kita*, Op Cit., hal. 8 dan 9.

Lain Bapelurzam, lain pula Bapelazis. Pengumpulan zakat oleh Bapelazis tidak begitu menemui kendala berarti seperti yang dihadapi oleh Bapelurzam. Demikian pula strategi dan konsepsi-konsepsi perzakatan yang di dipakai oleh Bapelazis tidak seradikal yang dipakai oleh Bapelurzam. Strategi dan konsepsi yang dipakai oleh bapelazis terkesan konvensional dan datar-datar saja untuk ukuran saat ini. Yang demikian kecuali karena para wajib zakat di Bapelazis cenderung homogen (PNS), pun pula mereka terikat dengan hubungan birokratik. Artinya, berzakat dan tidak berzakat pada Bapelazis akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap nasib karir ---atau setidaknya mempengaruhi kinerja--- yang bersangkutan di lingkungan dinasnya tersebut.

Sesungguhnya pernyataan bersama tentang gerakan infaq dan zakat profesi oleh pegawai dan guru di lingkungan Kantor Departemen Agama Kendal tahun 1995 merupakan momentum yang sangat penting dan fundamental dalam perjalanan Bapelazis dalam upaya mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Bermodalkan aksi itu Bapelazis dapat mengumpulkan dana zakat profesi pegawai dan guru Kantor Departemen kabupaten Kendal melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Meskipun pembentukan dan bekerjanya Bapelazis tidak bisa dilepaskan dari gerakan bersama tersebut, tetapi tidak serta merta semua pegawai dan guru di lingkungan Kandepag Kendal bersedia dipotong gajinya untuk zakat profesi. Ada banyak alasan dikemukakan untuk mendukung penolakan itu. Atas dasar itulah maka pengurus Bapelazis sering mengeluarkan edaran kesediaan menjadi muzakki yang biasanya diformat jadi satu bersama laporan hasil pengelolaan

zakat tahun berjalan. Laporan tersebut diberikan tidak hanya kepada pegawai dan guru yang menjadi muzakki, namun juga kepada mereka yang menolak.

Pada Bapelazis tidak ada konsepsi dan strategi khusus dalam rangka mensukseskan usahanya. Semua konsep dan strategi perzakatan yang diambil bersifat konvensional. Walaupun ada yang sedikit tidak konvensional barangkali adalah model pembayaran zakatnya yang dipotongkan dari gaji tiap bulan. Dan, inilah salah satu alasan banyak guru dan pegawai menolak menjadi muzakki. Sementara bagi eksponen Bapelazis dan mereka yang menjadi muzakki, cara seperti itu hanyalah sebuah siasat (*iguh* : Jawa) untuk mempermudah pembayarannya. Dasar pemikirannya adalah daripada gaji habis setiap bulan sehingga pada akhir tahun merasa kesulitan membayar atau merasa enggan setelah melihat nominal zakatnya secara kumulatif, maka pemotongan tiap bulan bisa diartikan sebagai cicilan zakat atau setidaknya nabung untuk zakat. Toh masalah abash tidaknya zakat tidak bergantung pada adanya penyerahan secara formal. Justru yang paling menentukan adalah faktor niat dan komitmen.

Pada Bapelazis tidak ada konsepsi dan strategi khusus dalam rangka mensukseskan usahanya. Semua konsep dan strategi perzakatan yang diambil bersifat konvensional. Walaupun ada yang sedikit tidak konvensional barangkali adalah model pembayaran zakatnya yang dipotongkan dari gaji tiap bulan. Dan, inilah salah satu alasan banyak guru dan pegawai menolak menjadi muzakki. Sementara bagi eksponen Bapelazis dan mereka yang menjadi muzakki, cara seperti itu hanyalah sebuah siasat (*iguh* : Jawa) untuk mempermudah pembayarannya. Dasar pemikirannya adalah daripada gaji habis setiap bulan

sehingga pada akhir tahun merasa kesulitan membayar atau merasa enggan setelah melihat nominal zakatnya secara kumulatif, maka pemotongan tiap bulan bisa diartikan sebagai cicilan zakat atau setidaknya nabung untuk zakat. Toh masalah abash tidaknya zakat tidak bergantung pada adanya penyerahan secara formal. Justru yang paling menentukan adalah faktor niat dan komitmen.

Agaknya Bapelazis masih menghadapi kendala serius secara internal, terutama banyaknya pegawai dan guru yang menolak menjadi muzakki. Asumsi ini didasarkan pada perolehan dana zakat secara riil dari tahun ke tahun terutama pada kepengurusan periode 2001-2004. Bila dibandingkan dengan penerimaan riil dana infaq, maka terdapat selisih yang cukup berarti. Padahal potongan untuk infaq hanya 1 persen, sedangkan untuk zakat 2,5 persen. Idealnya dana zakat yang terkumpul (penerimaan) secara riil minimal dua kali lipat dana infaknya. Inilah pekerjaan rumah para pengelola Bapelazis pada masa mendatang. Berikut ini perbandingan perolehan dana infaq dan dana zakat secara riil.<sup>67</sup>

Tabel : 14

Perolehan Riil Dana Zakat Profesi dan Infaq  
Bapelazis Kandepag Kendal Tahun 2001-2004

No.	Tahun	Perolehan Riil	
		Dana Zakat Profesi (2,5 %)	Dana Infaq (1 %)
1	2001	Rp. 37.441.088,-	Rp. 63.188.446,-
2	2002	Rp. 47.749.802,-	Rp. 65.872.542,-
3	2003	Rp. 50.161.232,-	Rp. 72.736.167,-
4	2004	Rp. 46.862.719,-	??*

\* Tidak diperoleh datanya.

<sup>67</sup> Istilah penerimaan dimaksudkan dengan penerimaan yang murni dari pengumpulan tahun berjalan *an sich*. Ini untuk membedakan dari penerimaan lain non zakat dan infaq, misalnya jasa bank, setoran dana bergulir dari penyaluran zakat secara produktif tahun sebelumnya, penyisihan dari pos lain, dan sebagainya.

Dari tabel penerimaan riil dana zakat dan infaq itu dapat diasumsikan bahwa partisipasi pegawai dan guru di lingkungan Kandepag Kendal dalam berinfaq tinggi karena besarnya cuma 1 persen dari gaji. Kecuali itu, dan ini sifat dasar manusia, *tasharruf* atau penggunaan dana infaq itu itu antara lain untuk kesejahteraan bersama para pegawai dan guru tersebut. Lain halnya dengan dana zakat profesi yang kecuali besarnya 2,5 persen dari gaji juga *tasharrufnya* telah jelas dan pasti tidak untuk diri para muzaki sama sekali. Karena itu 'bisa dipahami" bila partisipasi mereka dalam berzakat lebih rendah, terlepas dari alasan yang dikemukakan.

Meskipun di instansi sendiri masih menghadapi kendala, para pengurus Bapelazis telah menggagas upaya "ekspansi" ke luar lingkungan Kandepag Kendal. Namun di sini sejumlah kendala menghadang. Kecuali faktor internal Depag tadi dan seksi penyelenggara zakat dan wakaf Kandepag Kendal selaku ujung tombak tidak siap, pun pula di hampir setiap instansi, khususnya milik pemerintah telah menyelenggarakan pengelolaan zakat dan ada pengurusnya secara definitif. Lebih dari itu bila nanti BAZ Kabupaten Kendal telah berjalan sebagaimana mestinya tidak hanya gagasan ini yang akan hilang, namun eksistensi Bapelazis itu sendiri juga terancam "terdegradasi" menjadi UPZ. Jika tidak, akan terjadi perebutan muzakki antara BAZ Kendal dan Bapelazis yang tentu saja akan merugikan semua pihak, BAZ Kendal, Bapelazis dan muzakki.

## 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Bagian pengelolaan zakat yang tidak kalah pentingnya setelah pengumpulan zakat adalah penyaluran. Arti penting penyaluran zakat tampak jelas bila ternyata

dana yang terkumpul tidak sampai kepada mustahiq atau tidak tepat sasaran. Suatu ironi bila masyarakat telah berduyun-duyun membayar zakat dan mempercayakannya kepada amil, namun setelah itu dana zakat yang besar itu menguap atau tidak sampai pada mustahiq yang benar-benar membutuhkan. Sebab, dengan demikian hal terpenting dari tujuan dan hikmah disyariatkannya zakat tidak tercapai. Seperti telah disinggung di atas, penyaluran zakat perlu memperhatikan antara lain hal-hal berikut : adanya dua pos utama yaitu pendistribusian dan pendayagunaan, penekanan pada kelangsungan hidup fakir miskin, penekanan pada upaya pembinaan umat Islam, dan penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Perlu ditekankan di sini bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada para mustahiq, baik kelompok dhu'afa maupun sabilillah secara konsumtif. Artinya pemberian dana zakat tersebut semata-mata dimaksudkan untuk keperluan sehari-hari, tidak lebih. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada para mustahiq golongan dhu'afa dengan berorientasi pada aspek produktif. Artinya pemberian zakat itu dimaksudkan agar mustahiq dhu'afa tersebut bisa memproduksi secara mandiri dengan bermodalkan dana zakat yang diterimanya, sehingga pada masa mendatang diharapkan tidak lagi menjadi mustahiq tetapi berubah menjadi muzakki. Penyaluran secara produktif ini bisa dalam bentuk modal (uang dalam jumlah cukup), alat produksi, pemberian keterampilan, atau yang lain.

Dalam hal penyaluran dana zakat ini hampir tidak ada perbedaan antara Bapelurzam dan Bapelazis. Kedua lembaga amil zakat itu mengikuti pola



penyaluran zakat ala poendistribusian dan ala pendayagunaan sekaligus, membagi para mustahiq menjadi kelompok dlu'afa dan kelompok sabilillah pada satu sisi dan pada sisi yang lain menjadi kelompok perorangan dan kelompok lembaga, menyelenggarakan musyawarah dalam menentukan pos penyaluran dan mustahiq, dan lain-lain. Di samping itu, karena faktor spesifikasi lembaga kedua organisasi pengelola zakat itu juga mempunyai ciri masing-masing yang tidak dimiliki oleh yang lain. Berikut ini uraian tentang mekanisme dan strategi penyaluran zakat oleh Bapelurzam dan Bapelazis.

Di Baperlurzam ada ketentuan baku bahwa 15 persen dari dana zakat yang terkumpul merupakan hak kelola amilin Bapelurzam Atasan (Daerah, Wilayah dan Pusat) dan harus disetorkan begitu masa pengumpulan selesai. Perinciannya adalah 10 persen untuk Bapelurzam Daerah, 3 persen untuk Bapelurzam Wilayah dan sisanya 2 persen untuk Bapelurzam Pusat. **Ketentuan ini bersifat pasti dan tidak bisa dirubah melalui keputusan pleno gabungan tingkat cabang dengan dalih dan alasan apapun.** Amilin atasan mengelola bagian yang 15 persen itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup wilayah kerjanya masing-masing.

Hak kelola yang dimiliki Bapelurzam Cabang yang sebesar 85 persen, selanjutnya untuk memudahkan tasharrufnya dibulatkan menjadi (dianggap) 100 persen. Penyalurannya diperuntukkan pada delapan ashnaf (golongan manusai) yang dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok dlu'afa, yang terdiri dari fakir, miskin, orang yang terlilit utang, untuk memerdekakan budak, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Kedua, kelompok

sabilillah, yang terdiri dari pengurus zakat, orang yang dibujuk hatinya, dan untuk jalan Allah.

Dalam menentukan siapa-siapa yang akan mendapatkan bagian zakat diadakan musyawarah pleno gabungan yang melibatkan personalia Bapelurzam, pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, dan ulama atau tokoh masyarakat. Bila dianggap perlu biasanya menghadirkan pula Bapelurzam Daerah. Yang demikian ini sangat diperlukan karena terlalu banyaknya calon mustahiq yang diusulkan oleh para muzakki dan proposal yang diusulkan pengurus-pengurus ranting Muhammadiyah serta untuk menghindari terjadinya fitnah di kemudian hari.

Dahulu dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat muslim normal, kedua kelompok besar tersebut diawasi seimbang, sama-sama penting, tak ada yang lebih atau kurang penting untuk diurus, disantuni dan dibina. Karena itu masing-masing kelompok mendapatkan alokasi seimbang yakni fifty-fifty atau 50 berbanding 50. Namun bila kondisi darurat maka dapat diambil kebijakan khusus, misalnya ada bencana alam maka perbandingannya bisa saja 90 berbanding 10 dengan catatan bagian yang banyak untuk kelompok dlu'afa. Sebaliknya, bila kondisi darurat itu menuntut diprioritaskannya pos sabilillah, misalnya untuk menyelamatkan tanah dari gerakan salibiyah (baca : kristenisasi) maka dimungkinkan 80 persen untuk sabilillah dan 20 persen untuk dlu'afa.

Dari 50 persen untuk pos sabilillah, untuk amilin diperkirakan 10 persen yang dipergunakan untuk biaya operasional pengelolaan zakat antara lain administrasi, akomodasi, konsumsi, sewa ongkos/upah, honorarium amilin dan lain-lain yang rasional, dan boleh diubah ke arah yang positif. Sedang 40 persen

sisanya dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebagai pelaksana dakwah di semua aspek.

Sementara itu dari 50 persen jatah dlu'afa, sesuai dengan tujuan zakat yaitu pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, maka tasharrufnya diatur dan diarahkan demikian :

- Bila kondisi sosial ekonomi normal, maka untuk dlu'afa konsumtif sebesar 15 persen dan untuk dlu'afa produktif sebesar 35 persen;
- Bila keadaan darurat pola pembagian berbalik, artinya untuk dlu'afa konsumtif 35 persen dan untuk dlu'afa produktif sebesar 15 persen;
- Dalam kondisi normal yang mungkin karena tuntutan (baca : usulan) para muzakki, maka untuk dlu'afa konsumtif maksimal 25 persen;
- Tasharruf bagi dlu'afa konsumtif berupa uang tau bahan makanan yang diberikan secara langsung kepada mereka dengan kalsifikasi tertentu, misalnya kelas A sekian rupiah, kelas B sekian rupiah dan seterusnya;
- Tasharruf bagi dlu'afa produktif berupa uang modal kerja atau alat produksi dan diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan keahliannya. Tidak seperti tasharruf bagi dlu'afa konsumtif, tasharruf bagi dlu'afa produktif ini bersifat pinjaman tanpa bunga. Pembayaranannya dilakukan secara mencicil selama 10 bulan dan cicilan pertama dibayarkan pada bulan ketiga, sehingga boleh dibilang waktu pengembaliannya adalah satu tahun. Dari tasharruf dlu'afa produktif ini diharapkan dua sampai lima tahun ke depan si mustahiq sudah mentas secara ekonomi dan selanjutnya menjadi muzakki;

- Pengelolaan terhadap angsuran dan kebijakan terhadap dlu'afa produktif dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang dalam hal ini di bawah Majelis Ekonomi. Setelah angsuran oleh peminjam pertama selesai, maka Muhammadiyah dapat memberi pinjaman kepada dlu'afa produktif yang lain. Dengan sistem ini dalam jangka waktu sepuluh hingga dua lima tahun akan terkumpul modal kerja dlu'afa produktif yang cukup besar.

Belakangan ini pengelompokan tidak lagi menjadi dua, namun tiga yaitu dlu'afa, sabilillah, dan dlu'afa sabilillah. Pengelompokan itu dimaksudkan hanya untuk memperjelas posisi salah satu ashnaf yang ada sesuai dengan kondisi kekinian dan karena itu tidak sampai merubah jumlah ashnaf menjadi lebih dari yang telah ditentukan. Di sini yang masuk kelompok dlu'afa sabilillah adalah para siswa dan mahasiswa berbakat dan berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka ini mendapatkan beasiswa studi dari dana zakat dalam rangka kaderisasi dalam Persyarikatan Muhammadiyah di masa mendatang dan pengelolaannya dilakukan oleh Majelis Pendidikan Muhammadiyah.<sup>68</sup>

Dengan demikian formulasi pengalokasian dana zakat Bapelurzam adalah sebagai berikut. Dlu'afa sebesar 35 persen atau 45 persen, dlu'afa sabilillah (beasiswa) sebesar 15 persen atau 10 persen, dan sabilillah sebesar 50 persen atau 45 persen. Bagian dlu'afa setelah dibulatkan menjadi 100 persen untuk dlu'afa konsumtif sebesar 30 persen dan dlu'afa produktif sebesar 70 persen. Sedangkan

---

<sup>68</sup> *Zakat Kita*, *Op cit.*, hal. 12-15.

bagain sabilillah peruntukannya adalah amilin 10 sampai 20 persen dan sabilillah terpadu 80 sampai 90 persen.

Namun, dalam prakteknya pos beasiswa itu masuk dalam pos untuk sabilillah. Dan memang semua ketentuan itu bersifat normative dan dalam banyak hal tidak memberikan definisi yang jelas pada setiap ashnaf yang ada. Karena itu dalam kenyataannya mekanisme penyaluran zakat di Bapelurzam bersifat fleksibel dan kondisional. Di bawah ini penulis akan memaparkan mekanisme penyaluran zakat yang diterapkan pada tahun zakat 1424 H dan tahun 1425 H. Pemaparan mekanisme penyaluran secara normatif dan kemudian diikuti mekanisme yang diterapkan secara riil ini dimaksudkan untuk melihat seberapa konsisten Bapelurzam mempedomani “aturan main” yang telah digariskan oleh organisasi (di atasnya).

Pada tahun zakat 1424 H Bapelurzam Weleri berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Dikelola Bapelurzam Atasan (Pusat, Wilayah dan daerah) sebesar 15 persen atau Rp. 37.050.000,- (tiga puluh juta lima puluh-ribu rupiah). Dikelola Bapelurzam cabang Weleri sebesar 85 persen atau Rp. 209.950.000,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Berikut ini perincian tasharrufnya :

Tabel : 15

Data Penyaluran Dana Zakat Bapelurzam Weleri  
Tahun 1424 H

No.	Ashnaf	Alokasi	Prosentase
1	Fakir-Miskin	Rp. 97.626.750,-	46,5 %
2	Amil	Rp. 12.597.000,-	6 %
3	Muallaf	Rp. 2.099.500,-	1 %

No.	Ashnaf	Alokasi	Prosentase
4	Riqab	Rp. 2.099.500,-	1 %
5	Gharim	Rp. 6.298.500,-	3 %
6	Sabilillah	Rp. 83.980.000,-	40 %
7	Ibnu Sabil	Rp. 5.248.750,-	2,5 %
	Total	Rp. 209.950.000,-	100 %

Selanjutnya pada tahun 1425 H Bapelurzam Weleri berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 278.950.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Dikelola Bapelurzam Atasan (Pusat, Wilayah dan daerah) sebesar 15 persen atau Rp. 41.842.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dikelola Bapelurzam cabang Weleri sebesar 85 persen atau Rp. 237.107.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Berikut ini perincian tasharrufnya :

Tabel : 16

Data Penyaluran Dana Zakat Bapelurzam Weleri  
Tahun 1425 H

No.	Ashnaf	Alokasi	Prosentase
1	Fakir-Miskin	Rp. 118.553.750,-	50,5 %
2	Amil	Rp. 13.040.913,-	5,5 %
3	Muallaf	Rp. 1.185.538,-	0,5 %
4	Riqab	Rp. 1.185.538,-	0,5 %
5	Gharim	Rp. 4.742.100,-	2 %
6	Sabilillah	Rp. 93.657.463,-	39,5 %
7	Ibnu Sabil	Rp. 4.742.150,-	2 %
	Total	Rp. 237.107.500,-	100 %

Makna substansial yang didapat dari dua tabel tasharruf dana zakat itu adalah bahwa bagian dana zakat untuk kelompok dlu'afa lebih dari 50 persen (yakni 53 persen pada tahun 1424 H dan 54,5 persen pada tahun 1425 H) dan bagian dana zakat untuk kelompok sabilillah adalah kurang dari 50 persen (yakni

47 persen tahun 1424 H dan 45,5 persen tahun 1425 H). Selisih antara kedua kelompok tersebut adalah antara 6 sampai 9 persen. Namun demikian boleh dibilang bahwa kedua pola pembagian itu masih mendekati pola fifty-fifty yang berarti bahwa kondisi sosial ekonomi pada dua tahun berjalan ini menurut penilaian Bapelurzam adalah normal.

Hingga di sini apa yang ambil oleh pengurus Bapelurzam pada dua tahun zakat tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari pedoman praktis. Namun selanjutnya tidak demikian. Bagian fakir miskin yang diberikan secara produktif pada tahun 1424 H hanya Rp 13.776.750,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau hanya 14,1 persen dari keseluruhan bagian fakir miskin sebesar Rp. 97.626.750,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian dari keseluruhan bagian fakir miskin sebesar Rp. 118.553.750,- (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tahun zakat 1425 H yang ditasharrufkan secara produktif hanya Rp. 10.003.750,- (sepuluh juta tiga ribu tujuh ratus-lima puluh rupiah) atau 8,4 persen. Ini jelas sangat “menyimpang” dari petunjuk yang “ditetapkan” sebagaimana dikemukakan di atas pun pula jauh dari semangat memberdayakan masyarakat ekonomi lemah.

Memang dana zakat bagian fakir miskin produktif telah cukup banyak yang merupakan kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya, karena berstatus “pinjaman modal” bagi fakir miskin. Sehingga dari tahun ke tahun selalu bertambah. Hanya saja pengelolaan dana zakat produktif itu tidak dilaksanakan oleh Bapelurzam tetapi Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Bapelurzam hanya

menentukan besarnya dan kemudian secara penuh menyerahkannya kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang selanjutnya didelegasikan kepada Majelis Ekonomi. Karena itu mengenai besarnya angka dana zakat produktif pada saat ini, siapa-siapa saja yang menjadi mustahiq, berapa mustahiq yang telah dientaskan secara ekonomi dari program zakatnya ini, dan sebagainya tidak masuk dalam laporan pertanggung jawaban Bapelurzam. Sehingga di sini ada kesan “tertutup” dan tidak transparan, suatu kondisi yang sangat dicela dan ingin dihindari oleh Bapelurzam.<sup>69</sup>

Dari seluruh penerima dana zakat, baik pada tahun 1424 H maupun tahun 1425 H tidak ada perincian daftar nama mustahiq kecuali yang menerima dari bagian pos sabilillah dan amilin. Di sinipun hanya sabilillah yang nota bene lembaga saja yang disebutkan secara rinci beserta jumlah nominal penerimaannya. Sedangkan nama mustahiq sabilillah individual, demikian pula para mustahiq fakir miskin baik konsumtif maupun produktif, muallaf, riqab, gharim, dan ibnu sabil tidak disebutkan kecuali jumlah nominal perorang (kualitas) dan jumlah orangnya (kuantitas) serta asal rantingnya.

Penyebutan nama mustahiq memang menurut kebanyakan orang dpandang tidak etis, karena berkaitan dengan harga diri dan kehormatan. Barangkali karena alasan inilah bapelurzam tidak memuat nama para mustahiq, kecuali yang berstatus lembaga. Dari laporan pengelolaan zakat baik tahun zakat 1424 H maupun 1425 H terlihat bahwa hanya lembaga-lembaga yang berada dibawah

---

<sup>69</sup> Ketiadaan informasi ini karena penulis tidak pernah berpikir bahwa mekanismenya terpisah seperti tersebut. Ketika penulis bertemu dengan para tokoh Bapelurzam pada tanggal 4 Juni 2005 guna wawancara, Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah tidak hadir dalam forum tersebut. Sementara mereka yang hadir, yaitu H. Muslim, H. Rubaidi, H. Su'ud Nasroh dan H. Solikhin tidak bisa memberikan penjelasan secara detail.



ormas Muhammadiyah saja yang mendapatkan alokasi dana zakat, baik dari pos sabilillah individu maupun lembaga. Para mustahiq individu yang menerima dana zakat adalah guru-guru non PNS yang mengajar di beberapa lembaga pendidikan milik Persyarikatan Muhammadiyah, operasional tabligh, dan guru ngaji (termasuk guru Taman Pendidikan al-Qur'an). Sedangkan lembaga yang mendapatkan bagian dana zakat dari pos sabilillah adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah, organisasi otonom (ortom) dan amal usaha yang ada di bawah koordinasinya seperti seluruh ortom ranting, PC Aisyiyah Weleri, PC Pemuda Muhammadiyah Weleri, PC Nasyiatul Aisyiyah Weleri, PC Ikatan Remaja Muhammadiyah Weleri, beberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah dan lain-lain.<sup>70</sup>

Mekanisme penyaluran zakat seperti tersebut di atas juga diterapkan oleh Bapelazis. Hanya saja Bapelazis tidak "memaksakan" penyaluran pada delapan ashnaf konvensional tetapi mencukupkan secara permanen pada lima saja, yaitu fakir, miskin, amil, sabilillah dan ibnu sabil.<sup>71</sup> Barangkali, menurut Bapelazis, tidak semua ashnaf itu ada pada saat ini. Golongan riqab, gharim, dan muallaf dengan segala variasinya masing-masing sulit didapatkan pada kondisi sekarang.

Alokasi dana zakat secara konstan dari tahun 2001 sampai 2003 adalah fakir miskin 40 persen, sabilillah 45 persen, ibnu sabil 10 persen dan amil 5 persen. Sedangkan pada tahun 2004 formulasinya adalah fakir miskin 30 persen, sabilillah 55 persen, ibnu sabil 10 persen dan amil 5 persen. Pos fakir miskin terdiri dari

---

<sup>70</sup> Disarikan dari hasil wawancara dan "Laporan Pengelolaan Zakat" tahun 1424 H dan 1425 H.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Drs. H. khairuddin, M.Si. dan Laporan Pertanggung Jawaban Bapelazis Periode 2001-2004.

pola konsumtif dan produktif dengan perbandingan variatif sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 2001, 2003 dan 2004 perbandingannya adalah 50 berbanding 50 atau fifty-fifty, sedangkan tahun 2002 perbandingannya adalah 37,5 berbanding 62,5 dengan catatan yang besar untuk pos produktif.

Penyaluran dana zakat bagian fakir miskin pola konsumtif berupa sembako dengan nominal masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan penyaluran dana zakat bagian fakir miskin pola produktif bersifat pinjaman bergilir tanpa bunga. Di sini peminjaman dikoordinir oleh KUA-KUA yang ada dengan memperhatikan prioritas wilayah pada suatu tahun tertentu. Lama angsuran 12 kali atau satu tahun, dimana hanya 10 angsuran saja yang kembali pada Bapelazis sebagai dana abadi zakat sedangkan sisanya yang 2 kali dibagi masing-masing untuk peminjam dan pengelola.<sup>72</sup>

Berbeda dengan pola yang ada di Bapelurzam, pengelolaan dana zakat bagian fakir miskin produktif dilakukan oleh Bapelazis sendiri. Karena itu pengelolaan dana zakat setiap tahunnya tidak hanya terhadap dana zakat yang berhasil dikumpulkan pada tahun tersebut tetapi juga dari pos yang lain misalnya dari angsuran modal bergilir, sisa tahun sebelumnya, jasa dari koperasi, jasa dari bank dan penyisihan dari dana infaq. Hanya saja seperti di Bapelurzam, di Bapelazis juga tidak ada catatan atau laporan tentang perkembangan mustahiq

---

<sup>72</sup> Di sini penulis tidak mendapatkan penjelasan apakah pengelola ini bersifat personal/individu atau lembaga. Agaknya, bila melihat ART Bapelazis, bagian 1 kali angsuran itu untuk pengelola selaku individu sebagai bentuk insentifnya. Lihat: Pasal 10 poin (4) ART Bapelazis.

penerima pinjaman tersebut dan demikian pula data tentang jumlah akhir modal bergilir yang ada pada para peminjam.<sup>73</sup>

#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggalan Potensi Zakat di Kabupaten Kendal**

Pengelolaan zakat, terutama penggalan potensinya di Kabupaten Kendal secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor penunjang dan penghambat. Belum bekerjanya BAZ Kendal dan Lazis NU ada sebabnya. “Kesuksesan” Bapelurzam dan Bapelazis dengan segala “kekurangannya” juga karena ada sebabnya. Persoalannya adalah bahwa suatu faktor tertentu bagi sebuah lembaga pengelola merupakan penunjang pengelolaan zakat. Namun pada saat yang bersamaan bagi lembaga pengelola zakat yang lain ia merupakan penghambat. Di sini timbul kesulitan, apakah ia termasuk faktor penunjang atau faktor penghambat? Dalam hal ini penulis cenderung bersikap kompromistis. Artinya faktor tersebut akan penulis kelompokkan pada faktor-faktor penunjang maupun penghambat secara sekaligus. Hanya saja penulis perlu menjelaskannya berdasarkan konteksnya masing-masing. Berikut ini akan dipaparkan secara umum beberapa hal yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal berdasarkan pola pikir di atas.

##### **1. Faktor Penunjang**

Beberapa hal berikut merupakan faktor-faktor penunjang penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal. **Pertama**, pribadi pengelola zakat. Dalam hal ini

---

<sup>73</sup> Wawancara dan Laporan Pertanggung Jawaban, *Op cit.*

pengelola zakat tidak hanya mengharapkan orang lain mau berzakat, tetapi dia sendiri pun harus terlebih dahulu berzakat, memberikan contoh bagi yang lain. Yang demikian terjadi di Bapelurzam Weleri. Dari daftar muzakki yang ada dalam laporan pengelolaan zakat tahun 1424 H dan 1425 H terlihat tokoh-tokoh seperti H. Muslim, H. Solikhin, Drs. H. Musthofa, Mulyono Syafa'at, M. Nuri, H. A. Rubaidi, Bc. Hk. dan lain-lain merupakan tipe pimpinan yang tidak hanya gambar-gembor menyuarakan pentingnya berzakat, namun juga pembayar zakat yang aktif dengan kadar yang cukup fantastis.

Kecuali memberikan contoh dalam berzakat, pengelola zakat terutama tenaga operasional di lapangan juga mempunyai sikap militansi yang tinggi. Sikap militansi itu tidak tumbuh begitu saja, akan tetapi lewat pembinaan yang kontinyu dan terus menerus. Kesulitan yang ditemui dalam pengelolaan, khususnya dalam proses pengumpulan zakat dapat diatasi karena semangat yang menggebu-gebu dalam menegakkan syari'at Islam dan upaya menciptakan masyarakat yang makmur berkeadilan dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Sikap militansi itu tampak, misalnya, ketika berkali-kali didatangi di rumahnya muzakki tidak ada. Demikian seterusnya sampai ketemu dan yang bersangkutan membayarkan zakatnya. Bila tidak karena semangat yang tinggi tentu para petugas itu akan enggan mendatangnya lagi; entah karena putus asa, malu, atau malas. Begitu pula sikap militansi itu ditunjukkan lewat upaya sosialisasi pada berbagai kesempatan, misalnya khutbah-khutbah jum'at, pelatihan-pelatihan tentang zakat, ceramah-ceramah khusus zakat dan lain sebagainya.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara.

**Kedua**, faktor dukungan dari yang punya “wewenang atau kuasa”. Hal ini tampak sekali pada Bapelazis. Karena keberadaan Bapelazis dibentuk dan pengurusnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, maka berduyun-duyun para pegawai dan guru di lingkungan tersebut menyatakan kesanggupan sebagai muzakki melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Agaknya, wibawa Kepala Kandepag selaku pejabat tertinggi instansi Departemen Agama tingkat Kabupaten cukup besar. Dan kenyataannya semua pejabat di Kandepag seia sekata mendukung suksesnya pengelolaan zakat di sana.<sup>75</sup>

**Ketiga**, faktor wajib zakat. Sukses atau tidaknya pengelolaan zakat jelas tidak bisa dilepaskan dari faktor wajib zakat. Betapapun pengelola berusaha sekuat tenaga, banting tulang, mandi keringat bila tidak ada respon dari wajib zakat pasti tidak akan ada hasilnya. Hanya saja faktor ketiga ini musti disebut terakhir karena biasanya bersikap pasif dan menunggu, di samping intensitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor pengelola. Kalaupun ada yang aktif dan punya inisiatif untuk mendatangi pengelola, maka kecuali jumlah yang demikian itu tidak banyak pun pula sikap itu merupakan respon, bukan terjadi begitu saja tanpa adanya aksi dari faktor pengelola atau pihak lain.

## 2. Faktor Penghambat

Kecuali faktor penunjang, ada juga beberapa faktor yang menghambat penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal. Bahkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, faktor-faktor penghambat itu jauh lebih besar dan beraneka ragam macamnya. **Pertama**, faktor pengelola. Rendahnya tingkat kualitas diri

---

<sup>75</sup> Wawancara.

maupun kuantitas para pengelola zakat terutama tenaga operasionalnya jelas merupakan masalah yang utama dan pertama dalam penggalan/pengelolaan zakat. Dimaksudkan dengan rendahnya kualitas diri pengelola zakat adalah tiadanya gairah, semangat, keseriusan, dan militansi karena tiadanya keuntungan atau manfaat secara materi (baca : gaji atau upah yang layak) yang diperoleh dari aktifitas pengelolaan zakat ini dan juga tiadanya visi zakat pada dirinya. Dimaksudkan dengan rendahnya kuantitas para pengelola zakat adalah tidak tersedianya tenaga operasional dan professional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat. Yang demikian terjadi pada semua organisasi pengelola zakat, terutama Lazis NU, BAZ Kendal dan Bapelazis. Di Bapelazis terjadi karena lembaga amil zakat ini *nebang* pada instansi pemerintah yang organnya juga para pegawai di instansi tersebut. Para eksponen di sana masih terpengaruh oleh suatu asumsi dasar bahwa keberadaan mereka di sana untuk “bekerja” bukan untuk beramal. Makanya ketika mereka mengelola zakat di instansi tersebut dan ternyata tidak ada imbalannya, yang terjadi adalah kerja setengah-setengah.<sup>76</sup> Di Lazis NU yang *notabene* berada di bawah organisasi sosial kemasyarakatan non pemerintah para eksponennya bukanlah tipe para pekerja keras dengan visi dan semangat yang tinggi, tetapi kebanyakan tipe para pemikir dan orang-orang yang terlalu sibuk (atau menyibukkan diri?) karena banyaknya aktifitas keseharian. Sementara itu di BAZ Kendal sebagai organisasi pengelola zakat yang para eksponennya

---

<sup>76</sup> Wawancara. Yang demikian tampak sekali ketika penulis datang untuk melihat dan meminjam dokumen-dokumen Bapelazis. Dokumen-dokumen itu sebenarnya cukup lengkap dan komplit, namun keberadaannya berserakan di mana-mana belum tertata secara rapi. Staf yang menangani dokumen-dokumen itu juga tidak ada. Bahkan ketika penulis meminta tolong untuk dicarikan, respon yang diperlihatkan sangat tidak ramah dan terkesan enggan serta malas. Kondisi demikian sangat berlawanan dengan sikap para pejabat yang penulis temui. Yang terakhir ini terkesan sangat ramah, familier, dan suka membantu.

terdiri dari para individu dengan berbagai latar belakang ormas, strata sosial, ekonomi, pendidikan, profesi, serta didominasi oleh person-person yang masuk ke struktur kepengurusan lebih dikarenakan jabatan dinasnya, bukan oleh kapasitas diri dan visi zakatnya, para pengurus itu tidak bisa bekerja sama sekali. SK pembentukan tinggalah SK; teronggok di file dan tidak banyak diketahui bahkan oleh beberapa tokoh yang namanya tercantum.

**Kedua,** faktor penguasa dan pihak yang punya wewenang.. Tidak jalannya kepengurusan BAZ jelas tidak bisa dilepaskan-dari faktor penguasa (baca : Bupati dan Wakil Bupati) yang agaknya tidak mempunyai perhatian dan visi yang jelas tentang zakat. Atau setidaknya kondisi perpolitikan di Kendal yang tidak kondusif, dalam hal ini terefleksikan dalam sikap dan perilaku para penguasa, juga berpengaruh terhadap kondisi tidak bekerjanya BAZ. Para penguasa itu suka membawa “persaingan” di bidang politik masuk ke bidang sosial kemasyarakatan yang sebetulnya berkaitan erat dengan tugas pelayanan publik yang harus mereka emban. Demikian pula tidak jalannya Lazis NU juga karena faktor eli NU yang tidak punya visi dan komitmen dalam pengelolaan zakat. Mereka terkesan cuek dan tidak mau tahu atau setidaknya menganggap remeh persoalan zakat.

**Ketiga,** faktor wajib zakat. Dalam hal ini pemahaman masyarakat, terutama wajib zakat tentang pranata zakat dan pengetahuannya masih memprihatinkan. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui adanya zakat mal. Yang mereka ketahui hanyalah zakat fitrah. Karena itu selama ini mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah tidak lebih. Atau mereka tahu ada zakat mal, namun mereka merasa tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya karena menurutnya kekayaan mereka

itu tidak wajib dizakati. Atau mereka tahu ada zakat mal dan membayarkannya rutin tiap tahun kepada tetangga kanan kiri, kerabat dan kiyahi dengan alasan karena tradisi, ewuh pakewuh, menghilangkan kesan bakhil pada masyarakat sekitar dan lain-lain.<sup>77</sup>

**Keempat**, faktor tokoh masyarakat/kiyahi. Diakui atau tidak keberadaan kiyahi di Kabupaten Kendal terutama di wilayah-wilayah berbasis NU sangat dominan dan penting, meskipun tidak seperti dulu lagi. Arti penting dan dominannya peran kiyahi itu tampak sekali pada bidang sosial keagamaan, termasuk di dalamnya pranata zakat. Namun, sebagian besar dari mereka masih berpikiran konserfatif terutama berkenaan dengan obyek zakat. Sedangkan kaitannya dengan pengelolaan dan organisasi pengelola zakat hampir semua kiyahi setuju, baik secara mutlak maupun bersyarat.<sup>78</sup>

**Kelima**, faktor kelembagaan dan biaya operasional organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola yang ada saat ini bersifat sektarian, artinya mereka berbasis pada organisasi massa tertentu dan membatasi juga pada warga ormas tersebut baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan, meskipun bagi sebagian lembaga pengelola zakat (baca : Lazis NU) baru sebatas rencana.<sup>79</sup> Memang ada “kasus” lintas ormas dalam ketiga aktifitas perzakatan itu,

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan para wajib zakat.

<sup>78</sup> Wawancara dengan beberapa kiyahi berpengaruh dari berbagai desa, kelurahan dan kecamatan. Lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada sub bahasan inspirasi.

<sup>79</sup> Orientasi sektarian ini memang tidak harus divonis negatif, karena bisa saja justru dengan begitu akan ada semangat berkompetisi secara sehat antara organisasi pengelola itu. Sehingga semua organ yang ada bekerja secara penuh karena adanya semangat berkompetisi tersebut. Cuma tidak bisa dipungkiri, bahwa ketika kita berupaya membangun kebersamaan mengapa mesti pengkotakan itu selalu dibawa-bawa? Mengapa “perbedaan” identitas itu selalu ditonjolkan?



namun informasi itu hanya bersifat lisan yang agaknya kurang didukung oleh fakta di lapangan. Atau barangkali memang ada dan terjadi, tetapi satu dua saja.

Setiap organisasi pengelola zakat selalu “mengeluhkan” tidak tersedianya dana operasional. Bapelurzam, Bapelazis maupun Lazis NU mempunyai kendala soal dana operasional ini baik untuk pengadaan sarana prasara kerja maupun untuk upah atau gaji tenaga operasionalnya. Hampir sama dengan pajak masa pengumpulan zakat itu tidak sekali kerja selesai. Perlu waktu lama sejak dari perencanaan sampai penyampaian laporan pelaksanaan. Perlu banyak tenaga dan pikiran untuk mendapatkan hasil yang maksimal, apalagi ketika pola pengumpulannya adalah pola jemput bola. Jelas butuh energi dan sikap mental yang lebih dalam melaksanakannya. Namun demikian, “bisyarah” (insentif) yang diterima oleh para tenaga operasional itu selama masa kerja tiga bulan hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).<sup>80</sup>

#### **E. Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat di Kabupaten Kendal**

Dari uraian terdahulu terutama tentang penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal yang pada tahun 2004 Bapelurzam Kendal berhasil mengumpulkan dan mengelola dana zakat sebesar Rp. 702.988.650,- (tujuh ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Bapelazis mengumpulkan dan mengelola dana zakat sebesar Rp. 46.862.719,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), sehingga total hanya Rp. 759.851.369,- (tujuh ratus lima puluh

---

<sup>80</sup> Kasus di Bapelurzam Weleri, sedangkan di Bapelazis penulis tidak mendapatkan informasi yang detail mengenai itu.

sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), maka terlihat bahwa dana zakat yang terkumpul dan dikelola kedua lembaga/badan tersebut hampir tidak ada artinya bila dibandingkan dengan jumlah keluarga yang berhak mendapatkan bagian zakat di Kabupaten Kendal yang jumlahnya mencapai 125.483. Apalagi dari dana zakat yang terkumpul itu tidak seluruhnya ditasharrufkan untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dalam artian pemberian secara produktif.

Namun demikian tidak dengan serta merta dapat diartikan bahwa potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal tidak ada atau nihil, tidak. Persoalannya tidak sesederhana itu. Ada banyak hal terkait yang tidak bisa diabaikan untuk dapat mengambil kesimpulan secara tepat. **Pertama**, secara riil badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal tidak hanya Bapelurzam dan Bapelazis. Benar hanya kedua badan/lembaga pengelola zakat tersebut yang lingkup kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Kendal, akan tetapi di sana banyak sekali terdapat badan/lembaga pengelola zakat yang dapat bekerja secara aktif meskipun keberadaannya tidak semuanya bersifat permanen dan lingkup kerjanya relatif sempit sebatas satu desa/kelurahan, misalnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa dana zakat yang terkumpul dan dikelola oleh keseluruhan badan/lembaga pengelola zakat yang ada tentu lebih besar lagi dari yang dikumpulkan dan dikelola oleh Bapelurzam dan Bapelazis.

**Kedua**, walaupun toh, misalnya, jumlah badan/lembaga pengelola zakat yang beroperasi di Kabupaten Kendal terbatas, sekali lagi, tidak serta merta dapat diartikan bahwa potensi zakat di Kabupaten Kendal nihil. Sebab, dari 67 wajib

zakat yang menjadi responden 49 orang atau 73 persen diantaranya telah membayar zakatnya secara kontinyu setiap tahun. Kemudian dari sejumlah itu hanya 1 orang atau 1,5 persen saja yang menyerahkan zakatnya pada lembaga/badan pengelola zakat, sedangkan lainnya sejumlah 48 orang atau 71,6 persen membayarkannya secara langsung kepada para mustahiq. Berikut ini beberapa tabel tentang wajib zakat di Kabupaten Kendal.

Tabel : 17  
Wajib Zakat di Kabupaten Kendal  
yang Sudah Maupun Belum Menunaikan Zakatnya

NO	PELAKS. ZAKAT	WAJIB ZAKAT	%	KETERANGAN
1	Sudah/rutin	49	73	* Wajib zakat yang belum berzakat itu terdiri dari mereka yang secara eksplisit mengaku belum berzakat dan mereka yang menjawab hanya mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kg beras
2	Kadang-kadang	3	4,5	
3	Belum*	14	21	
4	Diam	1	1,5	
	Jumlah	67	100	

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas wajib zakat di Kabupaten Kendal telah menunaikan zakatnya. Bila secara keseluruhan jumlah wajib zakat di Kabupaten Kendal ada 119.141 orang, maka berarti ada sekitar 86.973 orang yang telah menunaikan kewajiban zakatnya. Angka 119.141 adalah jumlah keluarga di Kabupaten Kendal yang masuk dalam kategori sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus.<sup>81</sup>

Tabel 18 :  
Wajib Zakat (Muzakki) di Kabupaten Kendal  
Berdasarkan Besaran Zakat yang Dibayarkan Tahun 2004

NO	BESARAN ZAKAT	MUZAKKI	%	KETERANGAN
1	s.d. Rp. 50.000,-	3	6,12	Muzakki yang membayarkan

<sup>81</sup> Lihat catatan kaki nomor 16 bab ini.

2	s.d. Rp. 100.000,-	3	6,12	zakat antara Rp. 50.000,- dan Rp. 500.000,- terdiri dari petani, karyawan swasta dan PNS. Sedangkan muzakki yang zakatnya antara Rp 1.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000,- adalah wiraswasta/pedagang. Sementara itu muzakki yang hanya menyebut prosentase atau tidak menyebutkan besaran zakat sama sekali adalah karyawan swasta, PNS dan wiraswasta/pedagang.
3	s.d. Rp. 200.000,-	8	16,33	
4	s.d. Rp. 300.000,-	6	12,24	
5	s.d. Rp. 400.000,-	-	-	
6	s.d. Rp. 500.000,-	2	4,08	
7	s.d. Rp. 1.000.000,-	3	6,12	
8	s.d. Rp. 5.000.000,-	1	2,04	
9	s.d. Rp. 10.000.000,-	1	2,04	
10	Menyebut prosentase	19	38,78	
11	Tdk menyebutkan	3	6,12	
	JUMLAH	49	100	

Bila angka-angka itu dimasukkan dalam perhitungan jumlah wajib zakat yang telah menunaikan zakatnya (muzakki) sebanyak 86.973 orang dan untuk muzakki yang tidak menyebutkan zakatnya dianggap membayar dalam perhitungan minimal yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jumlah dana zakat yang telah dibayarkan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Tabel : 19  
Perhitungan Dana Zakat di Kabupaten Kendal Tahun 2004

NO	BESARAN ZAKAT	MUZAKKI	ZAKAT TERKUMPUL
1	s.d. Rp. 50.000,-	$51,02 \% \times 86.973 = 35.676$	Rp. 2.218.650.000,-
2	s.d. Rp. 100.000,-	$6,12 \% \times 86.973 = 5.322$	Rp. 532.200.000,-
3	s.d. Rp. 200.000,-	$16,33 \% \times 86.973 = 14.202$	Rp. 2.840.400.000,-
4	s.d. Rp. 300.000,-	$12,24 \% \times 86.973 = 10.645$	Rp. 3.193.500.000,-
5	s.d. Rp. 400.000,-	-	
6	s.d. Rp. 500.000,-	$4,08 \% \times 86.973 = 3.548$	Rp. 1.774.000.000,-
7	s.d. Rp. 1.000.000,-	$6,12 \% \times 86.973 = 5.322$	Rp. 5.322.000.000,-
8	s.d. Rp. 5.000.000,-	$2,04 \% \times 86.973 = 1.774$	Rp. 8.870.000.000,-
9	s.d. Rp. 10.000.000,-	$2,04 \% \times 86.973 = 1.774$	Rp. 17.740.000.000,-
	Jumlah		Rp. 42.490.750.000,-

Dari tabel di atas terlihat bahwa dana zakat yang telah dibayarkan oleh para wajib zakat di Kabupaten tahun 2004 adalah Rp. 42.490.750.000,- (empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Angka tersebut sungguh fantastis dan jauh lebih tinggi dari PAD Kabupaten Kendal

tahun 2004 yang hanya Rp. 31.893.476.543,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). Dan perlu diingat bahwa angka tersebut didapat dengan menganggap 44,9 persen atau 39.050 muzakki yang hanya menyebutkan prosentase zakat yang dikeluarkannya atau tidak menyebutkan sama sekali sebagai hanya mengeluarkan zakat dalam hitungan minimal, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jika tidak demikian, tentu dana zakat yang telah dibayarkan akan jauh lebih besar lagi. Padahal, seperti tersebut dalam tabel 18, muzakki yang menyebutkan zakat yang dikeluarkan hanya dalam jumlah prosentase dari penghasilan atau tidak menyebutkan sama sekali adalah muzakki kelompok karyawan swasta, PNS dan wiraswasta/pedagang yang di lain pihak merupakan kelompok pembayar zakat dengan besaran antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).<sup>82</sup>

Ketiga, arti zakat sebagai pilar perekonomian umat tidak hanya sebatas pada kondisi ketika dana zakat yang berhasil dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat pada suatu waktu mencapai angka yang tinggi dan demikian pula dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah mencapai jumlah yang signifikan. Tidak, sekali-kali tidak. Makna zakat sebagai pilar perekonomian

---

<sup>82</sup> Memang harus diakui bahwa keadaan yang sebenarnya tidak mesti bersifat matematis seperti itu karena ada variabel lain atau sebut saja faktor X yang berpengaruh dan menentukan. Yaitu faktor tingkat keberagamaan (baca: penghayatan dan pengamalan serta ketaatan terhadap ajaran agama). Maksudnya, bahwa boleh jadi wajib zakat yang ada di luar Kecamatan Ngampel, Patebon dan Kendal tidak sama tingkat keberagamaan dengan wajib zakat yang ada di wilayah tiga kecamatan yang menjadi sampel tersebut. Tetapi, bagaimanapun, hasil penelitian ini setidaknya telah memberikan gambaran akan besarnya dana zakat yang telah dibayarkan oleh para wajib zakat di Kabupaten Kendal.

umat, seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu, setidaknya mencakup tiga hal :

1. Distribusi pendapatan;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ekonomi lemah; dan
3. Peningkatan investasi dan terciptanya lapangan pekerjaan.<sup>83</sup>

Fungsi pertama telah secara otomatis ada dan senantiasa melekat pada zakat dari zaman dahulu hingga kapanpun. Baik dana zakat dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat maupun diserahkan oleh para muzakki secara langsung kepada para mustahik distribusi pendapatan telah terjadi. Fungsi kedua hanya bisa efektif apabila dana zakat dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat. Walaupun dana zakat yang telah dibayarkan oleh para wajib zakat mencapai jumlah yang sangat tinggi, apabila dana tersebut oleh para muzakki diserahkan secara langsung kepada para mustahik maka sulit dikatakan telah terjadi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Demikian pula bila penyaluran dana zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat masih lebih mengutamakan pada dlu'afa konsumtif daripada dlu'afa produktif, maka pemberdayaan belum terealisasi. Sementara itu fungsi ketiga bisa terjadi selama umat Islam yang mampu telah menunaikan zakatnya baik diserahkan secara langsung kepada para mustahik atau dipercayakan kepada badan/lembaga pengelola zakat. Namun fungsi terakhir ini akan lebih efektif apabila dana zakat dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat dan lebih memprioritaskan pada dlu'afa produktif.

---

<sup>83</sup> Baca Bab II terutama pada sub bab potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat.

Dalam kalimat yang lain dapat dikemukakan bahwa pemaknaan terhadap potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemaknaan secara langsung terkait dengan fungsi ekonomis yang kedua dari zakat, sedangkan pemaknaan secara tidak langsung terkait dengan fungsi pertama dan ketiga. **Dengan demikian boleh dikatakan bahwa zakat telah menjadi suatu pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal.**

**Keempat,** upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah melalui pengelolaan dana zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat memerlukan waktu, tidak sekali selesai. Maksudnya, betapapun besarnya dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat pada suatu waktu mustahil dapat langsung menghilangkan kemiskinan dari masyarakat. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya mungkin dikurangi. Karena itu yang diperlukan adalah upaya serius dan terus menerus untuk sampai batas maksimal.

#### **F. Inspirasi :-Ke Arah Pengelolaan Zakat yang Ideal di Kabupaten Kendal**

Terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pranata zakat<sup>84</sup> belum sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan ini ada yang bersifat interen di dalam tubuh umat Islam sendiri dan ada yang bersifat eksteren

---

<sup>84</sup> Di sini perlu dibedakan antara pengelolaan zakat dengan pelaksanaan zakat. Bila yang pertama lebih berkonotasi pada kinerja sebuah lembaga, maka yang kedua lebih berkonotasi pada ada tidaknya obyek. Namun harus diakui bahwa kedua hal itu saling berkaitan satu sama lain.

(pengaruh dari luar). Setidaknya ada lima macam hambatan secara umum yang perlu diketahui, untuk kemudian dicari pemecahannya.<sup>85</sup>

#### 1. Terbatasnya Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan umat Islam akan kewajiban yang harus ditunaikan pada umumnya terbatas dalam ibadah shalat, puasa dan haji. Shalat dan puasa merupakan pelajaran inti bagi setiap orang yang belajar agama pada permulaan sekali. Lebih dari itu kedua macam ibadah tersebut juga dipraktekkan sejak dini sekali, bahkan bagi mereka yang belum baligh.

Ibadah haji juga cukup populer dan menjadi idaman setiap umat Islam. Selain karena publikasi yang gencar dan luas setiap tahun, ibadah ini juga mempunyai daya tarik tersendiri, karena memberikan pengaruh pada peningkatan status sosial di masyarakat.

Sebaliknya dari hal-hal tersebut di atas, ibadah zakat hanya diajarkan sepiantas lalu diwaktu permulaan belajar agama. Demikian pula tidaksering muballigh atau khatib membicarakannya dalam tabligh (pengajian) atau khutbah. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak ada latihan praktek zakat sebagaimana latihan praktek shalat dan puasa. Keadaan ini menjadikan pranata zakat kurang dihayati dengan baik.

#### 2. Konsepsi Zakat

Fiqh zakat (ilmu hukum zakat) yang ada pada umumnya hasil perumusan atau ijtihad para ulama beberapa ratus tahun yang lalu. Fiqh ini ditulis dalam

---

<sup>85</sup> *Motivasi Zakat*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Depag RI, 1995), hal. 6-10.



bahasa Arab yang dipahami oleh para kiyahi dan ulama, kemudian diajarkan di pesantren dan disampaikan kepada masyarakat.

Dalam fiqh lama itu harta yang wajib dizakati masih terbatas sekali, yaitu emas, perak, perdagangan, ternak unta, kambing dan sapi, hasil pertanian berupa makanan yang mengenyangkan, barang temuan serta barang tambang. Begitu juga pelaksanaannya masih sangat sederhana, cukup dibagikan sendiri kepada lingkungannya atau bahkan kepada orang/kiyahi yang disenangi.

Dengan demikian, di zaman modern ini terasa bahwa fiqh zakat seperti itu tidak lagi memadai. Banyak orang mampu namun tidak berzakat karena harta miliknya tidak berupa harta-harta macam tersebut. Atau ada yang berzakat, tetapi pelaksanaannya bersifat langsung sehingga tujuan zakat untuk menolong masyarakat miskin tidak tercapai. Pelaksanaan zakat tidak membebaskan kemiskinan tetapi justru memelihara kemiskinan. Hal demikian karena penyerahan secara langsung cenderung membuat orang tergantung dan tiap tahun akan menanti atau meminta zakat.

### 3. Sifat Manusia

Salah satu sifat manusia adalah watak kikir yang melekat pada dirinya. Ia cenderung menghitung dan menumpuk kekayaannya, hingga berpikir bahwa kekayaan itu akan kekal dalam dirinya. Orang demikian merasakan betapa sulitnya mencari dan mengumpulkan harta kekayaan, dan kemudian tiba-tiba sebagiannya harus diserahkan pada orang lain yang bahkan bukan familinya. Islam memang melindungi kekayaan pribadi, tetapi sampai batas tertentu dibebani

kewajiban untuk menyerahkan sebagiannya kepada lingkungan yang sangat membutuhkan.

#### 4. Perbenturan Kepentingan

Bila zakat ingin diorganisir dengan teratur seringkali ada kelompok masyarakat yang atau organisasi umat Islam yang tidak ikut senang berpartisipasi. Selama ini mereka menerima zakat dari murid, anak buah, anggota atau santrinya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Bila zakat dikelola menjadi satu mereka khawatir tidak akan mendapatkan bagian.

Kekhawatiran itu tidak beralasan, sebab pengorganisasian zakat dimaksudkan untuk mensejahterakan seluruh umat Islam, perorangan maupun organisasi. Dan memang badan/lembaga pengelola zakat harus memperhatikan nasib para kiyahi, ustadz serta da'i/muballigh untuk dapat layak dan mampu membiayai pendidikan anak dan keluarganya.

#### 5. Kepercayaan Muzakki

Pada beberapa tempat ada kurang percaya terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga. Kekawatirannya karena uang zakat tidak akan sampai kepada yang berhak, digunakan secara pribadi atau kelompoknya, atau digunakan secara tidak tepat sasaran. Kekawatiran dan kecurigaan seperti itu mungkin karena yang diharapkan wujudnya tidak kunjung menjadi kenyataan atau mungkin karena tidak ada laporan yang bisa disaksikan secara *open management* (manajemen terbuka).

Hambatan pelaksanaan zakat itu sedikit banyak ada relevansinya dengan hambatan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi pengelola zakat di Kabupaten

Kendal. Beberapa hal perlu diketengahkan di sini sebagai semacam “catatan” atau “pengecualian” di Kabupaten Kendal. *Pertama*, masyarakat wajib zakat di Kabupaten Kendal tidak **alergi** dengan lembaga pengelola zakat. Kebanyakan mereka setuju bila zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat apapun bentuknya. Tingkat kebersetujuan ini terbagi menjadi dua, yaitu setuju tanpa syarat dan setuju dengan syarat para pengelolanya adil, jujur, dapat dipercaya dan dapat bekerja secara professional. Berikut ini tabel persepsi dan sikap masyarakat wajib zakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Tabel : 20  
Persepsi dan Sikap Wajib Zakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat<sup>86</sup>

No.	Jumlah Responden	Setuju		Tidak Setuju	
		Mutlak	Bersyarat	Mutlak	Bersyarat
1	67	45 (67 %)	10 (15 %)	6 (9 %)	6 (9 %)

Dari keseluruhan responden itu hampir semuanya menunaikan zakat dan dari mereka yang berzakat ini hampir semuanya menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin dan beberapa ashnaf lain yang ada di sekitarnya, kecuali satu orang yang karena warga Muhammadiyah ia membayarkannya pada Bapelurzam. Mereka yang membagikan langsung itu beralasan tidak percaya pada lembaga pengelola, terbiasa demikian, dan (terbanyak) karena di tempatnya tidak ada lembaga pengelola zakat. Mereka mengenal lembaga pengelola zakat hanya dari dengar-dengar saja.

<sup>86</sup> Data ini diperoleh dengan menyebarkan angket *door to door* pada wajib zakat yang tinggal di tiga kecamatan yaitu Kota Kendal, Patebon dan Ngampel dan tersebar di enam desa dan tiga kelurahan. desa, 3 kelurahan dan

Kedua, sikap senada juga ditunjukkan oleh para kiyahi dan ulama. Dari lima belas kiyahi dan ulama berpengaruh yang dimintai pendapatnya, semuanya juga setuju dan mendukung pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola, baik secara mutlak maupun dengan syarat adil, bijaksana, dapat dipercaya, dan atau dibentuk oleh pemerintah.<sup>87</sup>

Berangkat dari hasil penelitian di lapangan tentang penggalian potensi zakat di Kabupaten Kendal beserta faktor-faktor yang melingkupi, baik menunjang maupun menghambat dan juga dari pemaparan tentang hambatan-hambatan secara umum dalam pelaksanaan zakat, maka berikut ini pemikiran-pemikiran alternatif yang dapat disumbangkan.

Apa yang telah dicapai oleh Bapelurzam maupun Bapelazis merupakan suatu prestasi yang “baik sekali” sekalipun itu sudah seharusnya. Namun demikian, karena lingkup dari kedua lembaga pengelola zakat itu sangat terbatas, maka apalah artinya prestasi itu bila dinisbatkan pada luas dan besarnya potensi zakat yang sesungguhnya di Kabupaten Kendal. Mayoritas masyarakat Kendal ini merupakan warga NU, sedang warga Muhammadiyah jauh di bawahnya. Bapelazis pun demikian. Ia hanya melingkupi sekitar 500-an PNS di lingkungan Kandepag Kendal.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini sebagai langkah awal perbaikan ke depan kaitannya dengan Bapelurzam dan Bapelazis. Pertama, strategi perzakatan Bapelurzam agaknya sudah saatnya ditinjau ulang. Strategi progresif itu dahulu diambil ketika kondisi perzakatan (maksudnya di kala warga

---

<sup>87</sup> Lokasi tempat tinggal para kiyahi dan ulama berpengaruh yang diwawancarai ini juga meliputi Kecamatan Kota Kendal, Kecamatan Patebon dan Kecamatan Ngampel.

Muhammadiyah) belum kodusif. Jadi boleh dibilang strategi itu bersifat darurat. Kini warga Muhammadiyah telah terkondisikan sedemikian rupa dalam berzakat. Sambil berupaya meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai Bapelurzam harus berani merubah konsepsi-konsepsi dan strategi perzakatan progresifnya karena “nyrempet-nyrempet” rambu-rambu hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud disini antara lain adalah konsep-konsep tentang obyek zakat, *nishab* dan kadar-zakat.

Pola penyaluran dan pengalokasian dana zakat juga perlu ditinjau ulang. Dalam kaitan ini baik Bapelurzam maupun Bapelazis memberikan proporsi yang seimbang antara kelompok dlu'afa terutama fakir miskin dengan kelompok sabilillah dan menyalurkan pos fakir miskin produktif dalam bentuk pinjaman tanpa bunga secara bergilir, bukan berbentuk hibah murni. Demikian pula pada Bapelurzam, pos sabilillah banyak dialokasikan kepada lembaga-lembaga milik Muhammadiyah, daripada pribadi/individu-individu yang bertekun dalam pembinaan umat. Itu semua perlu ditinjau ulang. Baik hukum Islam maupun peraturan perundangan tentang zakat mengamankan penyaluran dana zakat terutama dan diprioritaskan untuk orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,<sup>88</sup> dan bantuan-bantuan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara perorangan maupun kelompok melalui program dan kegiatan yang berkesinambungan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Pasal 28 ayat (1) poin b KMA Baru.

<sup>89</sup> Pasal 14 ayat (4) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (BMIUH).

Laporan pertanggung jawaban pengelolaan zakat, terutama di Bapelurzam tidak mengikutsertakan dana zakat bagian fakir miskin produktif. Untuk menjamin prinsip transparansi dan keterbukaan pada saat ini Bapelurzam dan Bapelazis harus pula melaporkan jumlah akhir dana zakat produktif tersebut secara kumulatif dari tahun ke tahun, data-data tentang mustahiq beserta jenis usahanya, dan mustahiq-mustahiq yang berhasil dientaskan dari kemiskinan sehingga tidak lagi menjadi mustahiq tetapi sebaliknya menjadi muzakki. Dalam kaitan ini menarik sekali tulisan A. Rofiq sebagaimana dimuat dalam harian Suara Merdeka :

“...beberapa hal yng perlu dilakukan BAZ/LAZ adalah menyiapkan database dan inventarisasi muzakki dan mustahik. Database itu merupakan dokumen penting, dan bernilai jangka panjang. Data itu untuk kepentingan efektivitas dan sustainabilitas penghimpunan dana zakat, sementara data mustahik untuk pemantauan dan evaluasi seberapa efektivitas zakat yang dikelola BAZ/LAZ. ...

Ketiga, mengklasifikasikan mustahik, dipilih mana yang akan diberikan zakat secara konsumtif, dan mana yang memang layak diberi zakat produktif. Pemilihan dan klasifikasi mustahik itu penting, karena hanya dengan memilih mereka yang memiliki usaha keras untuk mengubah nasibnya, zakat akan tampak hasilnya secara optimal dan efektif. Boleh jadi besaran zakat yang dibagikan bervariasi, tergantung pada besar-kecil “modal” yang diperlukan untuk usaha.

Keempat, “pendampingan manajemen” dari BAZ/LAZ terhadap mustahik, dan pemantauan usaha mereka secara tertib. Hal itu agar dana zakat yang telah dikeluarkan BAZ/LAZ benar-benar efektif dan tepat sasaran. Kelima, penetapan target BAZ/LAZ, berapa orang mustahik yang dientaskan dari posisi mustahik kepada muzakki dalam waktu satu tahun ke depan. Tentu, hal itu sejalan dengan besaran harta zakat yang terhimpun dari para muzakki.

Keenam, pengadministrasian dan pendokumentasian serta pelaporan kepada publik, khususnya para muzakki, mulai dari data muzakki dan harta zakat yang terhimpun, data mustahik, klasifikasi, dan pendistribusian zakat zakat yang diterima kepada mereka. Jika mungkin dokumentasi dapat

dilengkapi dengan data tentang kegiatan usaha para mustahik, sehingga memudahkan pemantauan”.<sup>90</sup>

Sesuatu yang layak mendapatkan acungan jempol dari Bapelurzam dan Bapelazis adalah dapat berjalannya pengelolaan zakat secara terus menerus, meskipun di sana sini terdapat kekurangan dan sering menabrak peraturan perundangan. Inilah mestinya yang harus digaris bawahi dan perlu dijadikan contoh atau minimal inspirasi bagi lembaga pengelola zakat yang lain terutama BAZ Kendal dan Lazis NU Kendal.

Khusus untuk BAZ Kendal, karena hampir satu tahun sejak pembentukan tidak juga kunjung bekerja maka mestinya keberadaannya perlu dinjau kembali dan selanjutnya dibentuk BAZ Kendal dengan susunan kepengurus yang baru. Atau setidaknya sebelum itu dilakukan, ada peringatan secara tertulis oleh pemerintah terhadap pengurus BAZ tersebut. Menurut Keputusan Dirjen Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Badan amil zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>91</sup> Sesuai Pasal 8 ayat (1) Keputusan Dirjen BMIUH itu, kewajiban BAZ antara lain adalah segera melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.

Tidak adanya peringatan atau peninjauan ulang dari pemerintah terhadap BAZ Kendal hingga saat ini, sekali lagi, merupakan suatu indikasi bahwa Pemerintah tidak punya komitmen melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal. Atau komitmen itu ada, tetapi karena bersamaan dengan momentum Pilkada Tahun 2005 ini Pemerintah belum sempat melakukannya. Semua tenaga,

---

<sup>90</sup> Ahmad Rofiq, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat”, dalam *Suara Merdeka*, edisi Jum’at Pon, 12 Nopember 2004, hal. 1 kolom 1 dan hal. 9 kolom 1-4.

<sup>91</sup> Pasal 8 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal BMIUH.

pikiran dan waktu tercurah pada ajang pesta demokrasi itu yang persiapannya dilakukan sejak jauh dipersiapkan terutama oleh Hendy Boedoro, calon kuat pemenang Pilkada tahun ini dari PDIP yang juga Bupati periode sebelumnya.

Apabila kelak ada pembentukan pengurus BAZ yang baru, maka “kesalahan” pada pembentukan kepengurusan periode sebelumnya tidak boleh terulang lagi. Untuk itu, *pertama*, dalam pemilihan pengurus BAZ yang baru nanti mengutamakan mereka yang memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi<sup>92</sup>, tidak hanya mengutamakan faktor jabatan dinas.<sup>93</sup> Kedua, Kandepag harus konsen terhadap bekerja dan suksesnya BAZ Kendal. Sebab, Depag adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah perzakatan di Indonesia. Bukankah diantara tugas Depag adalah menyelenggarakan pelaksanaan zakat? Dalam hal ini Kandepag Kendal harus sadar bahwa BAZ adalah tugas dan tanggung jawabnya. Suatu tugas konstitusional, yang karena faktor “unggah-ungguh” politik tidak bisa diemban secara langsung namun lewat para pejabatnya yang membidangi masalah zakat dan ada dalam struktur kepengurusan BAZ karena jabatannya tersebut.

Lazis NU mestinya mau belajar dari Bapelurzam, dimana sebagai lembaga pengelola zakat swasta murni Bapelurzam dapat berjalan sukses. Langkah-langkah strategis yang ditempuh Bapelurzam perlu ditiru atau setidaknya dijadikan inspirasi oleh Lazis NU Kendal untuk berjalan dan suksesnya tugas pengelolaan zakat. Para elit NU harus mau ikut *cawe-cawe* mengkondisikan segala sesuatunya terutama sumber daya yang ada demi hal ini. PCNU jangan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 1-4.

<sup>93</sup> Pasal 14 ayat(2) KMA Baru.



menghindar dari masalah ini dengan berlindung pada alasan kemandirian lajnah. Ingat lajnah dibentuk melaksanakan tugas di bidang tertentu yang perlu penanganan khusus. Tugas itu tak lain juga tugas PCNU. Dalam hal ini semua komponen NU harus satu kata, betapa pun sulit dan pahitnya. Kecuali kalau “tuduhan” anti pengelolaan zakat seperti terjadi di banyak tempat itu mau dialamatkan kepada mereka. Satu hal lagi harus ditekankan, kapan lagi NU mau memberdayakan warganya yang kebanyakan hidup di bawah garis kemiskinan, kalau bukan sekarang melalui pengelolaan zakat ini? Untuk ini semua bila perlu pengurus Lazis NU diganti dan selanjutnya dipilih orang-orang yang memenuhi persyaratan, jangan asal comot. Terlalu banyak orang atau kader NU yang memenuhi persyaratan amanah, punya misi dan visi, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi, sebagaimana ditekankan oleh Keputusan Dirjen BMIUH?

Idealnya lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal ini adalah tiga saja, yaitu BAZ Kendal, Bapelurzam dan Lazis NU. BAZ secara organisatoris adalah lembaga pengelola zakat semi pemerintah, sedangkan Bapelurzam dan Lazis NU lembaga pengelola zakat swasta murni yang masing-masing punya basis masa yang berbeda serta merupakan kepanjangan tangan dari dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, termasuk di Kendal. Bapelurzam mengelola zakat dari dan untuk warga Muhammadiyah, Lazis NU mengelola zakat dari dan untuk warga NU, sementara BAZ Kendal mengelola zakat dari dan untuk masyarakat secara umum:

Kedepan apabila BAZ telah berjalan sebagaimana mestinya Bapelazis mesti berubah menjadi UPZ. Tanpa Bapelazis tidak berarti bahwa Kandepag Kendal

tidak bisa terlibat aktif dalam pengelolaan zakat. Tanpa Bapelazis Kandepag Kendal justru dapat terlibat aktif dalam pengelolaan zakat di BAZ Kendal. Toh sama saja. Sebab, penyelenggaraan zakat di tengah merupakan salah satu tugas Depag. Bila operasional BAZ Nasional dibebankan pada APBN Departemen Agama,<sup>94</sup> apakah tidak demikian halnya dengan BAZ Kendal? Meski demikian, Pemkab harus juga mendukung pendanaan BAZ, meskipun dalam SK pembentukannya hanya disebutkan dari dana yang sah.

Ketiga lembaga pengelola zakat yang ada di Kendal tersebut nantinya harus jalan dan bekerja secara maksimal. Mesti diingat bahwa saat ini masyarakat wajib zakat lebih mengharapkan zakat mereka dikelola oleh lembaga pengelola daripada disalurkan secara langsung. Para tokoh masyarakat/kiyahi juga tidak keberatan dan bahkan mendukung pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola, asalkan pelaksanaannya secara baik dan benar. Posisi lembaga pengelola zakat kini sedang dalam tren positif. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Ingat, peluang dan kesempatan tidak akan pernah datang dua kali!

Satu hal lagi perlu dikemukakan di sini, ialah berkaitan dengan ambiguitas yang terjadi pada peraturan perundang-undangan tentang zakat yang agaknya berpotensi terhadap kesulitan dan atau penyimpangan pelaksanaan di lapangan. Berikut ini hal-hal yang dipandang rancu. **Pertama**, masalah kepastian hukum. Pasal-pasal UUPZ secara sengaja memakai beberapa kalimat yang berpotensi terhadap tiadanya kesatuan aturan hukum, seperti “sesuai dengan tuntunan

---

<sup>94</sup> Pasal 17 Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dalam pasal tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran departemen Agama.

agama”, sesuai dengan ketentuan agama”, dan “berdasarkan hukum agama”. Jelas yang dimaksud adalah ketentuan atau norma-norma yang ada dalam fiqh (zakah). Persoalannya adalah dalam tradisi pemikiran hukum Islam (fiqh) hampir tidak ada suatu persoalan yang pemecahannya hanya terdiri dari satu solusi. Hampir semua persoalan direspon oleh banyak pihak secara berbeda, baik dalam satu rumpun madzhab maupun tidak semadzhab. Mestinya UUPZ memakai atau menentukan pilihan-pilihan pada ketentuan-ketentuan atau norma hukum Islam (fiqh) tertentu yang dipandang cocok dan sesuai dengan konteks kekinian dan keindonesiaan;

**Kedua**, masalah lingkup kewenangan BAZ. Pasal-pasal di KMA, terutama Pasal 25 mengesankan adanya pembatasan lingkup kewenangan BAZ pada muzakki-muzakki tertentu baik dalam hal kedudukan/alamat (baca: tempat kerja) maupun “strata sosialnya”. Sementara itu Pasal 9 Keputusan Dijen BMIUH terutama ayat (5) memperluas lingkup kewenangan BAZ pada para muzakki umum (biasa) yang ada di tingkat pedesaan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Di sini kecuali ada pertentangan antara kedua produk hukum yang berbeda hirarkhisnya tersebut, ketentuan-ketentuan hukum itu berpotensi melahirkan kesulitan dalam praktek di lapangan, terutama dalam hal pengumpulan zakat. Maksudnya adalah sangat mungkin terjadi perebutan muzakki antara BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, dan BAZ Kecamatan utamanya terhadap muzakki yang ada pada BUMD dan perusahaan-perusahaan di daerah;

**Ketiga**, masalah kepengurusan BAZ. Pasal 7 KMA Baru menyatakan, “Pejabat Departemen Agama yang membidangi zakat dan pejabat Pemerintah

Daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat". Selanjutnya Pasal 14 ayat (2) menegaskan, "Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara professional dan fulltime". Persoalannya adalah, bagaimana mungkin para pejabat itu yang telah sibuk dengan pekerjaan dinasny dapat bekerja secara professional dan fulltime? Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 6 ayat (4) UUPZ, BAZ merupakan organisasi pengelola zakat semi pemerintah, karena pengurusnya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Konsekwensinya adalah mekanisme kerja BAZ tidak akan sama persis dengan mekanisme kerja lembaga/instansi yang murni pemerintah/negeri, terutama menyangkut masalah waktu dan etos kerja. Jelas, para pejabat itu akan merasa keberatan bekerja di luar jam dinasny tanpa ada konsekwensi secara materi. Seperti pengalaman di BAZ Kendal dan Bapelazis, kebanyakan PNS melakukan kegiatan di kantornya dengan motif bekerja dalam artian mencari uang. Semua kegiatanny selalu mengarah kepada income. Bila tugas BAZ dibebankan pada mereka, maka pelaksanaanny akan bersifat sekedarnya dan sama sekali tidak professional apalagi fulltime;

**Keempat,** masalah pencampuradukan istilah. Baik dalam UUPZ, KMA Baru dan Keputusan Dirjen BMIUH tidak terdapat keseragaman istilah yang dipakai terutama menyangkut masalah penyaluran zakat; ialah istilah pendistribusian dan pendayagunaan. Pada Pasal 1 UUPZ kedua istilah itu dipakai secara bersamaan yang mengandung pengertian adanya perbedaan makna. Dalam hal ini pendistribusian dimaksudkan untuk penyaluran dana zakat secara

konsumtif, sedangkan pendayagunaan dimaksudkan untuk penyaluran dana zakat secara produktif. Namun pada Pasal 16 kedua pengertian itu tidak dibedakan secara istilah; baik untuk pengertian penyaluran secara konsumtif maupun penyaluran secara produktif dipakai istilah pendayagunaan. Demikian pula yang terjadi pada Pasal 28, 29 dan 30 KMA Baru. Sedangkan Keputusan Dirjen BMIUH memakai istilah penyaluran yang diikuti oleh pengertiannya secara terperinci; sama sekali tidak memakai istilah pendistribusian maupun pendayagunaan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian tentang potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten.

1. Penggalian potensi zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal mencakup tiga aktifitas, yaitu pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan. **Pertama**, dalam upaya memaksimalkan hasil pengumpulan zakat diformulasikan suatu konsep perzakatan “progresif” dan ditempuh suatu langkah dan strategi yang juga “progresif” sebagaimana yang dilakukan oleh Bapelurzam. Atau dengan memakai konsep dan strategi perzakatan sedikit konvensional dengan menggunakan “bantuan” birokratik berbau sedikit “paksaan” seperti yang terjadi di Bapelazis. Sistem administrasi yang tertib dan transparan juga ditempuh. Pembuatan laporan pengelolaan zakat adalah suatu nilai plus tersendiri karena yang demikian telah dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, terutama muzakki terhadap lembaga/badan pengelola zakat. Satu hal lagi adalah pemberian contoh dan suri tauladan berzakat dari para tokoh dan pribadi para pengelola zakat. **Kedua**, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat dimaksudkan sebagai penyaluran dana zakat kepada mustahiqnya secara konsumtif. Sedang pendayagunaan zakat dimaksudkan sebagai penyaluran

zakat secara produktif. Tasharruf secara konsumtif dialokasikan pada semua kelompok mustahiq, termasuk fakir miskin. Sedang tasharruf secara produktif hanya dialokasikan pada kelompok fakir miskin dengan kriteria tertentu. Penyaluran dana zakat menekankan pada kelangsungan hidup fakir miskin, pemberdayaan ekonomi lemah dan pembinaan umat Islam yang dalam ashnaf zakat *inheren* pada kelompok fakir miskin konsumtif maupun produktif dan sabilillah.

2. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal, yang dapat dikategorikan sebagai faktor penunjang dan faktor penghambat. Karena ada empat badan/lembaga pengelola zakat yang menjadi obyek penelitian ini, maka bisa terjadi satu faktor merupakan penunjang bagi badan/lembaga pengelola zakat yang satu dan pada saat yang bersamaan juga sekaligus sebagai penghambat bagi badan/lembaga pengelola zakat yang lain. Faktor-faktor penunjang pengelolaan zakat adalah faktor pribadi pengelola zakat, faktor dukungan dari pihak yang punya wewenang atau kuasa, dan faktor wajib zakat sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan zakat meliputi faktor pengelola, faktor penguasa dan yang punya wewenang, faktor wajib zakat, faktor tokoh masyarakat/kiyahi, dan faktor kelembagaan dan biaya operasional organisasi pengelola zakat.
3. Minimnya dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan dikelola oleh badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal tidak serta merta dapat diartikan bahwa potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat bersifat

nihil. Ada beberapa faktor terkait yang justru mengindikasikan bahwa zakat telah menjadi salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Kendal.

4. Ada beberapa kerancuan dalam peraturan perundang-undangan tentang zakat itu sendiri sehingga menjadikannya tidak operasional, atau setidaknya menimbulkan kebingungan. Kedepan materi perundang-undangan seperti itu harus ditinjau ulang agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. -

## **B. Saran-saran**

1. Idealnya lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal adalah tiga saja, yaitu BAZ Kendal, Bapelurzam dan Lazis NU;
2. Pemerintah/penguasa jangan mencampuradukkan masalah politik dengan urusan pengelolaan zakat. Pemerintah perlu menegaskan komitmennya pada pengelolaan zakat yang notabene sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat;
3. Kandepag Kendal perlu banyak mengambil inisiatif dalam BAZ, terutama melalui pejabat-pejabatnya yang masuk dalam struktur kepengurusan BAZ Kendal. Sebab, Kandepag Kendal bertanggung jawab baik secara formal maupun moral terhadap terselenggaranya zakat di wilayah kerjanya. Untuk itu Kandepag Kendal tidak perlu memiliki badan/lembaga pengelola zakat (baca: Bapelazis). Bapelazis dibubarkan saja dan selanjutnya yang ada di sana hanya unit pengumpul zakat.;



4. Bapelurzam perlu meninjau kembali konsep-konsep dan strategi perzakatannya; Lazis NU perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari PCNU Kabupaten Kendal, jangan dituntut untuk mandiri sepenuhnya dengan berkedok keberadaannya sebagai sebuah lajnah (yang mandiri), sementara PCNU lepas tangan sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Buku

- Al-'Asqalaniy, al-Hafidz Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan H. Imam Saefudin, cetakan I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Al-Andalusiy, al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusid al-Qurthubiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, ttp. : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Anshari, Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab*, juz I, Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.
- Al-Dimyathi, al-Sayyid Abi Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha, *I'annah al-Thalibin*, Juz II, Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Thoha Putra, t.t.
- Al-Ghazali, al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Ihya' 'Ulumiddin*, juz I, ttp. : Syirkah Nur Asia, t.t.
- Al-Ghuzziy, Al-'Allamah al-Syaikh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, Semarang : Usaha Keluarga, t.t.
- Al-Haitami, al-Hafiz Nuruddin Ali bin Abu Bakar, *Majma' al-Zawaid*, jilid, ttp. : t.p., t.t.
- Ali, M. Daud dan Daud, Habibah, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, cetakan I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Jaruni, Ahmad Yasin bin Asymuni, *Fiqh al-Zakah fi Tadqiq wa Ta'miq Ahkam Anwa' alZakawat wa Bayan Qadr al-Nishab bi Auzan wa Mikyal Baladina al-Indonesiyyi*, Kediri : PP. Al-Islami al-Salafi, t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid III, Beirut : Dar al-Jail, t.t.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Istambul Turki : Maktabah al-Haqiqah, 1986

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, vol. I, Kairo : Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931
- Al-Khatib, Syaikh Muhammad al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Hilli Alfadh Abi Suja'*, juz I, Surabaya : Maktabah wa Mathba'ah al-Hidayah, t.t.
- Al-Khusaini, Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, juz I, Bandung : Syirkah Al-Ma'arif, t.t.
- Al-Kurdi, Syaikh Ahmad Amin, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allam al-Ghuyub*, Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, *Syarh al-Waraqat*, dicetak pada bagian pinggir Asy Syaikh Ahmad Ibn Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'ala Syarh al-Waraqat*, Semarang : Usaha Keluarga, t.t.
- Al-Malibari, Syaikh Zain al-Din bin 'Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, Cirebon : Syirkah Mathba'ah Indonesia, t.t.
- Al-Mundziri, al-Hafiz al-Mundziri, *Al-Targhib wa al-Tarhib*, jilid I, ttp. : al-Munyarwiyah, t.t.
- Al-Nuriy, sulaiman, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz II, Bairut : Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.t.
- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Ra'ini, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad, *Qurrah al-'Ain fi Syarh Waraqat Imam al-Haramain*, dicetak pada bagian pinggir al-Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali, *Lathaif al-Isyarat*, Surabaya : Dar al-Tsaqaf, t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, cetakan ke 2, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1995
- Anggaran Dasar Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal
- Anggaran Rumah Tangga Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal
- Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

- Ash Shiddieqi, Hasbi, *Kuliah Ibadah : Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan Hikmah*, cetakan 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1963
- *Pedoman Zakat*, cetakan 3, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra. 1999
- , *Pengantar Hukum Islam*, jilid I, cetakan ke 7, Jakarta : Bulan Bintang : 1994
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri, "Laporan Pengelolaan Zakat Amwal Periode XXVI Tahun 1424 H/2004 M."
- , "Laporan Pengelolaan Zakat Amwal Periode XXVII Tahun 1425 H/2005 M."
- Baehaqi, Ja'far, *Corak pemikiran Hukum Islam Prof. K.H. Ali Yafie*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan 1, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, cetakan I, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Doa, H.M. Djamal, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, cetakan pertama, Jakarta : Nuansa Madani Publisher, 2004
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan X, Yogyakarta : yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995
- Hill, Hal, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966 Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, terjemahan Tim PAU Ekonomi UGM, cetakan pertama, Yogyakarta : Pusat Antar Universitas (Studi ekonomi) UGM dan PT. Tiara Wacana Yogya, 1996
- Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2002*, Kendal : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dan Bapeda Kabupaten Kendal, 2003

*Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2003*, Kendal : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dan Bapeda Kabupaten Kendal, 2004

Kararah, Abbas, *Al-Din wa al-Zakah*, Mesir : Syirkah Fann al-Thiba'ah, 1956

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cetakan ke 12, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978/1389

*Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kendal Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2004, Buku II*

Lembaga Amil Zakat "Badan Pelaksana Urusan Zakat Zakat Muhammadiyah" (Bapelurzam) Daerah Kendal, "Laporan Zakat Tahun 1425 H."

M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wacana Fiqih*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cetakan ketiga, Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1991

*Motivasi Zakat*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Depag RI, 1995

Muchojjar HS., H.M. dkk., *Kecenderungan Akulturasi Praktek-Praktek Ibadah Kaum Nahdliyin dan Muhammadiyah Di Semarang*, Laporan Penelitian Kelompok yang dibiayai dari Proyek IAIN Tahun Anggaran 1994/1995

Mudzhar, H.M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, cetakan I, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998

Muhadjir, H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Cetakan 8, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998

Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam fiqih Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002

*Pendapatan Regional Kabupaten Kendal Tahun 2003*, Kendal : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Bekerjasama Dengan Bapeda Kabupaten Kendal, 2004

- Permono, Sjechul Hadi, "Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat dalam Kaitannya dengan UU No. 38 Tahun 1999," Makalah disampaikan dalam Temu Imiah Program Pasca Sarjana (PPS) IAIN Se Indonesia di Semarang, 10-11 Nopember 2001
- Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Depag RI, 2003
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terjemahan Salman Harun, dkk., cetakan 6, Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002
- , *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut : Muassasah Risalah, 1993
- Rahardjo, Dawam , *Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung : Mizan, 1987
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, terjemahan Soeroso dan Nastangin, cetakan II, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kendal Tahun 2004*, Kantor Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Kendal
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Alimandan (Peny.), Jakarta : Rajawali Pers, 1992
- Rosihan, *Panduan Praktis Zakat dan Cara Menghitungnya*, cetakan pertama, Semarang : Lembaga ZIS Masyarakat Peduli, 2001
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, volume I, Libanon : Darul Fikar, 1981
- Sanusi, Bachrawi, *Sistem Ekonomi Suatu Pengantar*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, 2000

- Shiddiqy, Naourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, cetakan I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Sudikan, Setya Yuwana, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, cetakan ke 2, Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1986
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Penerbit Angkasa Raya, 1993
- Wignyosoebroto, Soetandyo, "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe dan Metode Penelitiannya", makalah disampaikan dalam Pelatihan Peneliti Tenaga Edukatif IAIN Walisongo tanggal 1 Oktober s/d 27 Desember 1996
- Yafie, Ali, "Islam dan Problema Kemiskinan," dalam *Pesantren*, Nomor 2/Vol. III/1986
- , *Menggagas Fiqih Sosial*, cetakan 2, Bandung : Mizan, 1994
- , *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cetakan pertama, Yogyakarta : LKPSM, 1997
- Zaenuri, "Reformulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia" dalam *Al-Ahkam*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Volume XIV/Edisi II/Oktober 2003
- Zakat Kita Zakat Terapan Buku I*, Kendal : Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, 1999
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II cetakan II, Jakarta : CV Haji Masagung, 1991

## **B. Kelompok Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat
- Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS)

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1/333/2005 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2004-2007

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal Nomor Mk.04/1.b/Kp.08.4/1465/1991 tanggal 3 Juni 1991 Perihal Gerakan Infaq 1 % Jajaran Departemen Agama Kabupaten Kendal.

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal Nomor MK.04/1.b/Kp.08.4/1254/1995 tanggal 1 April 1995 Perihal Pembentukan BAPELAZIS Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal Nomor Mk.04/1.b/Kp.08.4/0053/2000 tanggal 29 Desember 2000 Perihal Pergantian Pengurus Bapelazis Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal.

### **C. Kelompok Majalah, Koran, Tabloid, Home Page dan Selebaran**

“Kendal Bertekad Jadi Daerah Kaya”, *Suara Merdeka* Edisi Selasa Kliwon, 7 Juni 2005

“Letak Geografis Kabupaten Kendal”, [www.kabupaten-kendal.go.id](http://www.kabupaten-kendal.go.id), edisi Rabu, 2 Februari 2005

“Penduduk Miskin di Jawa Tengah”, *Suara Merdeka*, Edisi Kamis Kliwon, 2 juni 2005

Pengurus Bapelazis Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal, “Laporan Pertanggung Jawaban Bapelazis Periode 2001-2004”.



Pengurus BAZIS Amal Sholih Kabupaten Kendal, "Sejarah Berdirinya BAZIS Amal Sholih Kabupaten Dati II Kendal"

Rofiq, Ahmad, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat", dalam *Suara Merdeka*, edisi Jumat Pon, 12 Nopember 2004